



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KOTA BANDA ACEH 2007 - 2027

Visi Banda Aceh 2026

**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
2007**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 LATAR BELAKANG	I-1
1.1.1 Pengertian RPJP Kota Banda Aceh	I-3
1.1.2 Proses Penyusunan RPJP Kota Banda Aceh	I-3
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	I-3
1.3 LANDASAN HUKUM	I-4
1.4 PRINSIP PENYUSUNAN RPJP KOTA BANDA ACEH	I-5
1.5 HUBUNGAN RPJP KOTA BANDA ACEH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA	I-6
1.6 SISTEMATIKA PEMBAHASAN	I-7
 BAB II KONDISI, ANALISA, PREDIKSI KONDISI UMUM, ISU STRATEGIS KOTA BANDA ACEH	 II-1
2.1 KONDISI DAN ANALIS	II-1
2.1.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup	II-1
2.1.1.1 Kondisi Geografis	II-1
2.1.1.2 Kondisi Geomorfologi	II-2
2.1.1.3 Kondisi Geologi	II-3
2.1.1.4 Kondisi Topografi	II-4
2.1.1.5 Kondisi Klimatologi	II-4
2.1.1.6 Kondisi Hidrologi	II-6
2.1.1.7 Litologi	II-7
2.1.1.8 Lingkungan Hidup	II-7
2.1.2 Demografi	II-12
2.1.2.1 Kependudukan	II-12
2.1.2.2 Tenaga Kerja	II-16
2.1.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam	II-22
2.1.3.1 Analisis Ekonomi Makro Kota Banda Aceh	II-22
2.1.3.2 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	II-31

2.1.3.3	Penanaman Modal	II-33
2.1.3.4	Energi dan Sumber Daya Mineral	II-35
2.1.3.5	Pertanian, Kelautan dan Perikanan	II-38
2.1.3.6	Perindustrian dan Perdagangan	II-42
2.1.4	Sosial Budaya dan Politik	II-45
2.1.4.1	Kesehatan	II-45
2.1.4.2	Keluarga Berencana	II-55
2.1.4.3	Pendidikan	II-58
2.1.4.4	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-64
2.1.4.5	Keluarga Sejahtera dan Sosial	II-67
2.1.4.6	Pemberdayaan Perempuan	II-69
2.1.4.7	Kebudayaan	II-72
2.1.4.8	Pariwisata	II-74
2.1.4.9	Pemuda dan Olah Raga	II-77
2.1.4.10	Ketertiban dan Ketentraman	II-79
2.1.5	Prasarana dan Sarana	II-83
2.1.5.1	Penataan Ruang	II-83
2.1.5.2	Pekerjaan Umum	II-86
2.1.5.3	Perhubungan	II-90
2.1.5.4	Perumahan Rakyat	II-93
2.1.6	Pemerintahan	II-96
2.1.6.1	Pemerintahan Umum	II-96
2.1.6.2	Kepegawaian	II-99
2.1.6.3	Perencanaan Pembangunan	II-102
2.1.6.4	Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informasi	II-106
2.1.7	Syariat Islam	II-109
2.2	PREDIKSI KONDISI UMUM KOTA BANDA ACEH	II-113
2.3	ISU STRATEGIS KOTA BANDA ACEH	II-116

BAB III VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN KOTA BANDA ACEH

	TAHUN 2007 – 2026	III-1
3.1	VISI	III-1
3.2	MISI	III-2

3.3	PRINSIP-PRINSIP DAN NILAI-NILAI	III-7
3.3.1	Prinsip-prinsip	III-8
3.3.2	Nilai-nilai	III-8
3.4	ARAH PEMBANGUNAN	III-9
3.4.1	Pelaksanaan Kehidupan Agama melalui Peningkatan Pengamalan Syariat Islam Secara Kaffah	III-10
3.4.2	Pelayanan Umum Pemerintahan	III-10
3.4.3	Mewujudkan Pembangunan Kota Banda Aceh yang nyaman, Aman, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	III-14
3.4.4	Ekonomi	III-15
3.4.5	Sosial Budaya	III-18
3.5	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA BANDA ACEH	III-20
3.5.1	Terwujudnya Pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah	III-20
3.5.2	Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah disertai dengan pelayanan prima dan penegakan hukum	III-20
3.5.3	Terwujudnya Pembangunan Kota Banda Aceh yang nyaman, aman, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	III-21
3.5.4	Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai pusat perdagangan, industri dan perikanan	III-21
3.5.5	Terwujudnya kehidupan social budaya yang bernuansa Islami dan masyarakat yang beretika	III-22
BAB IV	PENUTUP	IV-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada tanggal 22 April 1205 M bertepatan dengan 1 Ramadhan 601 H Kota Banda Aceh didirikan dan berperan sebagai pusat Kerajaan Aceh Darussalam. Di bawah pemerintahan Sultan Alaidin Al Mugayatsyah, Sultan Alaidin Abdul Kahhar (Al Kahhar), Sultan Alaidin Iskandar Muda Meukuta Alam dan Sultanah Tajul Alam Safiatuddin adalah masa-masa gemilang Kerajaan Aceh Darussalam.

Pada tahun 1874, pemerintah Kolonial Belanda berhasil merebut Kota Banda Aceh dari tangan Kesultanan Aceh dan merubah nama Kota Banda Aceh menjadi Kuta Radja. Dengan dibukanya pelabuhan Ulee Lheu pada waktu itu, Kuta Radja atau Banda Aceh berkembang menjadi kota perdagangan yang maju dimana ekspor dan impor hasil pertanian dan perkebunan terpusat dipelabuhan tersebut.

Pada masa orde baru istilah Kuta Radja kembali diganti menjadi Kota Banda Aceh seperti nama sebelumnya. Pada saat itu Kota Banda Aceh sudah menjadi kota perdagangan dan pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Pada tanggal 26 Desember 2004, gempa bumi dan tsunami menyebabkan tiga kecamatan mengalami kerusakan berat dan tiga kecamatan lainnya mengalami kerusakan sedang. Bencana ini merenggut ribuan jiwa dan menyebabkan rusaknya berbagai infrastruktur kota, orang-orang kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian, tata ruang menjadi berantakan dan kehidupan sosial masyarakat menjadi terganggu. Bencana ini juga menjadikan Kota Banda Aceh menjadi pusat perhatian masyarakat nasional dan internasional. Hal ini juga yang mendorong lembaga donor, NGO, Pemerintah dan berbagai kalangan untuk berpartisipasi dalam memulihkan dan merekonstruksi Kota Banda Aceh.

Pada tanggal 15 Agustus 2005, penandatanganan Nota Kesepakatan Damai (MOU) yang dilaksanakan di Helsinki – Swedia merupakan tahapan penting bagi

Aceh dalam memasuki kehidupan damai yang didambakan masyarakat. Konflik yang berkepanjangan menyebabkan jatuhnya korban yang besar dimana hal ini menghambat stabilitas politik dan keamanan yang menjadi modal dasar pembangunan di Aceh dan khususnya Kota Banda Aceh.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memiliki implikasi yang besar sebagai landasan untuk pembangunan. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan langkah awal dalam perwujudan demokrasi yang ada di Aceh. Hal-hal tersebut merupakan bagian sejarah Aceh dan khususnya Kota Banda Aceh serta tiba saatnya kini bangkit untuk membangun kembali Kota Banda Aceh di berbagai bidang.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa daerah harus menyusun Perencanaan Jangka Panjang Daerah 20 tahun. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang petunjuk penyusunan dokumen RPJP Daerah yang menyatakan bahwa dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional, seluruh Pemerintah Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota **wajib** menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Dengan memperhatikan berbagai regulasi yang ada, kompleksitas permasalahan global, issue-isue pembangunan daerah, gaya kepemimpinan dan manajemen pembangunan daerah maka pemerintah daerah harus melakukan proyeksi 20 tahun yang akan datang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banda Aceh diharapkan dapat sebagai *guideline* yang dapat meningkatkan penerapan *good governance* dan prinsip-prinsip *sustainable development* di segala aspek pembangunan daerah.

1.1.1 Pengertian RPJP Kota Banda Aceh

RPJP Kota Banda Aceh tahun 2007 – 2027 merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun kedepan yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk setiap jangka waktu 5 tahunan. Dokumen perencanaan tersebut adalah bersifat makro yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah, dengan proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan.

1.1.2 Proses Penyusunan RPJP Kota Banda Aceh

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh tahun 2007 – 2027 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. **Pertama**, penyiapan rancangan RPJPK, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran awal visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
2. **Kedua**, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) RPJPK, dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terhadap rancangan RPJPK;
3. **Ketiga**, penyusunan rancangan akhir RPJPK, dimana seluruh masukan dan komitmen hasil Musrenbang Jangka Panjang menjadi masukan utama penyempurnaan rancangan RPJPK serta menjadi rancangan akhir RPJPK; dan
4. **Keempat**, penetapan Peraturan Daerah (Qanun) tentang RPJPK.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

RPJP Kota Banda Aceh Tahun 2007 - 2027 ini disusun dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Secara spesifik tujuan RPJP Kota Banda Aceh adalah :

1. Menjadi acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh, DPR Kota Banda Aceh, dunia usaha, dan elemen masyarakat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh.
2. Menjadi pedoman berwawasan jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai potensi dan kondisi riil serta proyeksinya pada masa yang akan datang.
3. Menjawab tantangan dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang diperkirakan akan menghambat pelaksanaan *good governance* dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
4. Mewujudkan kehidupan yang demokratis, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, tidak diskriminatif dan memberi perhatian kepada kelompok-kelompok rentan, mandiri, sejahtera dan Islami dalam kurun waktu 20 tahun ke depan.

1.3 LANDASAN HUKUM

RPJP Kota Banda Aceh Tahun 2007 - 2027 ini disusun berdasarkan pada ketentuan perundangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

7. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

1.4 PRINSIP PENYUSUNAN RPJP KOTA BANDA ACEH

RPJP Kota Banda Aceh ini disusun dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. *Partisipatif dan Interaktif*, bahwa pelibatan *stakeholder* lebih mendorong terbangunnya rasa kepemilikan dan tanggung jawab yang lebih besar;
2. *Kesetaraan*, bahwa setiap kelompok masyarakat mendapat kesempatan dan informasi yang sama untuk berpartisipasi;
3. *Berwawasan kedepan*, bahwa orientasi pembangunan harus jelas sehingga dengan demikian berbagai pihak dapat mengantisipasi dan mengambil peran atau berkontribusi sesuai kepentingan masing-masing terhadap masa depan yang telah disepakati;
4. *Sesuai kerangka Fungsi dan Urusan Wajib Daerah*, bahwa RPJP ini merefleksikan secara konsisten fungsi dan urusan wajib serta urusan pilihan pemerintahan kota yang terdiri atas **25** urusan wajib dan **8** urusan pilihan untuk memastikan kesinambungan tindak lanjut implementasi arah pembangunan dalam RPJPK kedalam rencana strategis lima tahunan (RPJMK, Renstra SKPD) dan rencana tahunan (RKPD dan Renja SKPD); dan
5. *Singkat dan Padat*, bahwa draft RPJP yang akan dipresentasikan dalam konsultasi publik perlu terstruktur mengikuti kerangka logis perencanaan strategis, fokus dalam bahasa yang sederhana dan informatif untuk

memudahkan pemahaman *stakeholders*, memuat konsensus dan penyepakatan hasil-hasilnya.

1.5 HUBUNGAN RPJP KOTA BANDA ACEH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN

RPJP Kota Banda Aceh merupakan acuan pembangunan 20 tahun ke depan yang mencerminkan kondisi dan karakteristik Kota Banda Aceh serta kehendak masyarakat dalam menata arah pembangunan Kota Banda Aceh secara menyeluruh. RPJP Kota Banda Aceh ini disusun dengan memperhatikan berbagai dokumen perencanaan yang lain untuk memperoleh gambaran menyeluruh dimana dokumen yang dijadikan acuan antara lain :

1. Perda Kotamadya Dati II Banda Aceh Nomor 9 Tahun 1984 tentang Rencana Induk Kota (RIK) Tahun 1983 – 2003;
2. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh Tahun 2002-2010, diantaranya berisi tentang : 1) Ketentuan Umum, 2) Asas, Tujuan, Sasaran, dan Fungsi Tata Ruang, 3) Ruang Lingkup RTRW Kota Banda Aceh, 4) Pengembangan dan Pemanfaatan Ruang, 5) Pengembangan Prasarana Kota, 6) Intensitas Pemanfaatan Ruang, 7) Pengalihan Lahan, 8) Peran Serta Masyarakat, 9) Pengawasan dan Pengendalian, dan lain-lain;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias yang berisi tentang rencana tata ruang Kota Banda Aceh terintegrasi dengan tata ruang Provinsi Aceh; dan
4. Rencana Strategis Kota Banda Aceh Tahun 2005 - 2009 yang memuat Visi Kota Banda Aceh paska tsunami yaitu “Terwujudnya Banda Aceh sebagai Kota Tamaddun, Modern dan Islami”.

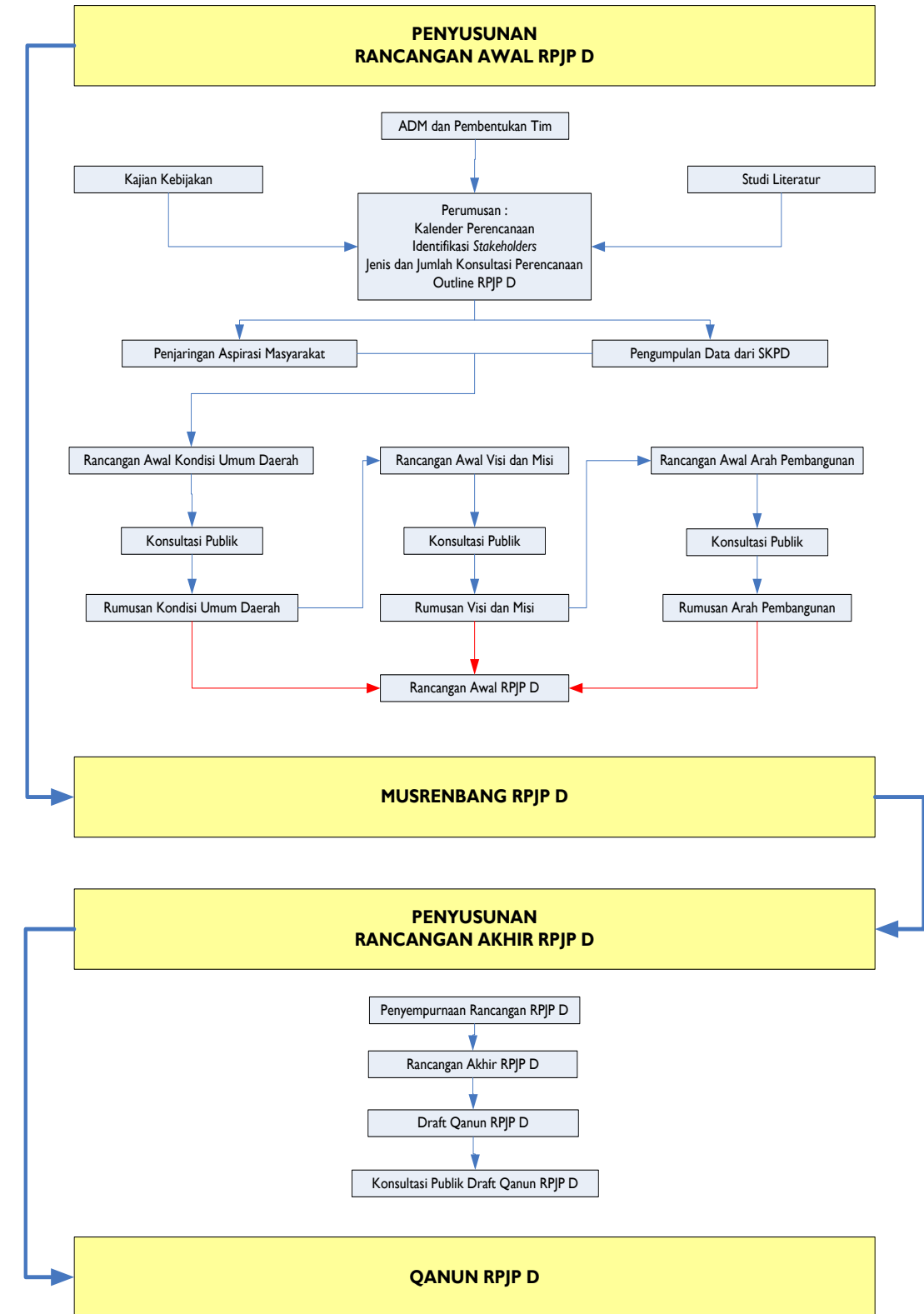
1.6 SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banda Aceh Tahun 2007 - 2027 yang memberikan gambaran mengenai wujud masa depan Kota Banda Aceh disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum Kota Banda Aceh
Bab III	Visi, Misi, Nilai-nilai dan Arah Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2007 - 2027
Bab IV	Penutup

Gambar 1.1

Alur Proses Penyusunan RPJP Kota Banda Aceh



BAB II

KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM KOTA BANDA ACEH

2.1 KONDISI DAN ANALISIS

2.1.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

2.1.1.1 Kondisi Geografis

Letak geografis Kota Banda Aceh antara $05^{\circ}30'$ – $05^{\circ}35'$ LU dan $95^{\circ}30'$ – $99^{\circ}16'$ BT. Tinggi rata-rata 0,80 meter di atas permukaan laut, dengan luas wilayah $61,36 \text{ km}^2$. Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

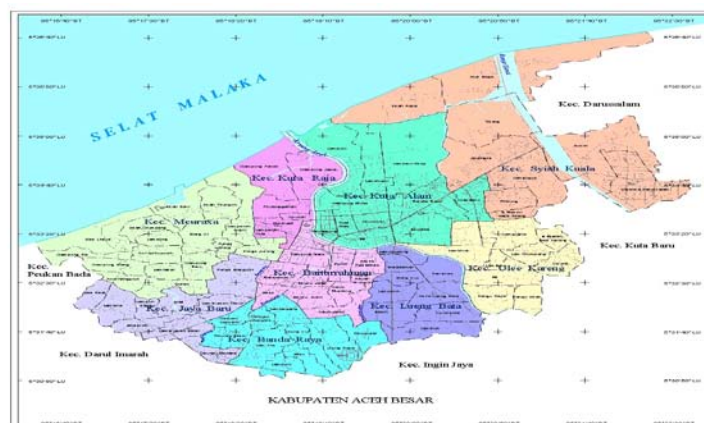
Utara : Selat Malaka

Selatan : Kecamatan Darul Imarah dan Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar

Barat : Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar

Timur : Kecamatan Barona Jaya dan Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar

Adapun wilayah administrasi Kota Banda Aceh meliputi 9 kecamatan, 70 desa dan 20 kelurahan dengan pembagian tiap kecamatan seperti pada Gambar 2.1 berikut ini.



Sumber : Master plan NAD-NIAS Lampiran 2 dan 4

Luas dan persentase untuk tiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan di Banda Aceh

NO	KECAMATAN	LUAS (Km ²)	PERSENTASE (%)
1.	Meuraxa	7,258	11,83
2.	Baiturrahman	4,539	7,40
3.	Kuta Alam	10,047	16,37
4.	Syiah Kuala	14,244	23,21
5.	Ulee Kareng	6,150	10,02
6.	Banda Raya	4,789	7,80
7.	Kuta Raja	5,211	8,49
8.	Lueng Bata	5,341	8,70
9.	Jaya Baru	3,780	6,16
JUMLAH		61,359	100,00

Sumber : Banda Aceh Dalam Angka, 2003

2.1.1.2 Kondisi Geomorfologi

Secara umum geomorfologi wilayah Kota Banda Aceh terletak di atas formasi batuan *vulkanis tertier* (sekitar Gunung Seulawah dan Pulau Breueh), formasi batuan sedimen, formasi endapan batu (disepanjang Krueng Aceh), formasi batuan kapur (dibagian timur), formasi batuan vulkanis tua terlipat (dibagian selatan), formasi batuan sedimen terlipat dan formasi batuan dalam.

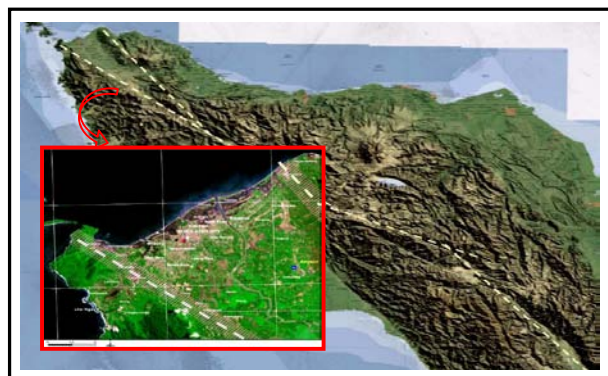
Geomorfologi daerah pesisir Kota Banda Aceh secara garis besar dibagi menjadi: *pertama*, pedataran terdapat di pesisir pantai utara dari Kecamatan Kuta Alam hingga sebagian Kecamatan Kuta Raja; *kedua*, pesisir pantai wilayah barat dari sebagian Kecamatan Meuraxa. Sedangkan daerah yang termasuk pedataran sampai dengan elevasi ketinggian 0 hingga lebih dari 10 m, kemiringan lereng 0 – 2 % terletak antara muara-muara sungai dan perbukitan.

Daerah pedataran di pesisir Kota Banda Aceh secara umum terbentuk dari endapan sistim marin yang merupakan satuan unit yang berasal dari bahan endapan (*aluvial*) marin yang terdiri dari pasir, lumpur dan kerikil. Kelompok ini dijumpai di dataran pantai yang memanjang sejajar dengan garis pantai dan berupa jalur-jalur beting pasir resen dan subresen. Beting pasir resen berada paling dekat dengan laut dan selalu mendapat tambahan baru yang berupa endapan pasir, sedangkan beting pasir subresen dibentuk oleh bahan-bahan yang berupa endapan pasir tua, endapan sungai, dan bahan-bahan *aluvial/koluvial* dari daerah sekitarnya.

2.1.1.3 Kondisi Geologi

Pulau Sumatera dilalui oleh patahan aktif Sesar Semangko yang memanjang dari Banda Aceh hingga Lampung. Patahan ini bergeser sekitar 11 cm per tahun dan merupakan daerah rawan gempa dan longsor.

Pada Gambar 2.2 di bawah ini, menunjukkan ruas-ruas patahan Semangko di Pulau Sumatera dan juga kedudukannya terhadap Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh diapit oleh dua patahan di Barat dan Timur kota, yaitu patahan Darul Imarah dan Darussalam, dan kedua patahan yang merupakan sesar aktif tersebut diperkirakan bertemu pada pegunungan di Tenggara Kota. Sehingga sesungguhnya Banda Aceh adalah suatu daratan hasil ambalasan sejak Pilosen, membentuk suatu Graben. Sehingga dataran Banda Aceh ini merupakan batuan sedimen yang berpengaruh kuat apabila terjadi gempa disekitarnya.

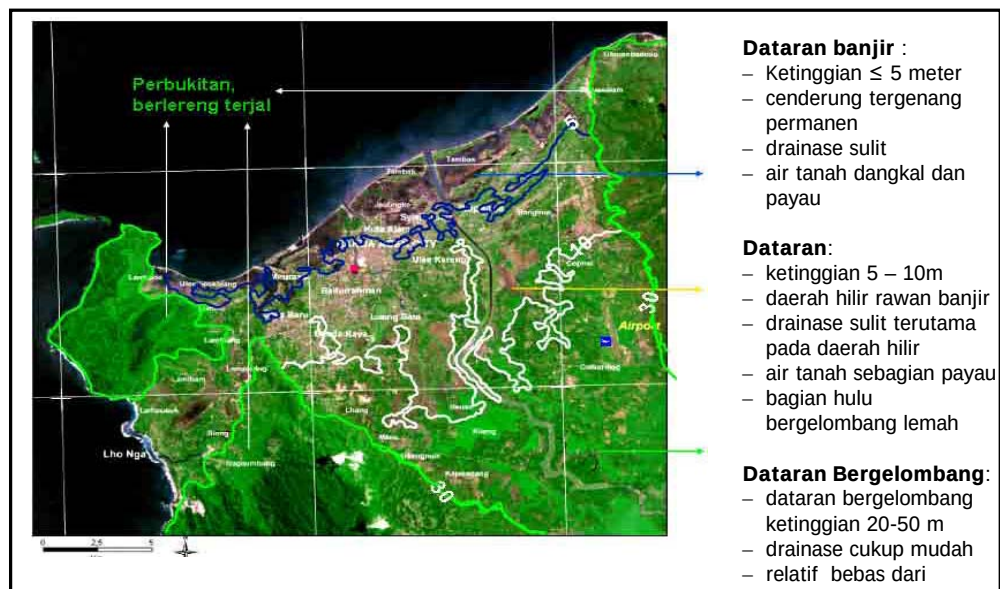


GAMBAR 2.1 : Struktur Patahan Semangko

Sumber: URRP Banda Aceh City, JICA Study Team, Lampiran 4

2.1.1.4 Kondisi Topografi

Kota Banda Aceh secara geologi merupakan dataran banjir Krueng Aceh dan 70% wilayahnya berada pada ketinggian kurang dari 10 meter dari permukaan laut. Ke arah hulu dataran ini menyempit dan bergelombang dengan ketinggian hingga 50 m di atas permukaan laut. Dataran ini diapit oleh perbukitan terjal di sebelah Barat dan Timur dan ketinggian lebih dari 500 m, sehingga mirip kerucut dengan mulut menghadap ke laut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.3 berikut ini.



GAMBAR 2.3 : Bentang Alam Kota Banda Aceh

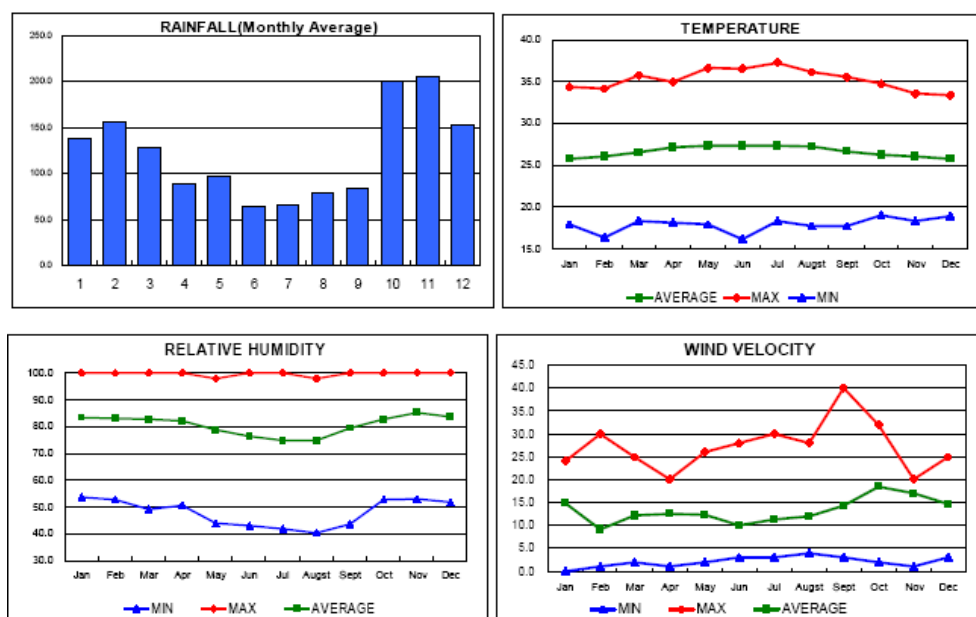
Sumber: Master Plan NAD-NIAS Lampiran 2 dan 4

2.1.1.5 Kondisi Klimatologi

Banda Aceh memiliki suhu udara rata-rata bulanan berkisar antara $25,5^{\circ}\text{C}$ sampai $27,5^{\circ}\text{C}$ dengan tekanan 1008 – 1012 minibar. Sedangkan untuk suhu terendah dan tertinggi bervariasi antara $18,0^{\circ}\text{C}$ hingga $20,0^{\circ}\text{C}$ dan antara $33,0^{\circ}\text{C}$ hingga $37,0^{\circ}\text{C}$.

Curah hujan kota Banda Aceh yang diperoleh dari Stasiun Meteorologi Blang Bintang menunjukkan bahwa curah hujan yang terjadi selama tahun 1986 sampai dengan 1998 berkisar antara 1.039 mm sampai dengan 1.907 mm dengan curah hujan tahunan rata-rata 1.592 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Maret, Oktober dan November, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu 20 – 21 hari dan terendah pada bulan Februari dan Maret dengan jumlah hari hujan hanya 2 – 7 hari.

Kelembaban udara di Kota Banda Aceh sangat bervariasi tergantung pada keadaan iklim pada umumnya. Kelembaban udara dari data tahun 1998 berkisar antara 75% - 87%. Kelembaban udara tertinggi terjadi pada Bulan Desember dan terendah pada bulan Juni. Kecepatan angin bertiup antara 2 – 28 knots. Gambar 2.3 di bawah ini memperlihatkan grafik perkembangan kondisi klimatologis Kota Banda Aceh selama setahun yang meliputi curah hujan rata-rata bulanan; suhu udara rata-rata; maksimum dan minimum; tingkat kelembaban relatif rata-rata; maksimum dan minimum; serta kecepatan angin rata-rata; maksimum dan minimum.



GAMBAR 2.3 : Klimatologi Kota Banda Aceh

Sumber: URRP Banda Aceh City, JICA Study Team

2.1.1.6 Kondisi Hidrologi

Kota Banda Aceh dibelah oleh Krueng Aceh, yang merupakan sungai terpanjang di Kota Banda Aceh. Ada delapan sungai yang melalui Kota Banda Aceh yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air (*Catchment Area*), sumber air baku, kegiatan perikanan, dan sebagainya. Wilayah Kota Banda Aceh memiliki air tanah yang bersifat asin, payau dan tawar. Daerah dengan air tanah asin terdapat pada bagian utara dan timur kota sampai ke tengah kota. Air payau berada di bagian tengah kota membujur dari timur ke barat. Sedangkan wilayah yang memiliki air tanah tawar berada di bagian selatan kota membentang dari kecamatan Baiturrahman sampai kecamatan Meuraxa. Berikut pada Tabel 2.2, menjelaskan nama-nama sungai dan luas daerah resapannya.

TABEL 2.2 : SUNGAI DI KOTA BANDA DAN ACEH

NAMA SUNGAI	LUAS DAERAH RESAPAN (KM ²)
Krueng Aceh	1712,00
Krueng Daroy	14,10
Krueng Doy	13,17
Krueng Neng	6,55
Krueng Lhueng Paga	18,25
Krueng Tanjung	30,42
Krueng Titi Panjang	7,80

2.1.1.7 Litologi

Kondisi tanah yang umumnya terdapat di Kota Banda Aceh secara umum dan khususnya di daerah pesisir ini didominasi oleh jenis tanah Podzolik Merah Kuning (PMK) dan Regosol dengan tekstur tanah antara sedang sampai kasar.

Sebagai hasil erosi partikel-partikel tanah diendapkan melalui media air sungai atau aliran permukaan pada daerah rendah. Pada daerah pesisir terjadi endapan di tempat-tempat tertentu seperti Krueng Aceh dan anak-anak sungai lainnya, seperti pada belokan sungai bagian dalam. Hasil sedimentasi oleh aliran permukaan setempat dijumpai sebagai longgakan tanah pada bagian tertentu.

2.1.1.8 Lingkungan Hidup

A. Input

Permasalahan

Kota Banda Aceh masih mengalami berbagai permasalahan lingkungan hidup. Permasalahan tersebut antara lain :

1. Sampah merupakan masalah lingkungan hidup yang masih harus ditangani serius dalam Kota Banda Aceh. Rata-rata setiap hari Kota Banda Aceh menghasilkan tidak kurang dari 240 m³ sampah dengan berbagai jenis dan kondisinya. Belum termasuk sampah-sampah yang dikelola sendiri oleh penduduk. Masalah persampahan masih dikeluhkan oleh masyarakat karena belum tertangani dengan baik. Kesadaran masyarakat pun masih sangat rendah sehingga sampah menjadi masalah lingkungan hidup dalam Kota Banda Aceh;
2. Dampak lain yang membawa masalah lingkungan adalah pendirian bangunan yang tidak memiliki IMB yang menyalahi rencana tata ruang menyebabkan tertutupnya daerah tangkapan air sehingga menyebabkan banjir dan genangan

air pada pemukiman-pemukiman penduduk (50 Ha genangan air secara terus menerus dan 250 Ha secara periodik);

3. Akibat pembangunan yang kurang terkendali ruang terbuka hijau (RTH) dalam Kota Banda Aceh menjadi berkurang dan hal ini dirasakan menjadi masalah serius akibat tsunami yang telah menghancurkan ruang terbuka hijau di daerah pesisir terutama hancurnya hutan mangrove yang telah ada;
4. Seiring dengan berkurangnya daerah terbuka hijau dan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan efek rumah kaca menambah beban pencemaran udara dan berkurangnya kemampuan mereduksi CO₂;
5. Tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Gampong Jawa tidak sesuai lagi letak dan kapasitasnya untuk jangka panjang;
6. Masalah lingkungan hidup lain yang dihadapi adalah menurunnya kualitas air permukaan tanah khususnya kawasan yang terkena gelombang tsunami. Komponen lingkungan yang terkena dampak tidak hanya kualitas air dari perairan sungai, melainkan juga terhadap biota yang hidup didalamnya. Disamping itu juga dapat mempengaruhi kondisi kualitas udara berupa bau yang ditimbulkan. Sumber dampak berasal dari intrusi air laut yang semakin jauh kedaratan mengakibatkan kualitas air yang terasa payau;
7. Pengelolaan air limbah buangan penduduk Kota Banda Aceh sebelum maupun sesudah tsunami sebagian besar adalah dengan menggunakan pengelolaan setempat (*on site*), yaitu berupa tangki septic dan sistem peresapan di halaman rumahnya, untuk limbah *Black Water* (limbah dari WC)-nya. Sedangkan untuk limbah domestik selain yang dari *Water Closed*, umumnya dibuang langsung ke saluran drainase yang ada di depan rumah. Namun sebagian masyarakat juga masih melakukan pembuangan air limbah langsung ke badan air seperti sungai dan pantai, terutama bagi masyarakat yang berada disekitar kawasan tersebut;
8. Telah terjadi kepunahan beragam habitat karang laut dan binatang laut oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab akibat penggunaan bahan peledak dalam mencari ikan;

9. Terancamnya pertumbuhan binatang karang akibat pengaruh gelombang samudera yang terlalu kuat.

Capaian

Sampai saat ini capaian yang telah didapat di dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah :

1. Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah/limbah Kota Banda Aceh melalui penambahan dan bantuan armada kebersihan, TPS, dan TPA *Sanitary Landfill* oleh negara donor dan NGO. Saat ini terdapat 29 unit Armada Truck Sampah yang beroperasi setiap hari untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA;
2. Dibangunnya kembali taman kota yang rusak akibat tsunami;
3. Ditanaminya kembali hutan mangrove yang rusak akibat tsunami;
4. Adanya tata ruang yang aspiratif dengan tetap memperhatikan kawasan lindung;
5. Kota Banda Aceh telah bebas dari banjir kiriman lima tahunan setelah dilakukan normalisasi sungai;
6. Terbangunnya rumah pompa untuk mengatasi banjir genangan di Kota Banda Aceh;
7. Dibangunnya bantaran, tanggul sungai dan pengamanan garis pantai untuk mencegah terjadinya erosi dan abrasi.

B. Analisis

Proyeksi peluang

Dalam hal penataan lingkungan hidup diproyeksikan ada berbagai peluang yang ada yaitu :

1. Kota Banda Aceh berpeluang untuk menata sistem pengolahan sampah dan limbah dengan mengoptimalkan prasarana dan sarana yang ada termasuk

adanya bantuan tenaga teknis dan armada pengangkut sampah dari lembaga donor;

2. Adanya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup dapat dijadikan sebagai dasar dalam pelestarian lingkungan;
3. Adanya upaya bersama Pemda Kota Banda Aceh dan Pemkab Aceh Besar dalam merencanakan sebuah TPA terpadu yang berlokasi di dalam wilayah Pemkab Aceh Besar;
4. Adanya perhatian NGO dalam hal pembangunan dan pengelolaan sampah;
5. Adanya tuntutan masyarakat agar arah kebijakan pembangunan berpihak pada ekologi (*sustainable development*).

Proyeksi tantangan

Disamping peluang, ada beberapa tantangan yang dihadapi yang menjadi ancaman bagi *sustainability development* yaitu :

1. Munculnya pemanasan global yang tentu saja berimplikasi pada kualitas lingkungan di Kota Banda Aceh;
2. Abrasi dan intrusi air laut menyebabkan rusaknya sempadan pantai dan menurunnya kualitas air tanah;
3. Pergeseran lempeng bumi yang melintasi wilayah Kota Banda Aceh menyebabkan terjadinya penurunan permukaan tanah;
4. Penggunaan teknologi yang tidak ramah lingkungan;
5. Sumber air baku dan air bersih yang semakin terancam akibat terganggunya sistem hidrologi;
6. Pertambahan penduduk, terkonsentrasinya aktivitas manusia dan terjadinya anglorasi ekonomi.

Berbagai masalah dibidang lingkungan hidup ini diakibatkan oleh yaitu :

1. Masih lemahnya institusi pemantauan dan pengendalian atas pencemaran udara dan sampah, akibat *capacity building* yang masih rendah;
2. Rendahnya kerjasama dan kepedulian pihak swasta dalam mengelola sampah dan limbah rumah tangga lainnya (*recycle*) menyebabkan penanganan masalah lingkungan hidup semakin berat;
3. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kelestarian lingkungan;
4. Penanganan masalah lingkungan yang ada masih sangat kurang atau lambat seperti pendangkalan sungai Krueng Aceh dan Krueng Cut serta anak sungai lainnya seperti Krueng Neng, Krueng Daroy, Krueng Doy, Krueng Lueng Paga, dan Krueng Titi Panjang menyebabkan banjir dapat terjadi secara tiba-tiba;
5. Belum ada upaya-upaya mitigasi bencana.

Proyeksi kekuatan

Namun demikian, beberapa aspek kekuatan untuk penanganan lingkungan telah dimiliki berupa *social capital* seperti :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kualitas lingkungan bersih dan sehat;
2. Adanya kebijakan pembagian zona dalam proses pembangunan Kota Banda Aceh seperti zona *green belt*, *aquatic*, meningkatnya sosialisasi akan arti hidup sehat dan bersih oleh berbagai lembaga;
3. Diterapkannya uji kelaikan kendaraan bermotor untuk mengurangi tingkat polusi;
4. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan penghijauan melalui penanaman hutan mangrove yang ditanam kembali setelah tsunami.

C. Output

Prediksi kondisi lingkungan hidup untuk jangka waktu 20 tahun kedepan, antara lain:

1. Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan;
2. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
3. Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
4. Meningkatnya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; terkendalinya polusi;
5. Berkembangnya ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan;
6. Meningkatnya pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut; dan bertambahnya ruang terbuka hijau (RTH).

2.1.2 Demografi

2.1.2.1 Kependudukan

A. Input

Permasalahan

Permasalahan kependudukan yang dialami Pemerintah Kota Banda Aceh selama ini adalah :

1. Pasca Tsunami jumlah penduduk Kota Banda Aceh berkurang sekitar 27 % dari 263.668 jiwa menjadi 192.194 jiwa;

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH PENGUNGS
		PRA-TSUNAMI	PASCA TSUNAMI	
1.	Baiturrahman	37.449	36.783	5.052
2.	Kuta Alam	55.062	43.113	23.971
3.	Meuraxa	31.218	5.657	867
4.	Syiah Kuala	42.779	35.514	6.411
5.	Lueng Bata	18.360	18.254	5.229
6.	Kuta Raja	20.217	5.122	230
7.	Banda Raya	19.071	19.015	9.451
8.	Jaya Baru	22.005	11.384	6.163
9.	Ulee Kareng	17.510	17.388	8.126
TOTAL		263.668	192.194	65.500

Sumber: Pemerintah Kota Banda Aceh, 12 April 2005

2. Kepadatan penduduk yang tidak merata;

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)		LUAS WILAYAH (Ha)	KEPADATAN PENDUDUK (Jiwa/Ha)	
		PRA-TSUNAMI	PASCA TSUNAMI		PRA-TSUNAMI	PASCA TSUNAMI
1.	Baiturrahman	37.449	36.783	453.90	83	81
2.	Kuta Alam	55.062	43.113	1004.70	55	42
3.	Meuraxa	31.218	5.657	725.80	43	8
4.	Syiah Kuala	42.779	35.514	1424.40	30	25
5.	Lueng Bata	18.360	18.254	534.10	34	34
6.	Kuta Raja	20.217	5.122	521.10	39	10
7.	Banda Raya	19.071	19.015	478.90	40	40
8.	Jaya Baru	22.005	11.384	378.00	58	30
9.	Ulee Kareng	17.510	17.388	615.00	28	28
TOTAL		263.668	192.194	6135.9	43	31

Sumber : BPS Propinsi NAD, Tahun 2005

3. Proyeksi penduduk Kota Banda Aceh sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut:

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK
2005	199.194
2006	206.194
2007	213.194
2008	220.194
2009	227.194
2010	234.194
2011	241.194
2012	248.194
2013	255.194
2014	262.194
2015	269.194
2016	276.194
2017	283.194
2018	290.194
2019	297.194
2020	304.194
2021	311.194
2022	318.194
2023	325.194
2024	332.194
2025	339.194
2026	346.194

Sumber: Hasil Perhitungan berdasarkan skenario 2 JICA

4. Tingkat urbanisasi semakin bertambah seiring dengan fungsi yang diemban Kota Banda Aceh. Pada tahun 2005 jumlah penduduk yang masuk ke Kota Banda Aceh sebanyak 5.427 orang dan yang keluar sebanyak 4.017 orang;
5. Komposisi penduduk yang semakin menua (*aging population*).

Capaian

Sejauh ini capaian kependudukan dan catatan sipil adalah:

1. Laju pertumbuhan yang terkendali berkisar 2,3 % per tahun;
2. Adanya sistem pembuatan kartu penduduk yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat;
3. Adanya program Keluarga Berencana dari Pemerintah Kota Banda Aceh.

B. Analisis

Proyeksi peluang

1. Kemajuan teknologi informasi semakin membuka peluang Kota Banda Aceh untuk melakukan pendataan penduduk secara sistematis;
2. Berbagai regulasi yang ada sudah mencerminkan pemerataan pembangunan sehingga aliran penduduk dapat dihindarkan.

Proyeksi tantangan

1. Tantangan terdekat yang akan muncul adalah letak Kota Banda Aceh yang rawan akan gempa dan tsunami menyebabkan populasi yang sudah direncanakan dapat hancur seketika;
2. Kebijakan pembangunan yang tidak berperspektif regional dan memperhatikan kawasan pedesaan serta kawasan tertinggal akan menyebabkan aliran penduduk ke Kota Banda Aceh tidak dapat dihindarkan;
3. Urbanisasi penduduk dari daerah luar Kota Banda Aceh semakin meningkat.

Proyeksi kelemahan

1. Permasalahan ke depan yang dapat muncul adalah kurangnya penerapan penataan ruang oleh Pemerintah Kota Banda Aceh menyebabkan distribusi penduduk tidak merata;
2. Semakin meningkatnya peran dan fungsi Kota Banda Aceh akan semakin meningkatkan tingkat urbanisasi;

Proyeksi kekuatan

1. Proyeksi keberhasilan urusan kependudukan dan catatan sipil adalah tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya keluarga berencana semakin meningkat sehingga laju pertumbuhan alami penduduk dapat dikendalikan;
2. Semakin membaiknya sistem administrasi kependudukan yang ada.

C. Output

Prediksi kondisi kependudukan dalam jangka waktu 20 tahun ke depan, antara lain:

1. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk;
2. Terkendalinya tingkat urbanisasi;
3. Meratanya kepadatan penduduk;
4. Meningkatnya penataan administrasi kependudukan.

2.1.2.2 Tenaga Kerja

A. Input

Permasalahan

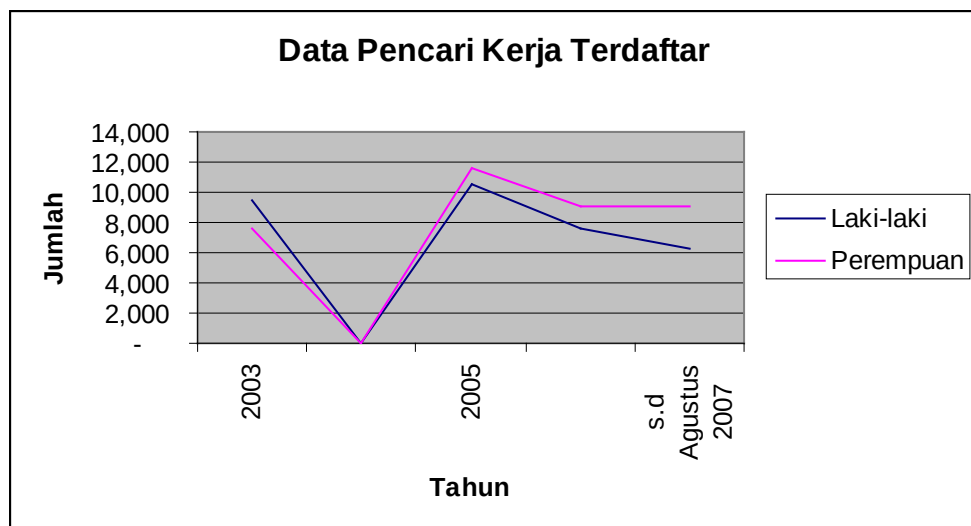
1. Angka pengangguran pada tahun 2005 cukup tinggi yaitu sebesar 76.127 orang atau sebesar 43% dari total penduduk;

Dari jumlah penduduk sebanyak 265.553 jiwa, jumlah angkatan kerja adalah sebanyak 112.116. Sedangkan jumlah pengangguran/pencari kerja, dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini :

**TABEL JUMLAH PENCARI KERJA TERDAFTAR
DI KOTA BANDA ACEH**

Tahun	Pencari Kerja		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
2003	9.519	7.651	17.170
2004*	-	-	-
2005	10.591	11.625	22.216
2006	7.620	9.084	16.704
s.d Agustus 2007	6.241	9.073	15.314
Total :	33.971	37.433	71.404

Grafik.



Sumber : Disnakerduk Kota Banda Aceh

* Data tahun 2004 tidak ada

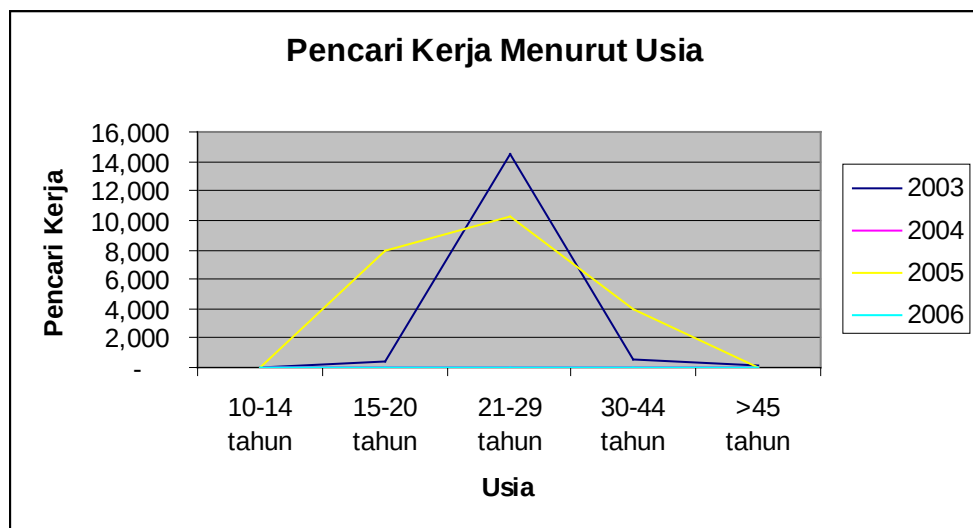
TABEL
PENCARI KERJA BERDASARKAN USIA
DI KOTA BANDA ACEH

No	Tingkatan Usia	Pencari Kerja				JUMLAH
		2003	2004	2005	2006	
1	10-14 tahun	-	-	-	-	-
2	15-20 tahun	450	-	7,904	2,869	8,354
3	21-29 tahun	14,484	-	10,306	5,750	24,790
4	30-44 tahun	561	-	4,006	6,739	4,567
5	>45 tahun	193	-	-	1,642	193
TOTAL		15,703	-	22,216	17,000	37,919

Sumber : Disnakerduk Kota Banda Aceh

* Data tahun 2004 tidak ada

Grafik.



2. Daya saing tenaga kerja lokal masih rendah dibandingkan dengan tenaga kerja dari luar terutama dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal ini diasumsikan dari tingkat pendidikan pencari kerja, lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

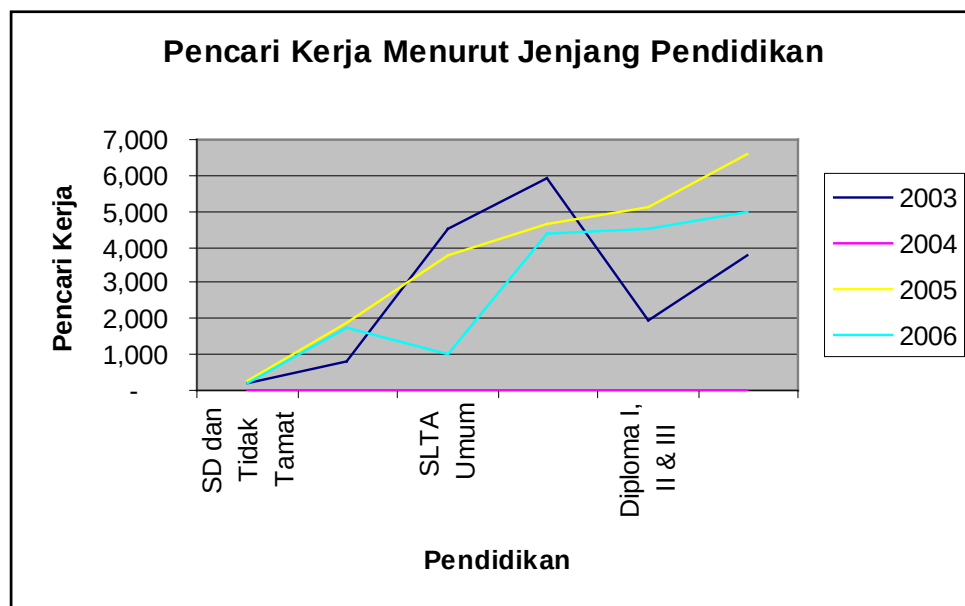
TABEL
JUMLAH PENCARI KERJA MENURUT JENJANG PENDIDIKAN
DI KOTA BANDA ACEH

No	Pendidikan	Pencari Kerja				Jumlah
		2003	2004	2005	2006	
1	SD dan Tidak Tamat	203	-	243	183	629
2	SLTP Umum	799	-	1,904	1,720	4,423
3	SLTA Umum	4,524	-	3,762	981	9,267
4	SLTA Kejuruan	5,931	-	4,620	4,367	14,918
5	Diploma I, II & III	1,946	-	5,119	4,497	11,562
6	Perguruan Tinggi (S1 dan DIV)	3,767	-	6,568	4,956	15,291
TOTAL		17,170	-	22,216	16,704	56,090

Sumber : Disnakerduk Kota Banda Aceh

* Data tahun 2004 tidak ada

Grafik.



Dari grafik menunjukkan bahwa dari latar belakang pendidikan, pencari kerja di Kota Banda Aceh terbanyak adalah pada tingkat SMU sederajat dan Sarjana (S1).

3. Terbatasnya sektor yang dapat menampung tenaga kerja, dimana pada tahun 2005 hanya empat sektor yang berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja yaitu sektor konstruksi/bangunan (9.070 orang), perdagangan (3.615 orang), angkutan (3.520 orang) dan jasa-jasa (3.998 orang). Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL
JUMLAH TENAGA KERJA BERDASARKAN SEKTOR USAHA

No	Sektor Usaha	2003	2004	2005	2006
1	Pertanian	-	-	-	-
2	Pertambangan & Penggalian	-	-	-	-
3	Industri Pengolahan	90	-	-	-
4	Bangunan/Konstruksi	-	-	9,070	8,635
5	Perdagangan	-	-	3,615	-
6	Angkutan	-	-	3,520	-
7	Keuangan & Lbg keuangan lainnya	-	-	-	-
8	Jasa-jasa	99	-	3,998	936
		189	-	19,204	9,571

Sumber : *Disnakerduk Kota Banda Aceh*

* Data tahun 2004 tidak ada

Capaian

1. Pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi, penyerapan tenaga kerja meningkat sangat tajam. Banyaknya tenaga kerja dari luar yang membaaur di lingkungan kerja meningkatkan transfer pengetahuan dan keahlian ke tenaga kerja lokal;
2. Komposisi tenaga kerja yang terdaftar pada tahun 2005 adalah didominasi lulusan D1- III yaitu 7.602 orang, SLTA Umum 7.527 orang, SLTA Kejuruan 4.620 orang dan sarjana 2.944 orang.

B. Analisis

Proyeksi peluang

1. Peluang urusan ketenagakerjaan terutama dimasa rehabilitasi dan rekonstruksi sangat banyak;
2. Berbagai bidang pekerjaan ditawarkan dengan berbagai macam kualifikasi. Adanya lembaga donor yang membantu dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal dan menyalurkannya ke institusi-institusi yang membutuhkannya;
3. Adanya upaya untuk menghidupkan perekonomian lokal sehingga akan menyerap tenaga kerja lokal;
4. Adanya transfer pengetahuan dan keahlian dari tenaga kerja pendatang ke tenaga kerja lokal.

Proyeksi tantangan

1. Tantangan terdekat yang akan muncul adalah akan selesainya masa rehabilitasi dan rekonstruksi dimana berbagai NGO dan lembaga donor akan meninggalkan Kota Banda Aceh sehingga pemutusan hubungan kerja besar-besaran tidak dapat dihindarkan lagi;
2. Mengalirnya arus urbanisasi dengan kualifikasi perorangan yang beraneka ragam akan meningkatkan kompetisi pencari kerja lokal.

Proyeksi kelemahan

1. Hal yang menghambat dalam ketenagakerjaan adalah stabilitas keamanan dan politik yang tidak terjaga akan menyulitkan investasi di Kota Banda Aceh sehingga penyerapan tenaga kerja menjadi terhambat;
2. Tuntutan yang semakin tinggi dalam kualifikasi pekerjaan. Masih terbatasnya tenaga kerja dengan keahlian yang spesifik;
3. Belum adanya lembaga yang mengurus masalah pelanggaran ketenagakerjaan sehingga keamanan bekerja belum terjamin.

Proyeksi kekuatan

1. Faktor keberhasilan urusan tenaga kerja adalah semangat kewirausahaan yang tinggi di masyarakat Kota Banda Aceh;
2. Meningkatnya usia harapan hidup sehingga memperpanjang usia produktifitas tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja sektor jasa yang semakin meningkat.

C. Output

Prediksi kondisi tenaga kerja dalam jangka waktu 20 tahun kedepan, antara lain :

1. Semakin meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
2. Kesempatan kerja yang semakin terbuka dan memberikan banyak pilihan;
3. Adanya perlindungan ketenagakerjaan;
4. Menurunnya pelanggaran ketenagakerjaan;
5. Menurunnya jumlah pengangguran terbuka yang ada.

Ekonomi dan Sumber Daya Alam

2.1.3.1 Analisis Ekonomi Makro Kota Banda Aceh

A. Input

Permasalahan

1. Perekonomian Kota Banda Aceh sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 mengalami pertumbuhan yang positif. Hal ini dilihat dari pertumbuhan angka PDRB baik atas dasar harga berlaku, maupun atas dasar harga konstan tahun 2000.

**Produk Domestik Regional Bruto
Kota Banda Aceh Tahun 2000-2005**

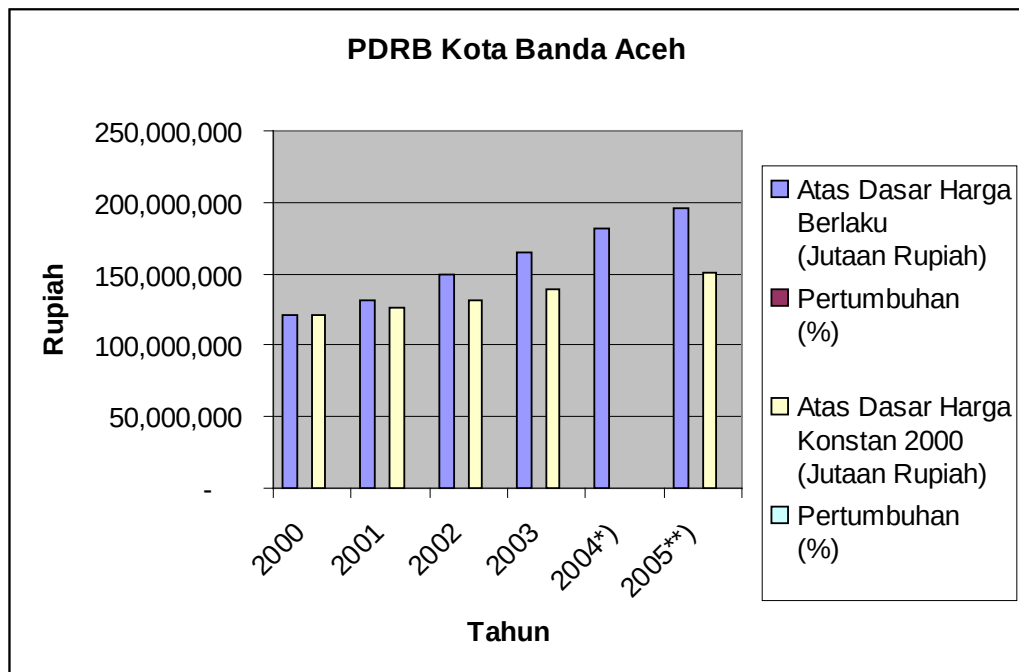
Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (Jutaan Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Jutaan Rupiah)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2000	1.216.609,86	-	1.216.609,86	-
2001	1.318.011,26	8,33	1.259.723,61	3,54
2002	1.493.057,77	13,28	1.314.958,14	4,38
2003	1.644.289,23	10,13	1.388.336,95	5,58
2004 ^{*)}	1.811.553,74	10,17	1.481.859,81	6,74
2005 ^{**)}	1.962.127,97	8,31	1.502.052,15	1,36

Sumber: BPS Kota Banda Aceh

Catatan: ^{*)} Angka Diperbaiki

^{**)} Angka Sementara

Grafik



2. Setelah bencana alam gempa bumi dan tsunami pada tahun 2004, perekonomian Kota Banda Aceh mengalami pertumbuhan negatif. Hal ini tercermin dari turunnya angka PDRB sebesar 1,36% dari angka pertumbuhan tahun 2004.
3. Walaupun pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh mengalami penurunan, tetapi pendapatan perkapita penduduk Kota Banda Aceh mengalami peningkatan pada tahun 2005. Meningkatnya PDRB perkapita ini disebabkan berkurangnya jumlah penduduk Kota Banda Aceh dari 239.146 jiwa di tahun 2004 menjadi 177.881 jiwa di tahun 2005 atau turun sebesar 17.76 persen. Perkembangan PDRB per kapita ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

**Produk Domestik Regional Bruto Perkapita
Kota Banda Aceh Tahun 2000-2005**

Tahun	ADHB (Rupiah)	Pertumbuhan (%)	ADHK 2000 (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2000	5.624.927,11	-	5.624.927,11	-
2001	5.952.593,10	5,83	5.689.345,99	1,15
2002	6.617.723,87	11,17	5.828.327,64	2,44
2003	6.984.433,19	5,54	5.897.226,89	1,18
2004 ^{*)}	7.575.095,30	8,46	6.196.464,96	5,07
2005 ^{**)}	11.030.565,21	45,62	8.444.140,46	36,27

Sumber: BPS Kota Banda Aceh

Catatan: ^{*)} Angka Diperbaiki

^{**)} Angka Sementara

4. Kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap pertumbuhan PDRB meliputi 9 sektor, dimana sektor yang paling besar kontribusinya adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran yaitu menyumbang lebih dari 30

persen terhadap total PDRB. Oleh sebab itu, Perdagangan merupakan sektor unggulan dalam perekonomian Kota Banda Aceh.

**Produk Domestik Regional Bruto Kota Banda Aceh
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2000 – 2005 (Jutaan Rupiah)**

Lapangan Usaha	2000	2001	2002	2003	2004*)	2005**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian	129.014	138.785	15.540	163.836	160.495	123.671
2. Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-
3. Industri Pengolahan	42.465	46.682	54.430	60.212	77.926	83.087
4. Listrik dan Air Minum	6.182	7.615	11.122	14.220	15.940	11.119
5. Bangunan/Konstruksi	112.335	121.446	129.971	137.817	140.423	157.976
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	450.099	474.574	508.658	547.910	593.015	613.179
7. Pengangkutan & Komunikasi	286.191	305.432	330.937	361.921	402.844	457.263
8. Bank dan Keuangan Lainnya	11.650	23.051	63.731	85.300	106.201	142.647
9. Jasa-jasa	178.675	200.427	241.669	273.074	314.710	373.185
Jumlah	1.216.610	1.318.011	1.493.058	1.644.289	1.811.554	1.962.128

Sumber: BPS Kota Banda Aceh

Dari data ini dapat dilihat bahwa sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan potensi utama penunjang perkembangan perekonomian Kota Banda Aceh.

**Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000 – 2005**

Lapangan Usaha	2000	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian	10,60	10,53	10,22	9,96	8,86	6,30
2. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Industri Pengolahan	3,49	3,54	3,65	3,66	4,30	4,23
4. Listrik dan Air Minum	0,51	0,58	0,74	0,86	0,88	0,57
5. Bangunan/Konstruksi	9,23	9,21	8,71	8,38	7,75	8,05
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	37,00	36,01	34,07	33,32	32,74	31,25
7. Pengangkutan dan Komunikasi	23,52	23,17	22,17	22,01	22,24	23,30
8. Bank dan Keuangan Lainnya	0,96	1,75	4,27	5,19	5,86	7,27
9. Jasa-jasa	14,69	15,21	16,19	16,61	17,37	19,02
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Banda Aceh

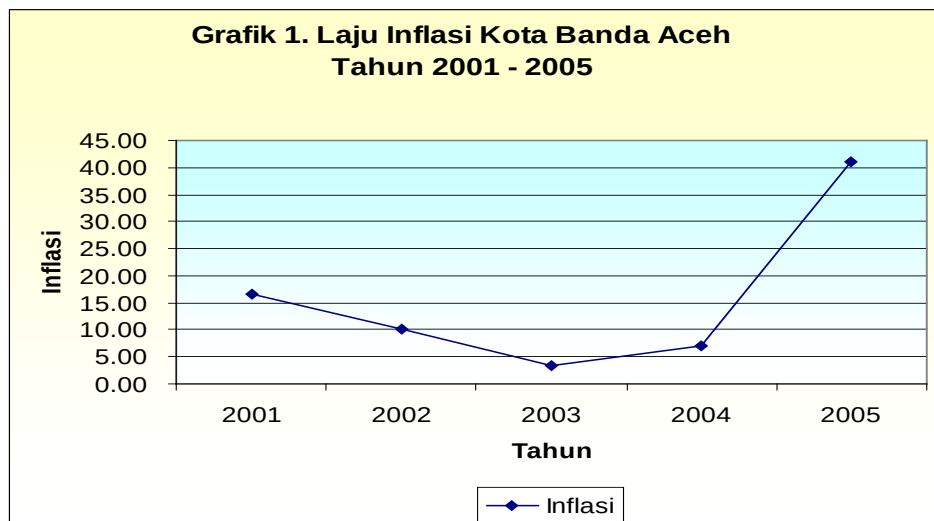
5. Secara makro nilai inflasi yang stabil (di bawah 10 persen) merupakan indikator bahwa kondisi ekonomi suatu wilayah dalam keadaan yang baik. Pada tahun 2001 dan 2002 tingkat inflasi Kota Banda Aceh masih di atas 10 persen diatas 2 digit, yaitu 16,67 persen dan 10,14 persen. Pada tahun 2003 dan 2004 tingkat inflasi berada di bawah 10 persen yaitu 3,50 persen dan 6,97 persen. Tingkat inflasi tahun ke tahun merupakan pencerminan perubahan IHK. Angka inflasi di Kota Banda Aceh tertinggi terjadi pada bulan Oktober tahun 2005 yaitu sebesar 41,11 persen. Angka ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju inflasi tahun 2004 yang hanya sebesar 6,97 persen. Salah satu penyebab tingginya laju inflasi di Kota Banda Aceh pada tahun 2005 adalah terjadinya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang

diberlakukan oleh Pemerintah pada awal bulan Oktober 2005. Perkembangan inflasi Kota Banda Aceh dapat dilihat tabel dan grafik di bawah ini :

Laju Inflasi Kota Banda Aceh
Menurut Kelompok Pengeluaran (Persen)
Tahun 2001-2005

Kelompok	Thn 2001	Thn 2002	Thn 2003	Thn 2004	Thn 2005
TOTAL	16.67	10.14	3.50	6.97	41.11
1. Bahan Makanan	15.62	7.40	-3.59	4.64	60.65
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	22.65	11.33	4.31	4.96	45.60
3. Perumahan	15.63	17.23	8.30	11.33	21.60
4. Sandang	18.26	6.26	9.39	5.17	25.14
5. Kesehatan	15.62	8.75	8.11	0.88	8.04
6. Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga	17.08	8.04	11.34	14.39	8.17
7. Transportasi dan Komunikasi	11.80	12.10	2.57	8.18	61.81

Sumber: BPS Kota Banda Aceh



Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa selain pengaruh kenaikan harga BBM penyumbang terbesar terhadap kenaikan inflasi adalah dari kelompok Transportasi dan Komunikasi, Bahan Makanan, Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau. Secara umum, semua kelompok mengalami kenaikan, hal ini lebih disebabkan karena bencana yang dialami Kota Banda Aceh yang menyebabkan kenaikan harga.

B. Analisis

Proyeksi Peluang

1. Semenjak terjadi bencana alam gempa bumi dan tsunami, banyak negara asing yang memberikan bantuan untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk memulihkan kondisi perekonomiannya. Bantuan berupa dana juga berakibat baik terhadap pemulihan kondisi ekonomi Kota Banda Aceh.
2. Pembangunan sarana dan prasarana secara fisik mampu meningkatkan nilai PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Hal ini diindikasikan dari meningkatnya nilai output pada sektor Konstruksi, Telekomunikasi, dan Transportasi guna mendukung terlaksananya proses rekonstruksi dan rehabilitasi pasca gempa bumi dan tsunami.

Proyeksi Tantangan

1. Negara asing yang masuk ke Kota Banda Aceh untuk memberikan bantuan hanya bersifat sementara. Setelah jangka waktu tertentu mereka akan meninggalkan Kota Banda Aceh. Akibatnya roda perekonomian yang sempat meningkat bisa kembali turun setelah kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi berakhir.
2. Selama ini perekonomian Kota Banda Aceh bertumpu pada kegiatan perdagangan tanpa ada kegiatan produksi. Seharusnya untuk menciptakan kondisi perekonomian yang stabil, selain Kota Banda Aceh memiliki kegiatan konsumsi diharapkan sektor produksi juga berkembang guna memenuhi

kebutuhan penduduk Kota Banda Aceh agar terjadi keseimbangan antara kegiatan konsumsi dan produksi.

Proyeksi Kelemahan

1. Pertumbuhan ekonomi lamban
2. Angka kestabilan inflasi masih sulit diperkirakan
3. Lapangan kerja masih terbatas sehingga berpengaruh pada tingkat pengangguran
4. Infrastruktur prasarana dan sarana dasar masih kurang

Proyeksi Kekuatan

1. Pertumbuhan pembangunan semakin besar
2. Angkatan kerja yang tersedia

C. Output

Proyeksi perekonomian Kota Banda Aceh melalui nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan konstan tahun 2000, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, dan Pendapatan perkapita dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Proyeksi PDRB, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Pendapatan Perkapita
Kota Banda Aceh Tahun 2006 – 2027**

Tahun	PDRB (Jutaan Rupiah)		Pertumbuhan Ekonomi (%)		Inflasi (%)	Jumlah Penduduk ^{*)}	Pendapatan Perkapita (Ribuan Rupiah)	
	Berlaku	Konstan	Berlaku	Konstan			Berlaku	Konstan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2006	2.018.603	1.655.099	2,88	10,34	1,21	206.194	9.790	8.027
2007	2.163.360	1.780.778	7,17	6,95	1,21	213.194	10.147	8.353
2008	2.309.117	1.897.457	6,74	6,55	1,22	220.194	10.487	8.617
2009	2.454.874	2.014.136	6,31	6,15	1,22	227.194	10.805	8.865
2010	2.600.631	2.130.815	5,94	5,79	1,22	234.194	11.105	9.099
2011	2.746.388	2.247.949	5,60	5,48	1,22	241.194	11.387	9.320
2012	2.892.145	2.364.173	5,31	5,19	1,22	248.194	11.653	9.526
2013	3.037.902	2.480.853	5,04	4,94	1,22	255.194	11.904	9.721
2014	3.183.660	2.597.532	4,80	4,70	1,22	262.194	12.142	9.907
2015	3.329.417	2.714.211	4,58	4,49	1,22	269.194	12.368	10.083
2016	3.475.174	2.830.890	4,38	4,30	1,23	276.194	12.582	10.250
2017	3.620.931	2.947.569	4,19	4,12	1,23	283.194	12.786	10.408
2018	3.766.688	3.064.248	4,03	3,96	1,23	290.194	12.980	10.559
2019	3.912.445	3.180.927	3,87	3,81	1,23	297.194	13.165	10.703
2020	4.058.202	3.297.607	3,73	3,73	1,23	304.194	13.341	10.840
2021	4.201.051	3.412.364	3,52	3,52	1,23	311.194	13.500	10.965
2022	4.331.283	3.522.242	3,31	3,31	1,23	318.194	13.612	11.069
2023	4.472.483	3.631.431	3,26	3,26	1,23	325.194	13.753	11.167
2024	4.610.683	3.737.832	3,09	3,09	1,23	332.194	13.879	11.252
2025	4.738.399	3.838.006	2,77	2,77	1,23	339.194	13.970	11.315
2026	5.027.441	3.931.654	2,61	2,61	1,28	346.194	14.522	11.357
2027	5.144.078	4.019.329	2,32	2,32	1,28	353.194	14.564	11.380

Sumber: BPS Kota Banda Aceh

Catatan: ^{*)} Proyeksi Penduduk Berdasarkan Skenario 2 JICA

2.1.3.2 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

A. Input

Permasalahan

1. Permasalahan urusan koperasi yang terjadi adalah setelah tsunami terjadi penurunan jumlah keanggotaan dimana pada tahun 2001 jumlah anggota koperasi 46.947 orang berkurang menjadi 39.400 orang pada tahun 2005;
2. Belum optimalnya lembaga koperasi untuk menunjang perekonomian;
3. Belum tersentuhnya usaha kecil menengah oleh lembaga keuangan.

Capaian

1. Capaian sejauh ini adalah sektor usaha kecil menengah dapat bertahan ketika terjadi krisis ekonomi;
2. Tumbuh dan berkembangnya koperasi dan usaha kecil menengah paska tsunami dengan menonjolkan produk lokal yang dapat bersaing;
3. Meningkatnya jumlah koperasi dimana pada tahun 2001 berjumlah 655 unit bertambah menjadi 708 unit pada tahun 2005;
4. Meningkatnya simpanan, cadangan, dana-dana, volume usaha dan SHU mulai tahun 2001 – 2004.
5. Adanya bantuan *micro finance* project dari berbagai lembaga dunia yang tertarik membantu meningkat dan mengembangkan home industry masyarakat.

B. Analisis

Proyeksi peluang

1. Peluang untuk meningkatkan koperasi, usaha kecil menengah masih terbuka apalagi banyak NGO dan lembaga donor yang fokus dalam peningkatan kapasitas lembaga maupun personil;

2. Di samping itu, adanya pemberian modal usaha oleh lembaga donor merupakan peluang yang baik untuk lebih meningkatkan usaha.

Proyeksi tantangan

1. Acaman yang dapat muncul adalah belum adanya regulasi yang mengatur tentang usaha kecil menengah;
2. Ekspansi lembaga keuangan yang lebih besar akan semakin mengurangi perkembangan koperasi yang sudah ada.

Proyeksi kelemahan

1. Permasalahan yang dapat muncul adalah penggunaan bantuan baik modal usaha atau modal peralatan secara tidak bertanggungjawab oleh penerima;
2. Kualitas hasil usaha yang masih rendah sehingga tidak memiliki nilai jual tinggi;
3. Sumber daya manusia pengelola koperasi yang belum profesional.

Proyeksi kekuatan

1. Faktor keberhasilan yang ada adalah adanya jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh masyarakat Kota Banda Aceh;
2. Iklim usaha di Kota Banda Aceh yang semakin membaik;
3. Semakin membaiknya kinerja lembaga koperasi yang ada.

C. Output

Prediksi kondisi koperasi dan usaha kecil menengah untuk jangka waktu 20 tahun kedepan, antara lain :

1. Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan usaha kecil menengah terhadap PDRB;
2. Meningkatnya nilai ekspor usaha kecil menengah;

3. Iklim usaha kecil menengah yang lebih kondusif;
4. Berkembangnya kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah;
5. Berkembangnya sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
6. Semakin meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi.

2.1.3.3 Penanaman Modal

A. Input

Permasalahan

1. Pada tahun 2000 – 2004 inflasi yang terjadi di Kota Banda Aceh rata-rata 10 % dimana tertinggi pada tahun 2001 yang mencapai 16,67 %. Namun tahun 2005 telah melampaui tahun-tahun sebelumnya dengan angka inflasi tertinggi mencapai 41,11 %;
2. Masih rendahnya kredit untuk modal usaha dan investasi jika dibandingkan untuk konsumsi dimana komposisi pada tahun 2005 adalah kredit modal usaha 35,85 %, kredit investasi 10,09 % dan untuk kredit konsumsi 54,06 %;
3. Investasi di Kota Banda Aceh tidak dapat berkembang karena stabilitas politik dan keamanan ketika masa konflik;
4. Belum adanya profil investasi Kota Banda Aceh.

Capaian

1. Sejauh ini, capaian urusan penanaman modal adalah tercapainya angka inflasi sampai 3,5 % pada tahun 2003;
2. Meningkatnya lembaga perbankan dengan munculnya bank-bank baru di Kota Banda Aceh dimana jumlah total bank pada tahun 2005 yang ada sebanyak 16 dan total kantor bank sebanyak 44.

B. Analisis

Proyeksi peluang

1. Masa rehabilitasi dan rekonstruksi membuka peluang investor asing dan nasional untuk berinvestasi di Kota Banda Aceh;
2. Adanya kesepakatan damai dan Undang-Undang Pemerintah Aceh merupakan jaminan untuk stabilitas keamanan dan politik serta adanya peluang untuk menjalin kerja sama secara langsung dengan negara lain;
3. Lokasi strategis Kota Banda Aceh sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan dimana infrastruktur yang ada masih yang paling baik di Aceh merupakan peluang tersendiri untuk mendatangkan investor;
4. Adanya potensi perikanan dan kelautan yang masih besar dan belum tergarap merupakan peluang satu-satunya yang berasal dari sumber daya alam yang dimiliki Kota Banda Aceh;

Proyeksi tantangan

1. Tantangan yang masih menjadi pertimbangan investor adalah stabilitas keamanan dan politik;
2. Bencana alam yang dapat terjadi seketika mengingat Kota Banda Aceh diapit oleh dua patahan lempeng bumi;
3. Belum adanya regulasi yang berorientasi pada kepentingan bisnis.

Proyeksi kelemahan

1. Masyarakat Kota Banda Aceh belum terbiasa mengelola bantuan keuangan secara profesional sehingga banyak bantuan yang tidak terkelola dengan baik akibat sifat masyarakat yang konsumtif dan bergaya hidup mewah;
2. Kendala lain yang dapat muncul adalah budaya birokrasi yang belum pro bisnis sehingga akan menghambat investasi yang akan masuk.

Proyeksi kekuatan

1. Faktor keberhasilan dalam meningkatkan penanaman modal di Kota Banda Aceh adalah adanya jiwa kewirausahaan yang kuat di masyarakat Kota Banda Aceh;
2. Adanya profil investasi yang memberikan berbagai informasi tentang investasi;
3. Semakin membaiknya sarana dan prasarana Kota Banda Aceh.

C. Output

Prediksi kondisi penanaman modal untuk jangka waktu 20 tahun kedepan, antara lain :

1. Meningkatnya jumlah investasi;
2. Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi;
3. Meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasi;
4. Adanya informasi penanaman modal;
5. Jangka waktu pengurusan ijin usaha yang semakin cepat;
6. Meningkatnya potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah.

2.1.3.4 Energi dan Sumber Daya Mineral

A. Input

Permasalahan

1. Pasokan listrik yang terbatas dimana pada tahun 2004 produksi yang dihasilkan 284.751.730 Kwh menurun sebesar 35,7 % menjadi 183.099.901 Kwh pada tahun 2005. Hal ini disebabkan hilangnya sumber pasokan listrik selain dari pembangkit PLN akibat tsunami;

2. Jumlah pelanggan pada tahun 2005 juga menurun sebesar 50,4 % menjadi 92.469 orang dari 186.388 orang pada tahun 2004;
3. Demikian pula kontribusi sektor listrik terhadap PDRB mengalami penurunan dari 0,60 % pada tahun 2004 menjadi 0,38% pada tahun 2005;
4. Sebagian besar jaringan listrik pasca tsunami hancur serta belum semuanya diperbaiki;
5. Kurang terjalin koordinasi antar dinas dalam melakukan pembangunan.

Capaian

1. Sebelum tsunami kontribusi sektor listrik terhadap PDRB mengalami kenaikan yaitu rata-rata 0,02 %;
2. Adanya sumber pasokan listrik selain dari PLN yang mencapai 7.036.260 Kwh;
3. Terkoneksinya kembali jaringan listrik di wilayah yang terkena tsunami.

B. Analisis

Proyeksi peluang

Peluang untuk menambah pasokan listrik di Kota Banda Aceh adalah:

1. Adanya rencana pembangunan PLTU di Gunung Seulawah;
2. Selain itu, jika dilakukan interkoneksi antara pasokan listrik untuk wilayah sumatera bagian utara dengan sumatera bagian selatan ataupun dengan jawa tentunya akan meningkatkan pasokan listrik.

Proyeksi tantangan

1. Tantangan terbesar bidang energi kelistrikan adalah ketergantungan yang besar akan pasokan listrik dari pembangkit PLTA Asahan;

2. Tantangan lain yang dapat muncul adalah meningkatnya kebutuhan energi listrik di luar Kota Banda Aceh dimana hal ini akan mengurangi pasokan yang ada;
3. Banyak terjadi kehilangan arus listrik akibat penyabotan orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga PLN selalu merugi.

Proyeksi kelemahan

1. Secara internal, permasalahan yang akan muncul adalah semakin banyaknya rumah yang terbangun kembali setelah dilanda tsunami dimana hal ini akan meningkatkan permintaan energi listrik;
2. Jika hal ini tidak diimbangi dengan pasokan yang cukup pemadaman listrik bergilir tidak dapat dihindarkan;
3. Selain itu, pencurian arus listrik tentunya akan menambah beban daya yang harus dipenuhi tanpa adanya pemasukan terutama untuk meningkatkan PDRB;
4. Belum maksimal pelaksanaan manajemen kelistrikan.

Proyeksi kekuatan

1. Seiring dengan bertambahnya penduduk dan aktivitas, kebutuhan listrik akan meningkat dan tentunya akan semakin memberikan kontribusi terhadap PDRB;
2. Hal lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam mengembangkan energi kelistrikan adalah bahwa listrik sudah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat;
3. Semakin meningkatnya kebutuhan energi listrik seiring dengan dilakukannya pembangunan kawasan-kawasan permukiman.

C. Output

Prediksi kondisi energi dan sumber daya mineral untuk jangka waktu 20 tahun kedepan, antara lain :

1. Semakin meningkatnya kontribusi sektor energi terhadap PDRB;
2. Berkembangnya bidang ketenagalistrikan;
3. Berkurangnya kasus pencurian daya listrik;
4. Terlayannya seluruh masyarakat akan pasokan listrik;
5. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menghemat penggunaan jaringan listrik.

2.1.3.5 Pertanian, Kelautan dan Perikanan

A. Input

Permasalahan

1. Kurangnya perhatian Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengelola pertanian termasuk sumber daya laut (tambak, padang lamun, terumbu karang) menyebabkan kontribusi terhadap PDRB sangat kecil dan mengalami penurunan dari tahun 2003 – 2005 yaitu sebesar 9,96 % pada tahun 2003 menjadi 6,3 % pada tahun 2005;
2. Belum adanya badan atau perusahaan swasta yang dapat menampung atau mengelola hasil perikanan masyarakat secara efektif dan efisien menyebabkan sektor pertanian memiliki kontribusi yang kecil bagi PDRB Kota Banda Aceh;
3. Hancurnya sumber daya alam khususnya laut dan wilayah pesisir akibat hantaman gelombang tsunami menyebabkan perlu adanya proses rehabilitasi terumbu karang, pertambakan dan hutan mangrove;

4. Pasca tsunami banyak fasilitas perikanan hancur dan belum separuhnya diperbaiki, sehingga berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat yang berimbas pada PAD kota.

Capaian

1. Sub sektor perikanan merupakan penyumbang PDRB terbesar pada sektor pertanian yaitu sebesar 56,66 % dan menyumbangkan 3.59% pada PDRB Kota Banda Aceh di tahun 2005;
2. Banda Aceh termasuk salah satu penghasil udang, kepiting, ikan kerapu, lobster dan berbagai jenis makanan laut (*sea food*) dengan produksi total 56.797 ton pada tahun 2005;
3. Banyak petani tambak yang mengelola tambak secara tradisional sehingga tingkat pencemaran air akibat pupuk dan obat-obatan yang mengandung bahan kimia yang berbahaya dapat dikurangi;
4. Banyak negara donor yang bergerak dibidang pemberdayaan perikanan, baik dalam bentuk fisik maupun modal usaha;
5. Pemasaran hasil perikanan laut dan petani tambak selama ini tidak menjadi kendala karena masyarakat dapat langsung melakukan transaksi di Pasar Aceh yang merupakan salah satu pusat pasar dan berdekatan dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lampulo.

B. Analisis

Proyeksi peluang

1. Garis pantai yang membentang ± 11 km di Kota Banda Aceh merupakan potensi untuk pengembangan perikanan dimana pada tahun 1999 potensi lahan budidaya tambak seluas 632,20 Ha yang tersebar di Kecamatan Kuta Alam, Kecamatan Syiah Kuala dan Kecamatan Meuraxa;
2. Peluang lain adalah adanya lembaga donor yang membantu dalam peningkatan usaha kelautan dan perikanan;

3. Meningkatnya permintaan pasar dunia akan hasil perikanan dan kelautan semakin mendorong tumbuhnya sub sektor ini;
4. Sebagian besar lahan tambak yang rusak masih efektif untuk dikembangkan kembali menjadi lahan tambak.

Proyeksi tantangan

1. Tantangan yang muncul dalam sub sektor perikanan dan kelautan adalah ketidakstabilan harga. Hal ini akan berimplikasi pada teknik-teknik produksi yang dilakukan oleh petani;
2. Ketidakstabilan harga BBM juga mempengaruhi produksi nelayan;
3. Pencurian hasil laut oleh nelayan asing merupakan tantangan yang dapat mengganggu produksi dan pelestarian lingkungan;
4. Selain itu, belum adanya regulasi yang mengatur tentang sub sektor perikanan dan kelautan Kota Banda Aceh menyebabkan potensi yang ada tidak bisa dioptimalkan;
5. Kebanyakan petani tambak masih mengelola tambaknya dengan cara tradisional, sehingga berpengaruh terhadap hasil tambak.

Proyeksi kelemahan

1. Kemampuan untuk bangkit dan mengelola tambak seperti sebelum tsunami merupakan permasalahan bagi petani karena selain tambaknya rusak, modal juga tidak ada;
2. Penguasaan teknologi yang rendah menyebabkan petani lebih tertarik mengelola tambak secara tradisional sehingga hasil yang didapat tidak maksimal. Kurang tersedianya pabrik-pabrik pengolahan menyebabkan hasil perikanan dan kelautan tidak dapat dipertahankan sehingga pencemaran lingkungan akibat pembusukan tidak dapat dihindarkan;
3. Sumber tenaga perikanan masih lemah dan kurang informasi tata cara pengelolaan perikanan yang baik;

4. Kurangnya *quality control* terhadap hasil perikanan dan kelautan menyebabkan terhambatnya ekspor perikanan.

Proyeksi kekuatan

1. Keberhasilan yang dapat dipertahankan adalah tradisi masyarakat Kota Banda Aceh yang sejak jaman kerajaan menjadi masyarakat nelayan serta melakukan hubungan dagang antara provinsi dan negara;
2. Hasil laut seperti ikan tuna, terumbu karang, padang lamun, udang, kepiting, ikan kerapu, lobster dan berbagai jenis kerang lainnya yang merupakan salah satu hasil pemeliharaan dan penangkaran merupakan sumber mata pencaharian sebagian masyarakat;
3. Program pembangunan pelabuhan samudera di Lampulo merupakan salah satu pendorong untuk meningkatkan pemasaran hasil perikanan dan kelautan;
4. Kota Banda Aceh yang letaknya dipesisir pantai sangat efektif untuk dikembangkan bidang perikanannya.

C. Output

Prediksi kondisi pertanian, kelautan dan perikanan untuk jangka waktu 20 tahun kedepan, antara lain :

1. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB;
2. Semakin meningkatnya ekonomi masyarakat pesisir;
3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan;
4. Meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut;
5. Meningkatnya mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut;

6. Meningkatnya kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat;
7. Meningkatnya pengembangan budidaya perikanan dan perikanan tangkap;
8. Adanya sistem penyuluhan perikanan; meningkatnya pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan;
9. Meningkatnya pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.
10. Serta meningkatnya pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

2.1.3.6 Perindustrian dan Perdagangan

A. Input

Permasalahan

1. Permasalahan perindustrian dan perdagangan sejauh ini adalah hancurnya sektor perekonomian Kota Banda Aceh seperti pusat perdagangan di Pasar Peunayong dan Pasar Aceh akibat tsunami;
2. Belum optimalnya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam merelokasi para pedagang secara permanen;
3. Pelaku usaha perdagangan pada umumnya bukan penduduk Kota Banda Aceh;
4. Industri yang ada di Kota Banda Aceh lebih didominasi industri kecil/ industri rumah tangga yaitu sebanyak 827 unit (tahun 2005);
5. Kurangnya manajemen dalam mengelola industri disamping itu juga tenaga staf yang dapat mengelola industri yang baik;
6. Modal sangat menentukan berhasil tidaknya pembangunan industri.

Capaian

1. Sejauh ini, capaian urusan perindustrian dan perdagangan adalah adanya dukungan dari pemerintah dan lembaga donor dalam merehabilitasi dan merekonstruksi pusat-pusat perdagangan dan perekonomian Kota Banda Aceh;
2. Selama tahun 2003 – 2005 sektor perdagangan merupakan penyumbang PDRB (berdasar harga konstan tahun 2000) Kota Banda Aceh terbesar yaitu 35,32%; 34,77% dan 32,08%. Pada tahun 2005 Dinas Perindustrian dan Perdagangan berkontribusi dalam meningkatkan PAD dimana realisasi melampaui target yaitu sebesar 468,57%;
3. Industri rumah tangga merupakan salah satu sektor industri yang paling bertahan dari lesunya perekonomian ketika dilanda krisis pada tahun 1998;
4. Tumbuhnya gairah baru dan minat masyarakat untuk mengembangkan industri rumah tangga.

B. Analisis

Proyeksi peluang

1. Peluang yang dapat ditangkap dalam rangka pengembangan perindustrian dan perdagangan adalah meningkatnya dinamika kehidupan Kota Banda Aceh yang disertai tumbuhnya pusat-pusat perdagangan baru;
2. Lokasi strategis Kota Banda Aceh sebagai pusat pemerintah, perdagangan dan jasa serta merupakan jalur lintas perdagangan internasional semakin mendorong tumbuhnya sektor perdagangan tersebut;
3. Adanya Undang-undang Pemerintah Aceh yang memungkinkan terjalinnya kerjasama perdagangan secara langsung dengan negara lain.

Proyeksi tantangan

1. Dalam jangka waktu dekat, tantangan yang muncul adalah perekonomian Kota Banda Aceh bisa hancur dan tidak dapat bangkit kembali setelah para

lembaga donor selesai melaksanakan tugasnya dalam merehabilitasi dan merekonstruksi;

2. Harga barang yang tinggi tidak terjangkau oleh masyarakat akibat perputaran uang yang tinggi tanpa diimbangi *supply* yang memadai;
3. Meningkatnya sifat konsumtif masyarakat terhadap produk luar menyebabkan ketergantungan akan barang impor;
4. Masuknya investor luar untuk membangun pusat perdagangan baru menyebabkan sektor informal akan tersisih;
5. Fluktuasi nilai tukar dolar dan inflasi secara nasional akan mempengaruhi harga di Kota Banda Aceh;
6. Hasil produksi industri masyarakat sulit untuk dipasarkan secara luas.

Proyeksi kelemahan

1. Seiring tumbuhnya perekonomian kota, konsumen akan semakin lebih menuntut dan membutuhkan perlindungan. Hal ini akan menyebabkan semakin dituntutnya peran lembaga perlindungan konsumen akan produk-produk yang ada di pasaran;
2. Skala industri yang kecil disertai dengan penguasaan teknologi yang rendah menyebabkan perindustrian akan sulit berkembang;
3. Belum memperlihatkan keseriusan pemerintah untuk pemasaran hasil industri masyarakat.

Proyeksi kekuatan

1. Sektor perdagangan akan tetap memberikan kontribusi terhadap PDRB mengingat peran Kota Banda Aceh sebagai pusat perdagangan;
2. Jiwa kewirausahaan masyarakat yang besar akan tetap menjadi pendorong tumbuhnya sektor perindustrian dan perdagangan;

3. Situasi politik dan keamanan yang semakin membaik juga membawa implikasi pada tumbuhnya investasi perindustrian dan perdagangan di Kota Banda Aceh;
4. Kehidupan Kota Banda Aceh dan dibangunnya kembali pasar yang rusak, merupakan awal kebangkitan industri.

C. Output

Prediksi kondisi perindustrian dan perdagangan dalam jangka waktu 20 tahun, antara lain :

1. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB;
2. Adanya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
3. Meningkatnya kerjasama perdagangan internasional;
4. Meningkatnya nilai ekspor dan menurunnya nilai impor;
5. Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri;
6. Adanya pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.

Sosial, Budaya dan Politik

2.1.4.1 Kesehatan

A. Input

Banda Aceh sebagai ibu Kota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pusat rujukan dari seluruh sarana kesehatan Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pembangunan dan peningkatan kembali sarana dan prasarana kesehatan terlaksana dengan adanya bantuan Negara donor, NGO, BRR, dana APBD dan APBN, sehingga jumlah sarana pelayanan kesehatan di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel berikut :

TABEL
STATUS KEPEMILIKAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2006

NO	SARANA KESEHATAN	STATUS KEPEMILIKAN					JML
		PEMKO	PEM PROV	SWASTA	TNI	POLRI	
1	Rumah Sakit Umum	1	1	7	1	1	11
2	Rumah Sakit Jiwa		1	-	-	-	1
3	Rumah Sakit Ibu dan Anak		1	-	-	-	1
4	Puskesmas	10	-	-	-	-	10
5	Puskesmas Pembantu	14	-	-	-	-	14
6	Polindes	16	-	-	-	-	16
7	Klinik Swasta		-	12	-	-	12
8	Posyandu		-	-	-	-	103
JUMLAH		41	3	19	1	1	168

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

Tenaga kesehatan di Kota Banda Aceh tahun 2006, sebanyak 680 orang, terdiri dari tenaga medis 69 orang, perawat dan bidan 395 orang, tenaga farmasi 41 orang, tenaga gizi 23 orang, teknisi medis 56 orang, tenaga sanitasi 30 orang, tenaga Kesmas 66 orang. Tenaga kesehatan tersebut belum terdistribusi secara merata sesuai dengan jenis pendidikannya. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.21
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Jenis Sarana dan Tenaga Kesehatan
di Masing-masing Kecamatan

No	KECAMATAN	SARANA KESEHATAN	TENAGA KESEHATAN							JUMLAH
			MEDIS	PERAWAT & BIDAN	FARMASI	GIZI	TEKNISI MEDIS	SANITASI	KESMAS	
1	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18
		puskesmas (termasuk pustu & polindes)								
1	Kuta Alam	Puskesmas Kuta alam	4	27	5	2	2	4	1	45
		Puskesmas Lampulo	2	12	0	1	1	1	0	17
2	Kuta Raja	Puskesmas Lampaseh	2	26	1	0	3	1	0	33
3	Syiah Kuala	Puskesmas Kopelma	4	26	1	1	1	3	3	39
		Puskesmas Lingke	4	16	1	0	1	3	2	27
4	Baiturrahman	Puskesmas Batoh	5	59	6	1	4	5	3	83
5	Lueng Bata									
6	Ulee Kareng	Puskesmas Ulee Kareng	4	39	3	2	4	2	1	55
7	Meuraxa	Puskesmas Meuraxa	6	26	1	2	3	0	2	40
8	Jaya Baru	Puskesmas Lampoh Daya	3	24	2	1	2	1	6	39
9	Banda Raya	Puskesmas Mibo	5	43	4	2	3	1	4	62
SUB TOTAL		10 Puskesmas	39	298	24	12	24	21	22	440
10		Dinas Kesehatan	0	19	0	2	3	5	31	60
11		Gudang Farmasi	30	78	11	9	29	4	13	174
12		RS Meuraxa	0	0	6	0	0	0	0	6
TOTAL			69	395	41	23	56	30	66	680

Sumber : Dinkes Kota Banda Aceh

Keterangan :

- Medis : Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis
- Perawat & Bidan : Termasuk lulusan D-III dan S-1
- Farmasi : Apoteker dan Asisten Apoteker
- Gizi : Lulusan D-1, D-III Gizi (SPAG dan AKZI) dan D-IV
- Teknisi Medis : Analis, TEM dan Penata Rontgen, Penata Anestesi, Fisioterapi
- Sanitasi : Lulusan SPPH, APK dan D-III Kesehatan Lingkungan
- Kesmas : SKM, MPH dll

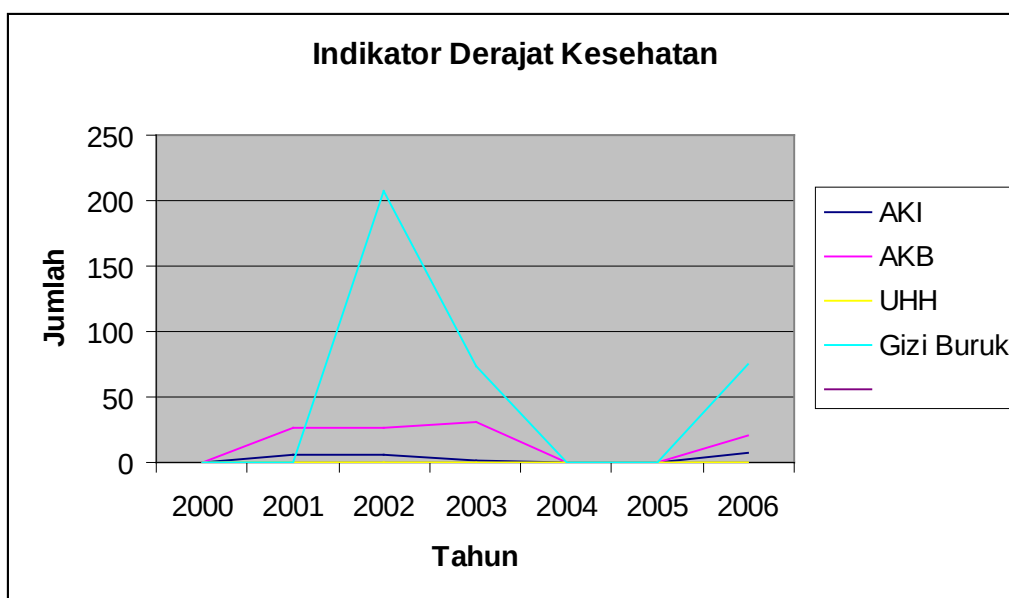
Derajat kesehatan merupakan pencerminan kesehatan perorangan, kelompok maupun masyarakat yang digambarkan dalam indikator : umur harapan hidup, mortalitas, morbiditas, dan status gizi masyarakat.

TABEL
DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT
KOTA BANDA ACEH

No	Indikator Derajat Kesehatan	Tahun						
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	AKI	-	6	6	2	-	-	8
2	AKB	-	27	26	31	-	-	21
3	UHH	-	-	-	-	-	-	65,5
4	Gizi Buruk	-	-	208	74	-	-	75

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

Grafik.



1. Umur Harapan Hidup

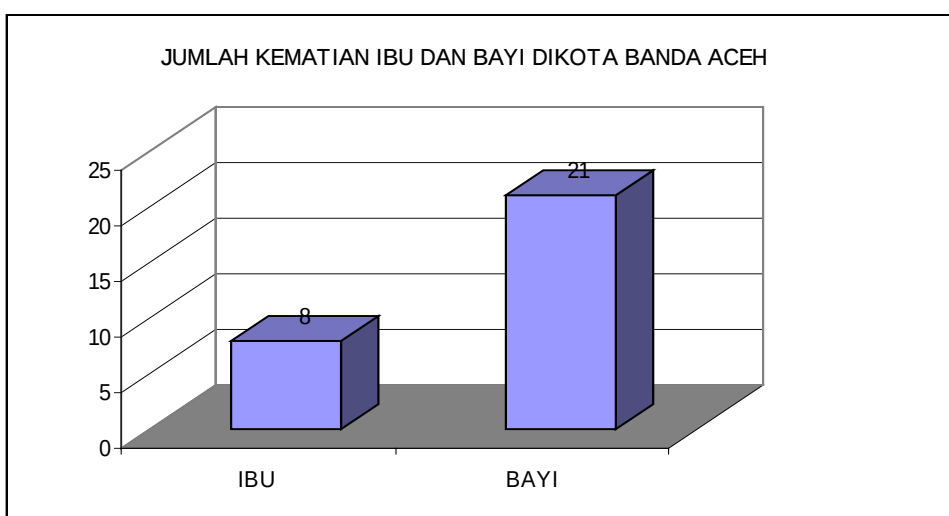
Angka harapan hidup adalah suatu angka yang mengisyaratkan kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama. Pada tahun 2005 umur harapan hidup penduduk Indonesia 66,2 tahun dan umur umur harapan hidup penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 67,7 tahun. sedangkan umur harapan hidup Kota Banda Aceh 65,5 tahun.

2. Angka Kematian Ibu dan Bayi (Mortalitas)

Kesehatan ibu dan bayi baru lahir di Indonesia masih jauh dari keadaan yang diharapkan karena tingginya jumlah ibu dan bayi yang meninggal. Indonesia memiliki Angka Kematian Ibu (AKI) yang tertinggi diantara Negara-negara ASEAN, yaitu 334 per 100.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) 35 per 1000 kelahiran hidup. Di provinsi NAD tahun 2005 Angka Kematian Ibu (AKI) 354 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 21 per 1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu di Kota Banda Aceh tahun 2006 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik

Jumlah Kematian Ibu dan Bayi di Kota Banda Aceh, Tahun 2006



Berdasarkan grafik diatas jumlah kelahiran hidup di Kota Banda Aceh 3865 jiwa dan jumlah kematian ibu sebanyak 8 jiwa, maka setelah dikonversikan Angka Kematian Ibu tahun 2006 di Kota Banda Aceh 207 per 100.000 kelahiran hidup. Upaya Nasional tahun 2010 angka kematian ibu ditargetkan 150 per 100.000 kelahiran hidup.

Kelahiran bayi di Kota Banda Aceh 3865 jiwa dan jumlah kematian bayi sebanyak 21 jiwa, maka Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2006, adalah

5,4 per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan Upaya Nasional tahun 2010 AKB targetkan 40 per 1000 kelahiran hidup. Bidang kesehatan Kota Banda Aceh telah mengalami banyak kemajuan dalam menurunkan angka kematian bayi, kemungkinan status gizi ibu hamil, pelayanan antenatal dan perinatal serta status imunisasi sudah membaik. (data berdasarkan sumber dari wilayah kerja Puskesmas, sedangkan dari bidan-bidan praktek swasta dan rumah sakit tidak memberikan laporan)

3. Angka kesakitan (Morbiditas)

Penyakit menular masih tinggi di Kota Banda Aceh terutama disebabkan oleh nyamuk yaitu Demam Berdarah Dengue (DBD), Malaria dan Diare. Tahun 2006 angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) sebanyak 242 kasus, dengan jumlah kematian 6 jiwa (CFR=2,47 %) sedangkan angka kesakitan Malaria 77 kasus, dengan jumlah kematian 3 jiwa (CFR=3,89%). Diare jumlah kematian 6313 kasus pada semua kelompok umur, tidak ada kematian pada tahun tersebut. Angka kesakitan Diare tertinggi pada kelompok umur Balita sebanyak 1322 kasus (20,94%).

TABEL
ANGKA KESAKITAN KOTA BANDA ACEH

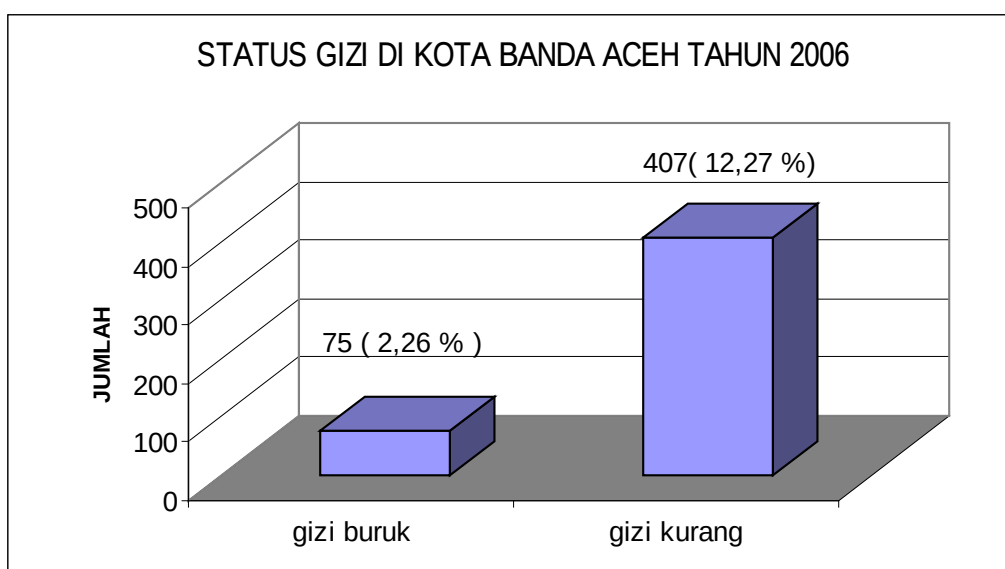
No	Penyakit	Tahun						
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	Malaria	57	179	226	40	-	68	77
2	DBD	-	17	22	78	-	117	242
3	Diare	-	7400	3933	4754	-	3373	6313
4	TB Paru	-	68	68	79	-	49	61

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

4. Status Gizi

Masalah gizi masyarakat merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian terutama gizi anak balita. Tahun 2006 jumlah anak balita sebanyak 3162 orang, balita yang mengalami gizi buruk sebanyak 75 kasus (2,37%) dan yang mengalami gizi kurang sebanyak 407 kasus (12,87 %), sebagaimana diperlihatkan pada grafik berikut :

Grafik
Status Gizi di Kota Banda Aceh, Tahun 2006



Permasalahan

1. Gempa dan gelombang tsunami yang terjadi di Kota Banda Aceh menyebabkan hancur dan rusaknya sebagian besar prasarana kesehatan beserta fasilitas pendukung medis dan paramedis;
2. Dari total 477 unit prasarana kesehatan yang ada, sebanyak 59 unit mengalami kehancuran dan 72 unit mengalami kerusakan dimana prasarana posyandu mengalami kerusakan dan kehancuran yang paling banyak, yaitu sebanyak 44 unit;
3. Jumlah tenaga medis dan paramedis sebelum tsunami sebanyak 506 orang dan setelah tsunami berkurang menjadi menjadi 452 orang;
4. Tidak meratanya penempatan tenaga medis dan paramedis dan kurangnya sumber daya tenaga kesehatan yang profesional;

5. Belum optimalnya penerapan SPM kesehatan yang ada di Kota Banda Aceh;
6. Mulai terjadi penyebaran virus HIV di Kota Banda Aceh dimana pada tahun 2005 ditemukan empat orang yang positif terinfeksi;
7. Masih belum teraksesnya pelayanan kesehatan oleh masyarakat miskin;
8. Lemah dan belum maksimal pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas pengobatan.

Capaian

1. Meningkatnya umur harapan hidup (lebih dari 67 tahun) akibat meningkatnya gizi dan kesehatan ibu dan anak;
2. Angka kematian ibu pada tahun 2005 sebesar 0 % per 100.000 kelahiran, angka kesakitan TB Paru sebanyak 73,47 %, angka kesakitan campak sebanyak 64 kasus, angka kesakitan ISPA sebanyak 42 %, angka kesakitan DBD sebanyak 117 kasus dan angka kesakitan diare 3.373 kasus;
3. Adanya bantuan dari lembaga donor baik dalam pembangunan prasarana kesehatan serta fasilitas pendukungnya maupun promosi kesehatan;
4. Prasarana rumah sakit yang ada di Kota Banda Aceh merupakan yang paling baik dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

B. Analisis

Proyeksi peluang

1. Adanya konsensus internasional yang menekankan pentingnya kesehatan masyarakat dimana berbagai program bersama dilaksanakan dan tentu saja Kota Banda Aceh mendapatkan bantuan program kesehatan dari lembaga kesehatan internasional terutama dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi;
2. Adanya agenda nasional untuk meningkatkan HDI (*human development index*) dimana kesehatan merupakan salah satu indikator yang diukur;

3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan berbagai peluang untuk pengembangan teknik pengobatan berbagai penyakit dan pengembangan bioteknologi untuk kepentingan kesehatan.

Proyeksi tantangan

1. Penyakit baru seperti AIDS dan flu burung merupakan ancaman yang sudah mulai masuk Kota Banda Aceh, sedangkan obat penangkal untuk kedua penyakit tersebut belum ditemukan dan masih dalam pengembangan;
2. Ancaman dampak tsunami dan intrusi air laut yang masih terjadi mengakibatkan kualitas air tanah banyak mengandung arsenik sehingga berbahaya untuk di konsumsi;
3. Masih tergantungnya *supply* peralatan dan obat-obatan dari luar Aceh yang menyebabkan biaya untuk pengobatan penyakit menjadi tinggi;
4. Tenaga medis dan paramedis dituntut untuk menyeimbangkan disiplin bidang kesehatan sesuai dengan meningkatnya wabah penyakit.

Proyeksi kelemahan

1. Kurangnya promosi kesehatan masyarakat akan pentingnya hidup sehat merupakan permasalahan internal yang akan tetap muncul;
2. Tenaga medis dan paramedis yang profesional masih mengalami kekurangan sehingga cakupan pelayanan kesehatan tidak maksimal;
3. Rasa tanggung jawab pelayanan kesehatan kepada masyarakat belum maksimal, sehingga masyarakat enggan menggunakan fasilitas kesehatan.

Proyeksi kekuatan

1. Membaiknya berbagai prasarana kesehatan akibat bantuan dari berbagai lembaga donor dan kerja sama kesehatan dengan instansi kesehatan di luar Kota Banda Aceh;

2. Meningkatnya alokasi anggaran dari APBD untuk mengatasi permasalahan kesehatan;
3. Terbangunnya prasarana kesehatan yang hancur maupun rusak baik oleh NGO maupun dari dana APBD;
4. Meningkatnya kemampunya tenaga medis dan paramedis akibat transfer pengetahuan dan ketrampilan semasa rehabilitasi dan rekonstruksi;
5. Adanya kesadaran kolektif untuk menjaga kesehatan lingkungan. Penerapan standar pelayanan minimal kesehatan yang semakin membaik.

C. Output

Prediksi kondisi kesehatan dalam jangka waktu 20 tahun kedepan, antara lain :

1. Meningkatnya HDI (*human development index*) dan umur harapan hidup;
2. Menurunnya angka kematian bayi;
3. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan;
4. Menurunnya prevalensi/kejadian gizi kurang pada anak balita;
5. Terjangkaunya obat dan perbekalan kesehatan bagi masyarakat;
6. Adanya pengawasan obat dan makanan;
7. Dilakukannya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
8. Meningkatnya gizi masyarakat;
9. Dikembangkannya lingkungan sehat;
10. Adanya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
11. Diterapkannya standarisasi pelayanan kesehatan;
12. Adanya pelayanan kesehatan penduduk miskin;
13. Adanya pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya;
14. Adanya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;

15. Terpeliharanya dengan baik sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;
16. Adanya kemitraan pelayanan kesehatan;
17. Meningkatnya pelayanan kesehatan anak balita dan lansia;
18. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan;
19. Serta meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak.
20. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat terjangkau ke seluruh pelosok desa.

2.1.4.2 Keluarga Berencana

A. Input

Permasalahan

1. Setelah tsunami jumlah pasangan usia subur mengalami penurunan yaitu dari 35.982 pasangan menjadi 18.711 pasangan. Target pencapaian akseptor KB aktif juga mengalami penurunan pada tahun 2005 dimana hanya 76,21 % yang ditargetkan. Jumlah pasangan usia subur paling banyak yaitu di atas 30 tahun sebanyak 11.708 pasangan dari total 17.711 pasangan;
2. Permasalahan lain yang muncul adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga dan kurangnya sosialisasi/penyuluhan yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Kota Banda Aceh.

Capaian

1. Capaian urusan keluarga berencana sejauh ini adalah semakin meningkatnya peserta KB. Hal ini dapat dilihat dari peserta KB aktif pada tahun 2005 sebanyak 9.727 orang dengan komposisi 3.954 orang melakukan KB suntik dan 3.912 orang melakukan KB pil;

2. Tercapainya jumlah akseptor KB aktif sebanyak 23.000 orang selama kurun waktu sembilan tahun sejak tahun 1996 – 2004;
3. Adanya bantuan dari lembaga donor untuk perbaikan prasarana klinik KB pada tahun 2005 sebanyak 43 klinik.

B. Analisis

Proyeksi peluang

1. Urusan keluarga berencana sangat berpeluang untuk dikembangkan dimana Pemerintah memiliki program keluarga berencana yang sudah lama diterapkan dan akan tetap diperlukan sebagai bentuk antisipasi pertambahan penduduk yang seperti deret ukur;
2. Adanya lembaga donor yang fokus pada kesehatan semakin membantu Pemerintah Kota Banda Aceh dalam promosi pentingnya perencanaan keluarga;
3. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin memberikan berbagai pilihan cara dalam melakukan KB.

Proyeksi tantangan

1. Kemajuan teknologi informasi disertai dengan berbagai sisi negatifnya merupakan tantangan nyata yang akan dihadapi karena nilai-nilai kebebasan yang dibawa dapat menjerumuskan masyarakat ke kehidupan bebas;
2. Penyebaran virus HIV yang semakin meningkat perlu diantisipasi agar kesehatan masyarakat tetap terlindungi.

Proyeksi kelemahan

Kelemahan yang dapat muncul antara lain :

1. Kurangnya promosi kesehatan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh;

2. Masih terdapatnya persepsi bahwa KB dilarang dalam agama menyebabkan pertumbuhan penduduk tidak dapat dikendalikan;
3. Kurangnya tenaga kesehatan yang profesional untuk menangani permasalahan keluarga berencana.

Proyeksi kekuatan

Proyeksi keberhasilan yang muncul adalah :

1. Adanya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya keluarga berencana dimana hal ini dimotori oleh semakin meningkatnya pendidikan masyarakat;
2. Semakin meningkatnya penundaan pernikahan dan kehamilan dikalangan masyarakat;
3. Masih kuatnya norma yang berlaku dimasyarakat akan pentingnya pernikahan yang sah.

C. Output

Prediksi kondisi keluarga berencana dalam jangka waktu 20 tahun kedepan, antara lain :

1. Meningkatnya jumlah keluarga berencana;
2. Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja;
3. Meningkatnya pelayanan kontrasepsi;
4. Meningkatnya pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri;
5. Tingkat populasi penduduk akan menurun dan lahirnya SDM yang berkualitas;
6. Meningkatnya promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat; meningkatnya pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR;

7. Meningkatnya penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS; dikembangkan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;
8. Tersedianya tenaga pendamping kelompok bina keluarga;
9. Dan berkembangnya model operasional BKB-Posyandu-PADU.

2.1.4.3 Pendidikan

A. Input

Penduduk Kota Banda Aceh usia 15 tahun ke atas yang melek huruf adalah sebesar 99,69%, angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 0,07% dari jumlah melek huruf tahun 2005. Bila dibandingkan dengan angka rata-rata Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu 93,98%, maka angka melek huruf penduduk Kota Banda Aceh lebih baik. Data rata-rata lama sekolah mengindikasikan seberapa lama seseorang menempuh pendidikan formal. Pada tahun 2005 rata-rata lama sekolah penduduk Kota Banda Aceh adalah 13,07 tahun. Dengan demikian rata-rata pendidikan penduduk Kota Banda Aceh adalah tamat SMA sederajat. Pada tahun 2006 angka naik menjadi 13,22 dan diproyeksikan pada tahun 2012 tingkat pendidikan rata-rata penduduk Kota Banda Aceh D-3 sederajat. Perkembangan sekolah dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

TABEL PERKEMBANGAN DATA SEKOLAH TAHUN 2001 - 2006

Jenjang Sekolah	Jumlah Sekolah					
	2001	2002	2003	2004	2005	2006
SD	120	123	119	119	119	97
MI	12	12	12	12	12	12
SMP	28	28	28	28	28	27
MTs	9	9	9	9	9	9
SMU	26	26	28	28	28	25
MA	7	7	7	7	7	7
SMK	7	7	7	7	7	7

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh

TABEL PERKEMBANGAN JUMLAH MURID TAHUN 2001 - 2006

Jenjang Sekolah	Jumlah Murid					
	2001	2002	2003	2004	2005	2006
SD	23.222	24.112	24.137	24.024	14.952	15.900
MI	6.742	8.206	8.206	7.505	6.097	6.406
SMP	12.529	12.522	12.876	13.282	9.313	9.102
MTs	3.429	3.429	3.476	3.460	2.769	2.860
SMU	10.715	12.996	13.149	13.224	10.236	9.744
MA	2.554	2.554	252	2.506	2.112	2.149
SMK	3.392	327	3.203	2.828	1.935	1.945

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh

TABEL PERKEMBANGAN JUMLAH GURU TAHUN 2001 - 2006

Jenjang Sekolah	Jumlah Guru					
	2001	2002	2003	2004	2005	2006
SD	1.112	1.232	1.170	1.384	977	994
MI	193	199	198	265	192	201
SMP	840	628	910	906	780	825
MTs	150	162	162	157	160	195
SMU	548	739	745	745	744	798
MA	139	165	159	159	158	158
SMK	220	227	239	239	183	225

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh

TABEL ANGKA KELULUSAN TAHUN 2001 - 2006

Jenjang Sekolah	Angka Kelulusan					
	2001	2002	2003	2004	2005	2006
SD	3.892	3.727	3.724	3.751	2.436	2.470
MI	863	851	854	929	819	800
SMP	3.932	3.936	3.877	4.029	2.660	2.814
MTs	1.122	1.088	1.085	1.142	932	776
SMU	3.492	3.640	3.795	4.088	3.246	3.067
MA	720	825	801	853	714	581
SMK	883	987	1.001	486	487	366

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh

TABEL PERKEMBANGAN APK TAHUN 2001 - 2006

Jenjang Sekolah	APK					
	2001	2002	2003	2004	2005	2006
SD/MI	116,45	112,92	109,21	125,17	101,44	103,37
SMP/MTs	100,09	94,87	99,28	122,63	81,93	95,34
SMU/MA/SKM	73,15	86,42	86,66	103,93	77,12	86,89

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh

TABEL PERKEMBANGAN APM TAHUN 2001 - 2006

Jenjang Sekolah	APM					
	2001	2002	2003	2004	2005	2006
SD/MI	92,34	99,47	91,25	104,03	85,73	85,23
SMP/MTs	73,21	69,15	68,93	87,9	79,73	83,5
SMU/MA/SMK	49,68	61,63	66,36	77,77	66,78	75,16

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh

Permasalahan

1. Hancurnya prasarana pendidikan akibat gempa dan gelombang tsunami yang melanda Kota Banda Aceh dimana 55 sekolah hancur dan 88 sekolah rusak serta banyak tenaga pengajar yang hilang dan meninggal;
2. Meningkatnya angka putus sekolah karena anak didik kehilangan orang tua atau keluarganya akibat bencana;
3. Trauma psikologis akibat tsunami juga menghambat proses belajar mengajar disekolah;

4. Belum terpenuhinya jumlah pengajar yang berkualitas yang mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan;
5. Kurangnya prasarana penunjang pada setiap jenjang pendidikan seperti perpustakaan dan laboratorium;
6. Kualitas sekolah yang tidak merata menyebabkan calon siswa memilih sekolah tertentu sehingga terkesan adanya ketidakpercayaan masyarakat akan sekolah yang lain;
7. Belum diterapkannya SPM pendidikan di Kota Banda Aceh;
8. Belum diperolehnya sistem/metode pendidikan yang komprehensif untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam hal IMTAK dan IPTEK.

Capaian

1. Capaian urusan pendidikan di Kota Banda Aceh dapat dilihat dari tingkat kelulusan pada tahun ajaran 2005 – 2006, yaitu tingkat kelulusan TK sebesar 84 %, SD 100 %, SMP 88 %, SMA 85,35 % dan perguruan tinggi sebesar 15,34 %;
2. Adanya alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 % pada tahun 2006;
3. Terbentuknya gugus sekolah, komite sekolah dan dewan sekolah;
4. Adanya transparansi dalam penggunaan anggaran pendidikan;
5. Adanya lembaga donor yang memberikan bantuan berupa pembangunan gedung sekolah, prasarana penunjang, pelatihan guru dan perbaikan manajemen pendidikan.

B. Analisis

Proyeksi peluang

1. Adanya peraturan perundangan yang menegaskan bahwa alokasi anggaran APBD minimal 20 % untuk pendidikan dan adanya SPM pendidikan merupakan peluang untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di Kota Banda Aceh;
2. Adanya prioritas dari negara sponsor dalam memberikan beasiswa kepada calon siswa dari Aceh meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
3. Banyaknya lembaga donor yang fokus pada bidang pendidikan dengan melakukan kegiatan peningkatan kualitas prasarana, dan tenaga pendidik yang ada;
4. Globalisasi yang terjadi membawa dampak pada tuntutan kualitas pendidikan yang semakin tinggi sehingga staf pengajar dan proses belajar pengajar yang berkualitas merupakan suatu keharusan;
5. Daya tarik pendidikan di luar Kota Banda Aceh yang lebih baik dapat dijadikan pemicu untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada;
6. Program sertifikasi guru dalam rangka kompetensi dan kesejahteraan guru akan mendorong tercapainya proses belajar mengajar yang berkualitas.

Proyeksi tantangan

1. Globalisasi yang diikuti dengan perkembangan teknologi informasi selain membawa dampak positif juga memberikan dampak negatif;
2. Informasi yang mengalir secara bebas dapat mempengaruhi remaja pada perilaku yang tidak sehat seperti penggunaan narkoba, minum-minuman keras, pergaulan bebas dan pornografi sehingga proses mendidik siswa menjadi terganggu;
3. Letak Kota Banda Aceh yang rawan akan terjadinya bencana gempa dan tsunami menuntut penyediaan prasarana pendidikan yang memiliki standar sehingga mampu mengantisipasi dampak bencana tersebut;

4. Semua guru diharuskan untuk ikut seleksi ujian sertifikasi kelayakan mengajar.

Proyeksi kelemahan

1. Belum cukupnya prasarana dan sarana pendidikan berkualitas;
2. Tenaga pengajar yang masih terbatas kapasitasnya;
3. Kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan guru mengakibatkan timbulnya kecemburuan sosial yang berakibat pada rendahnya motivasi para guru untuk melaksanakan tugasnya secara maksimal;
4. Kurikulum pendidikan yang belum mencerminkan kebutuhan nyata tidak mampu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan pasar;
5. Penerapan sistem mengajar pada tingkat SD, seorang guru mengajar semua pelajaran akan akan melemahkan mutu pendidikan dan menurunkan tingkat kelulusan.

Proyeksi kekuatan

1. Proyeksi keberhasilan urusan pendidikan adalah adanya alokasi anggaran untuk pendidikan dari Pemerintah Kota Banda Aceh yang semakin meningkat;
2. Adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Adanya upaya dari Dinas Pendidikan untuk menerapkan standar pelayanan minimal;
3. Disusunnya berbagai dokumen perencanaan dalam rangka pengembangan pendidikan;
4. Semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam rangka penyusunan perencanaan pendidikan dan pengawasannya.

C. Output

Prediksi kondisi pendidikan dalam jangka waktu 20 tahun kedepan, antara lain :

1. Adanya alokasi anggaran pendidikan yang semakin meningkat;
2. Menurunnya angka putus sekolah; menurunnya angka buta aksara;
3. Meningkatnya pendidikan anak usia dini;
4. Meningkatnya wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
5. Meningkatnya pendidikan menengah;
6. Meningkatnya pendidikan non formal;
7. Meningkatnya pendidikan luar biasa;
8. Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
9. Berkembangnya budaya baca dan pembinaan perpustakaan;
10. Diterapkannya SPM pendidikan;
11. Meningkatnya manajemen pelayanan pendidikan;
12. Adanya peningkatan kesejahteraan guru yang sebanding dengan pengabdianya.

2.1.4.4 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

A. Input

Permasalahan

1. Banyaknya desa yang terkena tsunami menyebabkan hancurnya kehidupan masyarakat perdesaan yang ada;
2. Belum dialokasikannya dana desa menyebabkan ketergantungan yang besar terhadap Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengurus rumah tangga desa;
3. Belum siapnya aparatur desa untuk mengelola sumber daya yang tersedia;
4. Belum dilaksanakannya musrenbang di tingkat desa.

Capaian

1. Terselenggaranya perencanaan desa (*village planning*) terutama di tempat yang terkena tsunami semakin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
2. Meningkatnya jumlah desa swakarsa dari desa swasembada menunjukkan kemajuan dimana desa swakarsa pada tahun 1996 berjumlah 20 desa menjadi 53 desa pada tahun 2005.

B. Analisis

Proyeksi peluang

1. Peluang untuk menjadikan desa sebagai wilayah otonom sangat besar. Hal ini sangat jelas dengan adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang desa;
2. Banyaknya NGO dan lembaga donor pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi yang bergerak di level desa merupakan peluang untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam hal transfer pengetahuan dan keahlian;
3. Adanya regulasi yang mengatur tentang partisipasi masyarakat desa dalam proses penyusunan rencana merupakan peluang agar masyarakat desa dapat mempengaruhi kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh;
4. Trasparansi pemerintah Kota Banda Aceh, perencanaan pembangunan dimulai tingkat gampong (*Buttom Up*) sebagai wadah untuk meberdayakan perangkat gampong.

Proyeksi tantangan

1. Tantangan terbesar terhadap perkembangan desa adalah arus globalisasi dan informasi disertai dengan masuknya nilai-nilai budaya baru dapat menghilangkan *social capital* yang sudah lama terbentuk di masyarakat;

2. Belum adanya qanun yang mengatur tentang kewenangan desa dan penerapan alokasi dana desa sehingga semakin mengancam otonomi desa yang seharusnya dimiliki;
3. Perencanaan pembangunan dimulai dari bawah/gampong, harus didukung kemampuan SDM gampong.

Proyeksi kelemahan

1. Belum siapnya aparatur desa dalam menjalankan otonomi desa;
2. Terbatasnya infrastruktur yang harus disiapkan seperti Badan Permusyawaratan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
3. Kemampuan untuk membuat perencanaan desa sangat lemah, akibat kurangnya sumber daya aparatur desa, khususnya pada kawasan terkena tsunami.

Proyeksi kekuatan

1. Keberadaan lembaga adat di lingkup desa dapat dijadikan sebagai perekat *social capital* dalam pembangunan desa;
2. Nilai-nilai partisipatif yang sudah terbangun melalui berbagai keterlibatan masyarakat dalam penyusunan *village planning*;
3. Terbentuknya perangkat desa yang dapat menopang kerja sama baik dalam hal perencanaan maupun untuk memperkuat perangkat gampong.

C. Output

Prediksi kondisi pemberdayaan masyarakat dan desa untuk jangka waktu 20 tahun kedepan, antara lain :

1. Semakin meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan;
2. Berkembangnya lembaga ekonomi pedesaan;

3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
4. Meningkatnya kapasitas aparat pemerintah desa;
5. Meningkatnya peran perempuan di pedesaan;
6. Akan tercipta sumber daya manusia desa yang dapat mengakses perencanaan desa berkesinambungan.

2.1.4.5 Keluarga Sejahtera dan Sosial

A. Input

Permasalahan

1. Angka kemiskinan pada tahun 2005 cukup tinggi yaitu sebesar 71.041 orang atau 40 % dari total penduduk;
2. Meningkatnya kriminalitas khususnya perampokan, penodongan, dan penjarahan akibat dari konflik bersenjata di wilayah Provinsi NAD;
3. Banyaknya pengemis, yatim piatu, anak terlantar dan kelompok rentan lainnya akibat konflik bersenjata dan tsunami yang belum mendapat perhatian Pemerintah Kota Banda Aceh secara serius.

Capaian

1. Penanganan terhadap penduduk yang mengalami permasalahan sosial telah menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat dari jumlah orang telantar serta penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapat bantuan;
2. Upaya pemberdayaan, pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan termasuk bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

B. Analisis

Proyeksi peluang

Peluang yang ada kedepan yaitu :

1. Adanya lembaga donor yang memberikan bantuan untuk rehabilitasi atau rekonstruksi tempat-tempat sosial seperti panti asuhan;
2. Adanya kesepakatan damai menyebabkan konflik dapat dihindarkan sehingga tidak menimbulkan korban lagi.

Proyeksi tantangan

1. Tantangan yang muncul adalah adanya konflik horisontal dan vertikal yang dapat menimbulkan korban bagi masyarakat yang tidak berdosa sehingga dapat menambah persoalan sosial lainnya;
2. Arus globalisasi dan informasi yang menyebabkan aliran barang, modal dan orang menyebabkan tingkat kompetisi hidup yang semakin meningkat;
3. Jika hal ini tidak diantisipasi maka sebagian masyarakat akan tersisih dan dapat menimbulkan persoalan sosial.

Proyeksi kelemahan

1. Secara internal, permasalahan yang muncul adalah adanya sikap malas dari sebagian masyarakat akibat ketergantungan bantuan dari lembaga donor;
2. Kurangnya tingkat kompetisi dan ketrampilan hidup masyarakat untuk bersaing dalam kehidupan yang semakin kompleks.

Proyeksi kekuatan

1. Faktor keberhasilan kedepan yaitu adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya ketrampilan hidup dan pendidikan yang memadai untuk bersaing di kehidupan kota;

2. Meningkatnya ketrampilan, pengetahuan dan etos kerja masyarakat sebagai akibat transfer pengetahuan dan ketrampilan selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi Kota Banda Aceh;
3. Semakin banyaknya program pemerintah untuk mengatasi persoalan sosial kemasyarakatan.

C. Output

Prediksi kondisi keluarga sejahtera dan sosial dalam jangka waktu 20 tahun kedepan, antara lain :

1. Meningkatnya pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya;
2. Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
3. Meningkatnya pembinaan para penyandang cacat dan trauma, pembinaan panti asuhan/panti jompo, pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya);
4. Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;
5. Dan diterapkannya standar pelayanan minimal kesejahteraan sosial.

2.1.4.6 Pemberdayaan Perempuan

A. Input

Permasalahan

1. Peran perempuan dalam pembangunan di Kota Banda Aceh masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat masih sedikitnya perempuan yang menduduki jabatan strategis di berbagai instansi. Komposisi anggota DPRD Kota Banda Aceh yang hanya 4 perempuan dari total 30 orang.

Capaian

Sejauh ini capaian urusan pemberdayaan perempuan, antara lain:

1. Terpilihnya wakil walikota Banda Aceh yang berasal dari perempuan;
2. Rasio siswa SD antara laki-laki dan perempuan yaitu 1,17;
3. Rasio pencari kerja yang terdaftar antara laki-laki dan perempuan adalah 0,95;
4. Dilakukannya berbagai pelatihan mengenai gender oleh berbagai lembaga donor;
5. Sudah dibahasnya isu-isu gender dalam berbagai dokumen perencanaan.

B. Analisis

Proyeksi peluang

1. Pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi banyaknya lembaga donor yang mengangkat isu gender sehingga hal itu dapat meningkatkan pemahaman masyarakat;
2. Berbagai konsep pembangunan yang dikembangkan seperti *pro poor development* dan pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan peluang bagi masyarakat untuk dapat mempengaruhi kebijakan publik yang ada melalui mekanisme yang dijamin dalam berbagai peraturan perundangan;
3. Berbagai peraturan perundangan tersebut merupakan landasan hukum yang dapat dijadikan jaminan dalam rangka pemberdayaan perempuan, seperti undang-undang tentang HAM perempuan, anti diskriminasi terhadap perempuan dan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Proyeksi tantangan

Tantangan kedepan yang harus dibenahi yaitu :

1. Masih belum ada jaminan perlindungan perempuan ketika bekerja di luar negeri;

2. Jaringan *trafficking* harus dihentikan.

Proyeksi kelemahan

1. Permasalahan internal yang muncul adalah adanya tekanan dari dalam rumah tangga sendiri dalam bentuk hirarki kekuasaan tradisional yang bersifat patriarki;
2. Kekerasan dalam rumah tangga yang tidak terekspos menyebabkan sulitnya dalam memberikan perlindungan kepada kaum perempuan dan anak.

Proyeksi kekuatan

Proyeksi keberhasilan tentang pemberdayaan perempuan antara lain :

1. Semakin meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender.

C. Output

Prediksi kondisi pemberdayaan perempuan dalam jangka waktu 20 tahun kedepan, antara lain :

1. Meningkatnya angka GDI (*gender development index*) dan GEM (*gender empowerment index*);
2. Meningkatnya kualitas anak dan perempuan;
3. Adanya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
4. Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
5. Menurunnya jumlah kekerasan terhadap anak dan perempuan;
6. Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan;
7. Meningkatnya akses perempuan terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.

Kebudayaan

A. Input

Permasalahan

1. Bergesernya nilai budaya lokal akibat masuknya pengaruh budaya luar baik akibat kemajuan komunikasi dan informasi global maupun akibat transformasi budaya yang bersumber dari pekerja kemanusiaan terutama dari negara asing;
2. Apresiasi kaum remaja Kota Banda Aceh yang sangat minim terhadap nilai-nilai sejarah dan budaya yang ada;
3. Ikatan sosial antar warga masyarakat semakin merenggang;
4. Pengaruh budaya luar semakin kuat terhadap budaya asli daerah dan inisiatif pembaharuan dan pemberdayaan budaya lokal semakin memudar.

Capaian

1. Terlaksananya beberapa kegiatan kebudayaan Aceh dimana ini dapat meningkatkan tali persaudaraan antar sesama masyarakat;
2. Tumbuh dan berkembangnya organisasi-organisasi kesenian dan terjaganya kebudayaan Aceh di bawah pembinaan oleh instansi terkait;
3. Adanya pengiriman delegasi kesenian dan kebudayaan melalui kegiatan-kegiatan nasional maupun internasional untuk menyebarluaskan kesenian dan kebudayaan Aceh;
4. Program pelestarian peninggalan bersejarah perlu dipertahankan, hal ini penting sehingga situs-situs yang ada tetap terjaga.

B. Analisis

Proyeksi peluang

1. Peluang yang dimiliki Kota Banda Aceh adalah banyaknya pendatang selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi dimana kesenian dan kebudayaan Aceh semakin dapat dikenal;
2. Posisi strategis Kota Banda Aceh di ujung wilayah Barat Indonesia dan sebagai pusat Pemerintahan Aceh menyebabkan penyebaran budaya Aceh semakin mudah dilakukan;
3. Munculnya gaya sentripetal akibat globalisasi dimana akan terjadi penguatan ikatan sosial masyarakat untuk mencegah pengaruh negatif yang muncul;
4. Adanya penerapan Syariat Islam yang menjadi pelindung untuk melestarikan budaya Aceh yang bernuansa Islami.

Proyeksi tantangan

Dalam waktu 20 tahun ke depan tantangan yang terjadi yaitu :

1. Adanya perubahan perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan budaya dan ajaran agama Islam sebagai akibat globalisasi dan perkembangan teknologi informasi;
2. Pengaruh buruk media baik cetak maupun elektronik yang memperlihatkan berita/acara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat sebagai akibat terlalu bebasnya media yang ada saat ini.

Proyeksi kelemahan

1. Permasalahan yang dapat muncul adalah rendahnya dukungan masyarakat dalam hal menjaga dan membentengi diri dengan ajaran Islam dalam mempertahankan budaya lokal;
2. Terjadinya degradasi dan dekadensi moral dikalangan masyarakat Kota Banda Aceh;

3. Belum diterapkannya Syariat Islam secara penuh dan menyeluruh.

Proyeksi kekuatan

Proyeksi keberhasilan kebudayaan untuk 20 tahun kedepan adalah :

1. Terjaganya masyarakat madinah atau madani yang dapat menunjang tinggi nilai-nilai budaya, moral, etika, dan toleransi berdasar ajaran Islam;
2. Terjaganya stabilitas politik dan keamanan dalam kehidupan masyarakat Kota Banda Aceh disertai dengan terjaganya budaya Aceh yang Islami.

C. Output

Prediksi kondisi kebudayaan untuk jangka waktu 20 tahun kedepan, antara lain :

1. Berkembangnya nilai budaya Islami dalam kehidupan masyarakat Kota Banda Aceh;
2. Adanya pengelolaan kekayaan budaya oleh pemerintah daerah secara berkelanjutan;
3. Adanya pengelolaan keragaman budaya baik oleh pemerintah maupun dalam kehidupan masyarakat;
4. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk dapat mempertahankan dan pelestarian kebudayaan yang ada.

2.1.4.8 Pariwisata

A. Input

Permasalahan

1. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB mengalami penurunan selama kurun waktu 2003 – 2005 yaitu 0,53 % pada tahun 2003 menjadi 0,34 % pada tahun 2005;

2. Rusaknya berbagai obyek wisata yang ada akibat tsunami;
3. Stabilitas politik dan keamanan akibat konflik menyebabkan pariwisata di Kota Banda Aceh tidak berkembang;
4. Infrastruktur perkotaan yang belum menunjang kegiatan pariwisata;
5. Belum terkelolanya obyek wisata secara profesional baik oleh pemerintah maupun swasta;
6. Belum terlibatnya masyarakat dalam pengembangan pariwisata secara profesional;
7. Belum terlaksananya penataan kawasan pariwisata yang bernuansa Islami.

Capaian

Capaian urusan pariwisata adalah :

1. Bertambahnya obyek wisata yang ada akibat tsunami seperti adanya kapal apung yang terdampar dan adanya wisata ziarah kuburan masal;
2. Tersusunnya rencana pengembangan pariwisata Kota Banda Aceh;
3. Adanya perbaikan obyek wisata baik yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh maupun yang dilakukan oleh lembaga donor;
4. Adanya pembangunan perhotelan oleh para investor baik lokal maupun asing.

B. Analisis

Proyeksi peluang

1. Banyaknya pendatang selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi semakin memudahkan untuk promosi wisata;
2. Posisi letaknya yang strategis dan adanya rencana pembukaan pelabuhan bebas Sabang semakin membuka akses Kota Banda Aceh dari luar wilayah;

3. Bentang alam Kota Banda Aceh yang dikelilingi bukit dan laut serta kecenderungan pola yang membentuk *waterfront city* merupakan peluang yang dapat dikembangkan untuk menambah obyek wisata;
4. Kemajuan teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk promosi wisata secara cepat.

Proyeksi tantangan

1. Adanya persepsi dari masyarakat luar bahwa Syariat Islam yang diterapkan di Kota Banda Aceh merupakan faktor penghambat pariwisata, karena adanya pemahaman bahwa pariwisata dapat maju jika toleransi masyarakat setempat terhadap pendatang cukup tinggi;
2. Stabilitas keamanan dan politik yang tidak kondusif juga dapat menyebabkan terhambatnya industri pariwisata.

Proyeksi kelemahan

1. Secara internal, permasalahan yang muncul adalah masih kurangnya sumber daya manusia untuk mengembangkan dan mengelola obyek wisata yang ada;
2. Sikap ramah dan terbuka masyarakat (*to be a good host*) perlu ditingkatkan agar wisatawan merasa berada di lingkungannya sendiri (*home sweet home*);
3. Kurangnya minat investor/swasta untuk bergerak dibidang pariwisata.

Proyeksi kekuatan

1. Adanya keinginan masyarakat Kota Banda Aceh untuk mendapatkan hiburan/tempat wisata seiring dengan kehidupan masyarakat yang semakin *urban*;
2. Adanya upaya untuk menjadikan Kota Banda Aceh sebagai pusat wisata;
3. Lahan/lokasi pengembangan wisata Banda Aceh cukup mendukung khususnya wisata pantai/air, serta benda budaya peninggalan bersejarah.

C. Output

Prediksi kondisi pariwisata dalam jangka waktu 20 tahun kedepan, antara lain :

1. Dikembangkannya pemasaran pariwisata;
2. Bertambahnya jumlah destinasi pariwisata;
3. Bertambahnya jumlah wisatawan yang datang baik dari dalam maupun luar negeri;
4. Dikembangkannya kemitraan pariwisata;
5. Daya tarik wisata ke Aceh semakin meningkat melalui pengembangan wisata tsunami;
6. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.

2.1.4.9 Pemuda dan Olah Raga

A. Input

Permasalahan

Permasalahan yang ada adalah :

1. Belum optimalnya kepemudaan dan olah raga karena selama masa konflik, ruang gerak pemuda untuk berkreasi masih terbatas;
2. Banyaknya pemuda berkualitas yang lebih memilih untuk mencari peluang di luar Aceh;
3. Terbatasnya lahan untuk pengembangan sarana olah raga;
4. Lemah dan kurangnya keseriusan pemerintah kota dalam mengelola dan pembinaan bidang olah raga.

Capaian

Capaian sejauh ini adalah :

1. Adanya berbagai organisasi kepemudaan yang muncul pasca tsunami;

2. Banyaknya lembaga donor yang membantu dalam memberikan pelatihan bagi pemuda dan rehabilitasi serta rekonstruksi prasarana olah raga yang rusak akibat tsunami;
3. Terdapatnya sekolah olah raga merupakan aset daerah untuk menghasilkan bibit unggul bidang olah raga.

B. Analisis

Proyeksi peluang

1. Peluang pengembangan olah raga di Kota Banda Aceh sangat besar terlebih adanya Undang-Undang Pemerintah Aceh yang menegaskan bahwa Provinsi NAD dapat mengirimkan utusan olah raga di ajang internasional;
2. Bantuan lembaga donor/NGO untuk membangun sarana olah raga merupakan awal kebangkitan kerja sama Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh dalam meningkatkan mutu olah ragawan.

Proyeksi tantangan

1. Tantangan nyata yang dapat muncul adalah pengaruh globalisasi yang membawa pengaruh negatif menyebabkan degradasi moral generasi muda sehingga pembangunan pemuda dan olah raga menjadi terhambat;
2. Daya tarik kehidupan/peluang yang ada di kota-kota besar menyebabkan banyaknya pemuda yang berkualitas meninggalkan Kota Banda Aceh.

Proyeksi kelemahan

Proyeksi permasalahan yang muncul adalah :

1. Belum adanya kesadaran dari kalangan pemuda untuk berkontribusi dalam pembangunan;
2. Belum optimalnya pembinaan bibit-bibit olahragawan dikarenakan prasarana belum memadai dan tenaga pelatih yang belum profesional.

Proyeksi kekuatan

1. Meningkatnya kualitas pemuda ditunjukkan dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi;
2. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan akibat transfer ilmu pengetahuan dari pekerja luar yang terjadi selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi.

C. Output

Prediksi kondisi pemuda dan olah raga dalam jangka waktu 20 tahun kedepan, antara lain:

1. Adanya pengembangan dan keserasian kebijakan kepemudaan;
2. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan;
3. Adanya upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda;
4. Adanya upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba;
5. Dikembangkannya kebijakan dan manajemen olahraga;
6. Adanya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga;
7. Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga;
8. Meningkatnya prestasi olah raga di event-event nasional maupun internasional.

Ketertiban dan Ketentraman

A. Input

Permasalahan

1. Kebebasan berpolitik di masa lalu sangat rawan/rentan dengan paksaan dan tantangan seperti pelaksanaan pemilu yang selalu diwarnai dengan pemaksaan untuk memilih salah satu partai tertentu;

2. Konflik yang berkepanjangan dalam masyarakat Aceh sehingga kebebasan berbicara dan berpendapat atau mengkritik menjadi sulit;
3. Penegakan hukum yang belum adil dan transparan menyebabkan menurunnya kredibilitas aparat maupun institusi penegak hukum dimata masyarakat;
4. Pemberlakuan sanksi terhadap pelaku yang terlibat korupsi tidak dilaksanakan secara murni, efektif dan adil, termasuk penyelesaian berbagai kasus korupsi yang menyita perhatian masyarakat;
5. Meningkatnya kriminalitas khususnya perampokan, penodongan, pembunuhan, dan penjarahan yang diakibatkan konflik bersenjata yang terjadi disebagian wilayah Aceh yang berimbas di wilayah Kota Banda Aceh.

Capaian

1. Pasca penandatanganan perdamaian antara RI dan GAM di Helsinki-Swedia, stabilitas politik dan keamanan mulai meningkat. Hal ini berdampak pada penurunan gangguan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat;
2. Munculnya kebebasan berpolitik dan memberi pendapat di depan umum oleh setiap warga masyarakat;
3. Pemilihan kepala daerah secara langsung yang berjalan aman dan damai.

B. Analisis

Proyeksi peluang

1. Kesepakatan perdamaian antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka dengan disahkannya Undang-Undang Pemerintah Aceh membuka peluang bagi masyarakat Kota Banda Aceh untuk bebas berpolitik dan memberikan pendapat di muka umum;

2. Adanya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebabkan masyarakat dapat menggunakan haknya untuk memberikan aspirasi dalam pilkada.

Proyeksi tantangan

1. Stabilitas politik dan keamanan yang sudah membaik di Kota Banda Aceh ini dapat terancam jika elit politik yang ada di pusat tidak serta merta menerima aspirasi masyarakat Aceh untuk membangun daerahnya;
2. Pemberitaan media baik lokal, nasional maupun internasional yang tidak proporsional juga dapat memicu konflik di tengah masyarakat;
3. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk melakukan tertib hukum tanpa diskriminasi terhadap seluruh lapisan masyarakat.

Proyeksi kelemahan

1. Konflik vertikal dan horisontal yang terjadi di internal pemerintahan akan menghambat proses perdamaian yang sudah berlangsung sejauh ini;
2. Profesionalisme aparat penegak hukum yang tidak membaik akan semakin memberikan citra yang buruk di masyarakat mengingat masih sering terjadinya penegakan hukum yang tidak adil.

Proyeksi kekuatan

Faktor keberhasilan dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman yang akan tetap terjaga adalah:

1. Keinginan masyarakat untuk mengakhiri konflik;
2. Adanya keinginan yang kuat di masyarakat untuk membangun kembali Kota Banda Aceh setelah gempa dan tsunami;
3. Adanya norma dan reusam yang menjadi ciri khas masyarakat Aceh dalam memberlakukan adat dan istiadat;

4. Adanya keinginan untuk menegakkan supremasi hukum dan HAM yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Output

Prediksi kondisi keamanan dan ketertiban dalam jangka waktu 20 tahun kedepan, antara lain :

1. Terbentuknya petugas keamanan, pembangunan pos jaga dan pengendalian keamanan lingkungan dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
2. Terpeliharanya kamratibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan meningkatkan kapasitas dan kerja sama polisi pamong praja dengan aparat keamanan;
3. Berkembangnya dan terbangunnya kemitraan wawasan kebangsaan, rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat dan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
4. Pemberdayaan masyarakat yang semakin meningkat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;
5. Berkurangnya penyakit masyarakat seperti peredaran/penggunaan minuman keras, narkoba, praktek prostitusi, peredaran uang palsu, aksi premanisme, perjudian, penyelundupan dan eksploitasi anak di bawah umur;
6. Meningkatnya pendidikan politik masyarakat melalui penyuluhan kepada masyarakat, fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik, koordinasi forum-forum diskusi politik dan penyusunan *data base* partai politik.

Prasarana dan Sarana

2.1.5.1 Penataan Ruang

A. Input

Permasalahan

1. Meningkatnya tingkat urbanisasi di Kota Banda Aceh berpengaruh pada meningkatnya kebutuhan akan ruang kota;
2. Terdapatnya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan akibat lemahnya pengendalian dan kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat;
3. Proses pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) belum berjalan secara efektif;
4. Tumbuhnya daerah kumuh akibat kurangnya pengawasan dan penertiban khususnya di daerah pasar dan bantaran sungai;
5. Terjadi pergeseran fungsi lahan pada RTRW tahun 2002 – 2010 akibat terjadinya gempa dan gelombang tsunami;
6. Belum optimalnya penerapan sanksi kepada masyarakat yang melanggar tata ruang.

Capaian

1. Capaian penataan ruang sejauh ini adalah sebagian masyarakat telah menyadari akan pentingnya nasihat perencanaan (*advise planning*) sebelum membangun bangunan baru;
2. Terbentuknya daerah satelit baru yang telah teratur sehingga dapat menambah pemanfaatan ruang kota;
3. Adanya bantuan peralatan dan pelatihan khususnya pelatihan untuk pemetaan dan perencanaan tata ruang;
4. Semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan tata ruang terutama dalam *village planning*;

5. Telah dan sedang dilakukan revisi tata ruang kota serta tata ruang kecamatan atas bantuan BRR dan lembaga donor/NGO;
6. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menata kawasan permukiman melalui pengembangan berwawasan lingkungan.

B. Analisis

Proyeksi peluang

1. Adanya perencanaan gampong (*Village Planning*) maka revisi tata ruang akan sesuai dengan harapan masyarakat Kota Banda Aceh;
2. Adanya lembaga donor yang membantu untuk melakukan survei dan revisi tata rang Kota Banda Aceh pasca tsunami;
3. Masuknya sistem informasi teknologi terbaru sehingga para aparatur berkesempatan mendapatkan pelatihan dan pengembangan ilmu tata ruang;
4. Bentang alam Kota Banda Aceh yang banyak sungai-sungai dan dekat dengan laut menjadikan *land mark* kota sebagai *waterfront city* sangat kuat.

Proyeksi tantangan

1. Tantangan dalam penataan ruang adalah masuknya intervensi asing dalam arah perencanaan tata ruang Kota Banda Aceh;
2. Adanya indikasi *double standart* terhadap pemberian izin IMB
3. Belum tegasnya aturan hukum terhadap penyimpangan tata ruang;
4. Pembangunan yang dilakukan selama ini kurang mengacu kepada tata ruang.

Proyeksi kelemahan

1. Permasalahan yang dapat muncul adalah perubahan fungsi ruang pada kawasan-kawasan yang telah direncanakan dalam rencana tata ruang wilayah kota;
2. Munculnya perumahan baru pada lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai kawasan permukiman;
3. Meningkatnya urbanisasi yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan ruang. Masih terbatasnya aparaturnya yang menguasai tata ruang, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan dan pengendalian tata ruang;
4. Terbatasnya dana untuk sosialisasi produk rencana tata ruang;
5. Belum maksimalnya jalinan kerjasama dalam mengawasi pemanfaatan ruang, sering terjadi pengalihan fungsi pada kawasan-kawasan tertentu.

Proyeksi kekuatan

1. Proyeksi keberhasilan penataan ruang adalah jelasnya arah pembangunan Kota Banda Aceh dengan rencana tata ruang;
2. Terbentuknya qanun tentang revisi tata ruang pasca tsunami. Adanya himbauan dan peringatan dari pemerintah tentang aturan dan ketentuan dalam melaksanakan pembangunan;
3. Tumbuhnya kesadaran dan pengertian masyarakat tentang pentingnya pengurusan IMB;
4. Adanya keseriusan masyarakat dan ikut serta dalam perencanaan gampong serta ikut aktif dalam pembahasan rencana detail tata ruang kecamatan;
5. Tumbuhnya keseriusan pemerintah kota dalam menata kembali pembangunan yang mengacu pada tata ruang.

C. Output

Prediksi kondisi penataan ruang dalam jangka waktu 20 tahun kedepan, antara lain :

1. Tersusunnya rencana tata ruang mulai dari RTRW sampai dengan RDTR; dimanfaatkannya rencana tata ruang sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar sub-wilayah;
2. Terkendalinya pemanfaatan ruang;
3. Berkurangnya konflik pemanfaatan ruang antar *stakeholder* setempat, antar instansi pemerintah, maupun antar kewenangan tingkatan pemerintahan;
4. Bertambahnya luas kawasan lindung terhadap luas total wilayah;
5. Bertambahnya luas tiap pemanfaatan lahan terhadap luas kawasan budidaya;
6. Terciptanya keteraturan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan.

2.1.5.2 Pekerjaan Umum

A. Input

Permasalahan

1. Gempa dan gelombang tsunami telah menghancurkan sarana dan prasarana Kota Banda Aceh. Jalan, jembatan, tanggul penahan ombak, jaringan drainase, pintu air dan mesin pompa pengendali banjir, serta infrastruktur pedesaan banyak yang hancur dan rusak berat.
 - Adapun panjang jalan sebelum tsunami adalah 380.007 km berkurang menjadi 340.970 km setelah tsunami;
 - Jaringan drainase sebelum tsunami sepanjang 1.128 km. Setelah tsunami sepanjang 420 km hancur dan 400 km rusak;
 - Tanggul yang mengalami kehancuran sepanjang 7.500 m dan 5.700 m rusak;

- Jembatan sebanyak 2 unit hancur dan 12 unit rusak;
 - Jaringan air bersih dan jaringan telepon juga mengalami kerusakan;
2. Air tanah yang ada tercemar akibat intrusi air laut yang mencapai radius 5 km;
 3. Sistem pendataan berbagai sarana belum menggunakan teknologi informasi.

Capaian

1. Pada tahun 2005 panjang jalan yang beraspal 340.970 km dan 97.091 km yang tidak dirinci;
2. Terbangunnya kembali berbagai infrastruktur yang rusak baik yang didanai lembaga donor, APBN, APBD Provinsi ataupun APBD Kota Banda Aceh;
3. Dibangunnya jalan lingkar dan jalan penyelamatan (*escape road*) semakin memudahkan akses ke seluruh wilayah Kota Banda Aceh;
4. Revisi Tata Ruang Kota Banda Aceh yang disesuaikan dengan kondisi Banda Aceh saat ini dan ke depan dapat dijadikan acuan untuk pembangunan berbagai infrastruktur yang rusak.

B. Analisis

Proyeksi peluang

1. Selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi, Kota Banda Aceh mempunyai peluang untuk mengikuti prosedur dan standar yang berlaku dalam membangun berbagai infrastruktur yang rusak;
2. Adanya berbagai bantuan dari lembaga donor untuk pembangunan infrastruktur yang rusak semakin mempercepat perbaikan kota seperti semula;
3. Adanya berbagai regulasi seperti *zoning* dan *building code* semakin memudahkan Kota Banda Aceh dalam mengatur infrastruktur yang ada;

4. Adanya program Pemerintah Kota Banda Aceh untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang rusak.

Proyeksi tantangan

Proyeksi tantangan dalam pembangunan urusan pekerjaan umum adalah :

1. Masih sering terjadinya gempa bumi sehingga pembangunan yang dilakukan harus mengikuti standar yang berlaku;
2. Intrusi air laut yang masih terjadi menyebabkan kualitas air tanah semakin berkurang;
3. Tingkat abrasi yang tinggi menyebabkan pengikisan pantai berjalan semakin cepat mengakibatkan banjir pasang air laut;
4. Adanya intervensi dari berbagai pihak luar untuk menerapkan konsep pembangunan infrastruktur yang tidak disesuaikan dengan kondisi setempat;
5. Rencana privatisasi pengelolaan air tanah dan pengelolaan limbah.

Proyeksi kelemahan

1. Lemahnya koordinasi antar SKPD yang terkait dalam penanganan berbagai masalah infrastruktur perkotaan;
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga berbagai infrastruktur secara baik;
3. Tidak disosialisasikannya berbagai regulasi yang mengatur tentang pembangunan menyebabkan tidak terkontrolnya pembangunan kota itu sendiri;
4. Kurangnya ketegasan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal penanganan pelanggaran pembangunan menyebabkan pembangunan infrastruktur menjadi terganggu.

Proyeksi kekuatan

Proyeksi keberhasilan yang tetap terjaga untuk 20 tahun kedepan adalah :

1. Meningkatnya kapasitas aparatur dalam menangani persoalan infrastruktur perkotaan;
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan yang berwawasan lingkungan;
3. Membaiknya kondisi infrastruktur sebagai akibat pembangunan yang dilakukan memenuhi standar yang berlaku;
4. Kesadaran masyarakat semakin kuat untuk melepaskan hak atas tanahnya untuk kepentingan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

C. Output

Prediksi kondisi pekerjaan umum dalam jangka waktu 20 tahun kedepan, antara lain :

1. Meningkatnya pembangunan jalan dan jembatan;
2. Terbangunnya saluran drainase/gorong-gorong;
3. Dilakukannya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;
4. Adanya inspeksi kondisi jalan dan jembatan;
5. Terbangunnya sistem informasi/*data base* jalan dan jembatan;
6. Meningkatnya sarana dan prasarana kebinamargaan;
7. Dikembangkannya jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
8. Adanya penyediaan dan pengolahan air baku;
9. Adanya pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai dan sumber daya air lainnya;
10. Meningkatnya kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;
11. Terkendalinya banjir;

12. Dikembangkannya wilayah strategis dan cepat tumbuh;
13. Terbangunnya infrastruktur perdesaaan.

2.1.5.3 Perhubungan

A. Input

Permasalahan

Sejauh ini keadaan transportasi di Kota Banda Aceh belum dapat melayani seluruh wilayah yang ada.

1. Kota Banda aceh hanya memiliki satu terminal antar kota dan satu terminal angkutan kota;
2. Banyaknya sarana dan prasarana yang belum direhabilitasi dan direkonstruksi akibat gempa dan tsunami;
3. Timbulnya kemacetan lalu-lintas di ruas-ruas jalan tertentu terutama pada saat jam sibuk;
4. Banyak marka jalan, rambu lalu lintas, *traffic light*, median jalan, dan trotoar yang belum diperbaiki sehingga menambah kesemrawutan kota;
5. Pelanggaran lalu lintas juga masih tinggi dimana pada tahun 2005 jumlah kasus pelanggaran sebanyak 11.940 kasus;
6. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas pada tahun 2005 memakan korban 50 orang dan 23 orang diantaranya meninggal dunia;
7. Pelabuhan fery dan kapal cepat belum direhabilitasi sepenuhnya pasca tsunami.

Capaian

Capaian sektor pengangkutan yaitu:

1. Pada tahun 2005 sektor perhubungan merupakan penyumbang PDRB (berdasar harga konstan tahun 2000) terbesar kedua setelah sektor perdagangan yaitu sebesar 15,85 % dari total PDRB;
2. Fasilitas transportasi di Kota Banda Aceh merupakan yang paling memadai di seluruh Provinsi NAD.

B. Analisis

Proyeksi peluang

1. Perhubungan di Kota Banda Aceh sangat strategis, karena merupakan simpul bertemunya berbagai moda transportasi;
2. Adanya rencana pembangunan jalan lingkar dan peningkatan ruas jalan yang menghubungkan Meulaboh dengan Banda Aceh akan semakin meningkatkan arus pergerakan barang dan orang terlebih peran strategis yang diemban sebagai Ibukota Provinsi NAD;
3. Adanya berbagai lembaga donor yang membantu dalam rehabilitasi dan rekonstruksi sarana perhubungan akan semakin meningkatkan arus pergerakan yang ada.

Proyeksi tantangan

1. Terputusnya pergerakan yang menuju atau meninggalkan kota sebagai akibat banjir atau bencana lainnya;
2. Belum adanya regulasi mengenai pembatasan usia kendaraan menyebabkan rentannya kecelakaan akibat kondisi kendaraan dan akan meningkatkan polusi.

Proyeksi kelemahan

1. Tidak seimbang laju pertumbuhan kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan yang ada;
2. Perparkiran di ruas jalan menyebabkan kemacetan lalu lintas;
3. Tidak disiplinnya pengendara kendaraan bermotor dan tidak lengkapnya kelengkapan kendaraan;
4. Mudah para pengguna kendaraan untuk mendapatkan SIM menyebabkan banyak pengendara tidak mengetahui peraturan berlalu-lintas.

Proyeksi kekuatan

1. Bertambahnya ruas jalan yang menghubungkan seluruh wilayah Kota Banda Aceh;
2. Bertambahnya jumlah armada angkutan darat.

C. Output

Prediksi kondisi perhubungan untuk jangka waktu 20 tahun kedepan, antara lain :

1. Meningkatnya kontribusi sektor perhubungan terhadap PDRB;
2. Meningkatnya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
2. Dilaksanakannya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ;
3. Meningkatnya pelayanan angkutan yang menjangkau seluruh wilayah;
4. Meningkatnya pengamanan lalu lintas;
5. Menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas;
6. Meningkatnya kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.

2.1.5.4 Perumahan Rakyat

A. Input

Permasalahan

1. Jumlah rumah di Kota Banda Aceh sebelum tsunami sebanyak 54.801 unit, setelah tsunami 17.100 unit mengalami kehancuran dan 3.887 unit mengalami kerusakan;
2. Belum terselesaikannya pembangunan perumahan korban tsunami;
3. Pembangunan perumahan korban tsunami tidak tertata dengan baik dan teratur sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan dikemudian hari khususnya dalam hal pembangunan, pelebaran dan pelurusan badan jalan, juga terhadap fasilitas pendukung lainnya seperti pembangunan saluran/drainase;
4. Rendahnya kualitas rumah bantuan menyebabkan masyarakat enggan kembali.

Capaian

1. Capaian urusan perumahan rakyat adalah tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda atau barak (huntara);
2. Sebagian besar warga korban tsunami sudah mendapatkan bantuan rumah serta sertifikat tanah yang mereka tempati;
3. Berpartisipasinya masyarakat dalam pembangunan perumahan akibat tsunami;
4. Berkurangnya rumah kumuh di areal bekas tsunami;
5. Meningkatnya pembangunan perumahan di wilayah yang aman terkena bencana.

B. Analisis

Proyeksi peluang

Peluang yang dapat diambil oleh Kota Banda Aceh dalam rangka pembangunan perumahan rakyat adalah:

1. Adanya standar bangunan yang dapat dijadikan acuan untuk pembangunan berikutnya;
2. Adanya berbagai lembaga donor yang membantu pembangunan rumah korban tsunami dengan prinsip partisipatif;
3. Adanya prioritas pembangunan dari pemerintah bagi golongan kecil dan menengah;
4. Masuknya investor perumahan dalam rangka penyediaan rumah mewah.

Proyeksi tantangan

Tantangan yang muncul adalah :

1. Tingkat urbanisasi yang meningkat menyebabkan kebutuhan perumahan semakin meningkat sedangkan ketersediaan lahan semakin terbatas;
2. Kelangkaan material bangunan dan ketidakstabilan harga menyebabkan pembangunan perumahan menjadi tinggi.

Proyeksi kelemahan

1. Permasalahan internal yang dapat muncul adalah korban tsunami yang tidak memiliki pendapatan tetap memungkinkan pemeliharaan lingkungan tidak terjaga;
2. Tata ruang yang tidak ditaati dapat menyebabkan permasalahan lingkungan;
3. Kurangnya koordinasi antara pendonor dengan pemerintah kota terhadap kemungkinan masalah yang timbul dikemudian hari.

Proyeksi kekuatan

Proyeksi keberhasilan yang dapat terjaga untuk 20 tahun kedepan adalah :

1. Keinginan masyarakat akan lingkungan perumahan yang bersih dan sehat;
2. Adanya rasa kepemilikan rumah dan perumahan merupakan kebutuhan dasar akan mendorong tumbuhnya sektor perumahan;
3. Tumbuh kesadaran masyarakat untuk tetap tinggal pada lokasi dimana rumah mereka dibangun.

C. Output

Prediksi kondisi perumahan rakyat dalam jangka waktu 20 tahun kedepan, antara lain :

1. Meningkatnya kontribusi sektor perumahan terhadap PDRB;
2. Berkembangnya pembangunan perumahan;
3. Berkurangnya lingkungan perumahan kumuh;
4. Meningkatnya lingkungan sehat perumahan;
5. Meningkatnya pemberdayaan komunitas perumahan;
6. Meningkatnya perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial;
7. Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran;
8. Meningkatnya pengelolaan areal pemakaman;
9. Semua masyarakat Kota Banda Aceh memiliki rumah tempat tinggal permanen.

Pemerintahan

2.1.6.1 Pemerintahan Umum

A. Input

Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pemerintahan adalah:

1. Koordinasi intern dan antar instansi serta belum berubahnya pola pikir dan kultur birokrasi sebagai pelayan masyarakat;
2. Pengelolaan keuangan daerah yang belum profesional dimana kuantitas dan kualitas aparatur masih terbatas;
3. Kapasitas lembaga DPR Kota yang kurang peka terhadap aspirasi masyarakat dan masih sedikitnya qanun-qanun yang dihasilkan;
4. Belum adanya mekanisme pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di Kota Banda Aceh;
5. Masih kurangnya kerja sama antar daerah untuk meningkatkan pembangunan. Serta masih belum ada kejelasan pembagian kewenangan kecamatan, kemukiman dan gampong/kelurahan;
6. Rendahnya paradigma pelayanan dalam pengelolaan urusan pemerintahan.

Capaian

1. Dalam perkembangannya yang dinamis, Kota Banda Aceh telah mengalami pemekaran wilayah dimana jumlah kecamatan yang ada bertambah 3 yaitu Kecamatan Banda Raya, Kecamatan Jaya Baru dan Kecamatan Leung Bata;
2. Telah dilakukannya studi tentang penataan organisasi dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
3. Pemerintah telah menerapkan sistem komputerisasi yang dapat mempermudah urusan administrasi yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat banyak;

4. Terbentuknya kantor pelayanan terpadu satu pintu untuk meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat.

B. Analisis

Proyeksi peluang

1. Arus globalisasi dan modernisasi teknologi informasi di segala sektor pelayanan pemerintah sebagai akibat meningkat dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan peluang yang harus ditangkap oleh aparaturnya untuk meningkatkan kinerjanya;
2. Adanya peraturan yang mengharuskan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk membentuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan peluang untuk mengelola keuangan dan aset kota secara efektif dan efisien;
3. Adanya Undang-Undang Pemerintah Aceh untuk menjadikan desentralisasi lebih memiliki dampak nyata ke masyarakat.

Proyeksi tantangan

1. Perubahan peraturan perundangan atau terbitnya peraturan baru merupakan hal yang harus diantisipasi untuk menjaga jalannya roda pemerintahan;
2. Berkurangnya NGO dan lembaga donor yang ada di Kota Banda Aceh juga merupakan tantangan tersendiri karena transfer pengetahuan akan semakin berkurang;
3. Adanya tuntutan untuk meningkatkan pelayanan publik secara prima dan *good governance*.

Proyeksi kelemahan

Secara internal yang akan menjadi permasalahan dalam pemerintahan umum yaitu :

1. Kapasitas Pemerintah Kota Banda Aceh yang belum optimal dalam menjalankan wewenang dan fungsinya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Kurangnya profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan dalam merespon peluang yang ada juga merupakan permasalahan kedepan yang dapat terjadi.

Proyeksi kekuatan

Adapun yang menjadi proyeksi keberhasilan pemerintahan umum adalah:

1. Tercapainya aparatur pemerintahan yang profesional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, bebas KKN, berwibawa, bertanggung jawab, dan mempunyai kompetensi tinggi;
2. Adanya akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintah Kota Banda Aceh sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah meningkat;
3. Adanya kepemimpinan pemerintah yang demokratis dan birokrasi yang profesional kepada masyarakat secara cepat, efektif, dan efisien.

C. Output

Prediksi kondisi pemerintahan umum untuk jangka waktu 20 tahun kedepan, antara lain :

1. Semakin meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dalam menjalankan tugasnya;
2. Adanya Standard Pelayanan Minimal (SPM);
3. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dengan disusunnya analisis standar belanja, standar satuan harga, kebijakan akuntansi pemerintah daerah, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, sistem informasi keuangan daerah, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, peningkatan manajemen aset/barang daerah dan manajemen investasi

daerah serta intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;

4. Terbentuknya sistem penanganan pengaduan masyarakat (*customer complaint*) untuk melayani pengaduan masyarakat;
5. Semakin meningkatnya kerja sama antar pemerintah daerah dalam rangka penyediaan pelayanan publik, perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi, kerjasama antar daerah di bidang hukum dan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik;
6. Meningkatnya koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan, legislasi rancangan peraturan perundang-undangan beserta sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dalam rangka penataan peraturan perundang-undangan;
7. Perlunya penataan daerah otonomi baru melalui fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah, percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah pemekaran, percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah dan pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru.

2.1.6.2 Kepegawaian

A. Input

Permasalahan

Beberapa permasalahan yang muncul dalam urusan kepegawaian antara lain :

1. Terbatasnya aparatur pemerintah dengan kualifikasi pendidikan yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan;
2. Kesejahteraan pegawai yang belum menunjukkan perubahan yang signifikan; seringnya terjadi mutasi aparatur menyebabkan tidak optimalnya kinerja yang bersangkutan;

3. Belum berubahnya pola pikir birokrat dengan menempatkan masyarakat sebagai salah satu konsumen yang harus dilayani;
4. Tingkat kedisiplinan pegawai yang rendah, serta belum diterapkannya *reward* dan *punishment* di lingkungan pemerintah.

Capaian

Capaian urusan kepegawaian sejauh ini masih terbatas, antara lain :

1. Adanya program dan kebijakan penjenjangan pendidikan diklat kepemimpinan melalui pengalokasian dana setiap tahun;
2. Standar dan kompetensi rekrutmen aparatur yang semakin meningkat;
3. Dan meningkatnya kualitas aparatur Pemerintah Kota Banda Aceh akibat banyaknya kerjasama antara instansi dengan NGO dan lembaga donor melalui berbagai bentuk pelatihan, lokakarya dan lain-lain.

B. Analisis

Proyeksi peluang

1. Peluang yang dapat ditangkap oleh aparatur adalah banyaknya NGO dan lembaga donor yang memberikan bantuan teknis;
2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat dimana akses yang semakin mudah.

Proyeksi tantangan

1. Tantangan yang dapat terjadi yaitu adanya arus globalisasi yang diikuti perkembangan teknologi dan informasi yang tidak diikuti kesiapan aparatur akan menyebabkan ketertinggalan dalam memberikan pelayanan publik;
2. Volume pekerja yang terus bertambah;
3. Dana yang belum mencukupi;

4. Tuntutan masyarakat terus meningkat tentang profesionalisme pegawai dalam melaksanakan tugas.

Proyeksi kelemahan

Adapun permasalahan yang dapat muncul dalam urusan kepegawaian adalah :

1. Belum optimalnya profesionalisme, kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia aparatur Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menyediakan pelayanan umum yang prima kepada masyarakat;
2. Penempatan aparatur yang tidak dilandasi pada kemampuan, profesionalisme, dan potensi yang dimiliki serta dedikasi tinggi membuat manajemen perencanaan dan pembangunan Kota Banda Aceh tidak maksimal;
3. Kurang seriusnya pemerintah dalam hal penjenjangan atau pemberdayaan sumber daya aparatur melalui penyediaan dana pendidikan dan pelatihan;
4. Kurang berfungsinya Baperjakat dalam menentukan penempatan seseorang dalam jabatan di sebuah instansi akibat masih dipengaruhi oleh unsur KKN dan politis;
5. Disiplin pegawai yang masih rendah.

Proyeksi kekuatan

1. Faktor yang dapat dipertahankan dalam urusan kepegawaian ini adalah meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah melalui berbagai bentuk pelatihan dan semakin berkurangnya tingkat mutasi yang dilakukan oleh pejabat berwenang dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
2. Adanya kebijakan dan Pemda dalam meningkatkan kesejahteraan dan merangsang kinerja pegawai dengan pemberian bantuan tunjangan khusus walaupun belum secara maksimal;
3. Jumlah pegawai yang belum memadai.

C. Output

Prediksi kondisi kepegawaian untuk jangka waktu 20 tahun kedepan, antara lain:

1. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur melalui pendidikan/pelatihan prajabatan, struktural, tugas teknis dan fungsi serta fungsional pegawai negeri sipil;
2. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur melalui rencana pembinaan karir pegawai, rekrutmen dan penempatan pegawai, sistem administrasi kenaikan pangkat secara otomatis, pemberian *reward* dan *punishment*, bantuan tugas belajar dan ikatan dinas, pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah serta monitoring, evaluasi dan pelaporan;
3. Aparatur pemerintahan akan lebih profesional;
4. Kompetensi aparatur yang cukup baik.

2.1.6.3 Perencanaan Pembangunan

A. Input

Permasalahan

Perencanaan pembangunan di Kota Banda Aceh masih mengalami berbagai permasalahan baik dari segi proses, substansi, pelaksanaan dan pengawasannya. Hal ini disebabkan:

1. Masih kurangnya aparatur perencana daerah baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
2. Belum optimalnya konsultasi publik dalam pengambilan kebijakan pemerintah dalam pembangunan yang berimbas langsung kepada masyarakat;
3. Musrenbang dan forum SKPD sebagai salah satu mekanisme keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum padu dan maksimal;

4. Belum adanya qanun tentang perencanaan partisipatif yang mengatur tentang mekanisme dan prosedur pengaduan masyarakat;
5. Belum optimalnya fungsi Bappeda sebagai koordinator dalam perencanaan pembangunan;
6. Lemahnya kemampuan perencanaan pada unit-unit kerja guna menentukan prioritas anggaran sampai dengan ke tingkat gampong;
7. Rendahnya pemahaman masyarakat akan arti pembangunan sesungguhnya, sehingga pembangunan yang dipahami hanya pada pembangunan secara fisiknya saja.

Capaian

Namun demikian, perencanaan pembangunan yang dilakukan selama ini juga memberikan hasil yang positif antara lain:

1. Semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai kebijakan pembangunan;
2. Meningkatnya kemampuan aparatur dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan;
3. Berubahnya pola pikir aparatur Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menerapkan perencanaan partisipatif;
4. Terlaksanakannya musrenbang yang dimulai di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat kota;
5. Transparansi pembangunan dengan penyebaran informasi pembangunan dalam penggunaan anggaran kepada masyarakat.

B. Analisis

Proyeksi peluang

1. Pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi seperti sekarang ini ada beberapa hal yang dapat dipelajari dan diterapkan terkait dengan perencanaan pembangunan;
2. Banyaknya NGO yang memberikan bantuan teknis baik berupa *training* maupun *on the job training* dibidang perencanaan memungkinkan kapasitas perencana daerah yang ada semakin meningkat;
3. NGO juga membantu/memfasilitasi dalam penerapan perencanaan partisipatif. Dan yang paling penting adalah adanya jaminan pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh.

Proyeksi tantangan

Tetapi yang perlu diantisipasi adalah:

1. Meningkatnya intervensi pihak luar/asing dalam setiap pengambilan kebijakan pemerintah dan banyaknya NGO yang langsung masuk ke masyarakat;
2. Seringnya terjadi perubahan peraturan perundangan yang ada dan keluarnya peraturan baru menyebabkan sistem yang sudah terbentuk dituntut untuk menyesuaikan;
3. Koordinasi yang kurang baik antara perencanaan bantuan oleh NGO dengan perencanaan pembangunan yang sedang dibuat Pemerintah Kota Banda Aceh sehingga terdapat beberapa perencanaan yang tumpang tindih dan mubazir.

Proyeksi kelemahan

Faktor internal yang menghambat dalam perencanaan pembangunan antara lain:

1. Belum adanya persepsi yang sama dalam hal penerapan perencanaan partisipatif antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan *stakeholder* lain;
2. Rendahnya kompetensi aparatur dalam melaksanakan perencanaan partisipatif;
3. Alokasi anggaran yang terbatas dalam perencanaan menyebabkan perencanaan partisipatif tidak dapat berjalan optimal;
4. Belum diimplementasikannya dokumen perencanaan pembangunan sebagai hasil kesepakatan seluruh *stakeholder* oleh SKPD yang bersangkutan;
5. Kurangnya *data base* yang valid untuk kebutuhan perencanaan;
6. Rendahnya kapasitas untuk kerja perencanaan.

Proyeksi kekuatan

Dengan berbagai kondisi yang mungkin terjadi, perencanaan pembangunan ke depan akan berhasil jika:

1. Partisipasi masyarakat dalam tahapan penting perencanaan baik melalui konsultasi publik atau forum formal lainnya meningkat;
2. Dilaksanakannya musrenbang dari tingkat gampong dan kelurahan serta forum SKPD;
3. Dan dialokasikannya anggaran untuk mendorong penerapan perencanaan partisipatif;
4. Memiliki data yang sangat akurat untuk kebutuhan perencanaan.

C. Output

Prediksi kondisi perencanaan pembangunan 20 tahun kedepan, antara lain:

1. Tersedianya data/informasi dan profil daerah yang akurat serta interaktif dalam penyajiannya untuk kebutuhan perencanaan bidang pemerintahan;

2. Adanya tuntutan untuk menjalin kerja sama pembangunan dalam rangka penyelesaian masalah-masalah daerah;
3. Perlunya pengembangan wilayah perbatasan untuk sinkronisasi rencana pengembangan dengan daerah sekitarnya;
4. Tuntutan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk menghindari terjadinya *disparitas* wilayah;
5. perencanaan pengembangan perkotaan semakin kompleks dimana permasalahan seperti perparkiran, transportasi, persampahan, pusat pertumbuhan ekonomi, perumahan dan lainnya memerlukan pemecahan yang terintegrasi;
6. Kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah dituntut agar lebih kompeten dengan menguasai berbagai teknik perencanaan dan regulasi yang terbaru;
7. Perencanaan pembangunan daerah harus dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam rangka penyusunan berbagai dokumen yang harus dimiliki daerah seperti RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD;
8. Serta meningkatnya kebutuhan perencanaan sektoral seperti perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, prasarana wilayah dan sumber daya alam serta daerah rawan bencana.

2.1.6.4 Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informasi

A. Input

Permasalahan

Permasalahan statistik, kearsipan, komunikasi dan informasi adalah:

1. Masih terbatasnya alokasi anggaran yang menyebabkan pembuatan *data base* Kota Banda Aceh belum berjalan maksimal;
2. Masih terbatasnya sosialisasi/publikasi dokumen publik ke masyarakat;

3. Belum terjaganya dokumen publik dalam penyimpanannya;
4. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi untuk tujuan administrasi dan pendataan;
5. Masih kurangnya penguatan media lokal sebagai aktor penyeimbang dalam demokrasi;
6. Rendahnya kompetensi aparatur bagian hubungan masyarakat (humas) di Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menjalankan perannya sebagai *public relation*.

Capaian

Capaian dalam urusan ini adalah:

1. Adanya transparansi penggunaan dana APBK melalui media cetak yang dibagi ke semua desa/gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh;
2. Disusunnya statistik Kota Banda Aceh setiap tahunnya;
3. Munculnya media baru baik yang didirikan oleh pendiri lokal maupun oleh NGO;
4. Meningkatnya pemberitaan media lokal terhadap isu-isu pemerintahan;
5. Adanya pengumuman di tempat-tempat strategis bahwa data pembangunan adalah penting.

B. Analisis

Proyeksi peluang

Peluang yang dapat diambil untuk pengembangan statistik, kearsipan, komunikasi dan informasi adalah:

1. Semakin gencarnya penerapan komputerisasi dan *e-government*;
2. Adanya undang-undang yang mengatur tentang pers;

3. Adanya tuntutan penerapan *good governance* terutama terkait dengan transparansi;
4. Adanya berbagai NGO dan lembaga donor yang memberikan bantuan dalam *updating* data dan cara pengolahannya dengan menggunakan teknologi baru;
5. Serta adanya rencana untuk menjadikan Kota Banda Aceh sebagai *Cyber City*.

Proyeksi tantangan

Tantangan yang dapat muncul adalah:

1. Arus informasi yang makin cepat dan meluas;
2. Komputerisasi global bidang teknologi informasi.

Proyeksi kelemahan

Permasalahan yang dapat muncul antara lain:

1. Rendahnya kompetensi sumber daya komunikasi dan informasi;
2. Kurangnya pemahaman aparatur akan pentingnya informasi;
3. Di samping itu, dokumen/arsip daerah tidak terjaga dan tersosialisai ke masyarakat dengan baik;
4. Sumber daya manusia yang belum profesional.

Proyeksi kekuatan

Faktor keberhasilan urusan statistik, kearsipan, komunikasi dan informasi adalah:

1. Adanya keinginan yang kuat dari masyarakat agar penyelenggaraan pemerintah dilakukan secara transparan dan cepat;
2. Adanya kebutuhan data yang valid dan mudah di akses oleh masyarakat;

3. Di samping itu, kuatnya peranan media dalam penegakan demokrasi.

C. Output

Prediksi kondisi statistik, kersipan, komunikasi dan informasi untuk 20 tahun kedepan, antara lain:

1. Meningkatnya kebutuhan data/informasi/statistik daerah yang valid;
2. Adanya kebutuhan pembenahan sistem administrasi kersipan agar lebih efektif dan efisien;
3. Kebutuhan pemeliharaan rutin dan penyelamatan dokumen/arsip daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat;
4. Meningkatnya pengembangan komunikasi, informasi dan media masa beserta sumber daya manusianya;
5. Meningkatnya kerja sama informasi dan media masa dalam rangka penyebaran informasi pembangunan daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan informasi yang bersifat pelayanan kepada masyarakat;
6. Meningkatkan pemanfaatan *e-government* dan *cyber services*.

Syariat Islam

A. Input

Permasalahan

Pelaksanaan Syariat Islam selama ini belum maksimal karena beberapa hal, antara lain:

1. Belum lengkapnya qanun-qanun tentang pelaksanaan Syariat Islam, sehingga banyak ketentuan yang belum dapat dijalankan;
2. Kurangnya pemahaman tentang pelaksanaan syariat secara kaffah, Syariat Islam dipahami hanya menyangkut ibadah ritual semata;

3. Rendahnya dana penyelenggara operasional untuk kegiatan pengawasan pelaksanaan Syariat Islam menyebabkan aparaturnya tidak bisa bekerja secara optimal padahal mayoritas penduduk menganut Agama Islam;
4. Pelaksanaan sanksi atau hukuman bagi pelanggar syariat baru sebatas cambuk sehingga timbul persepsi bahwa hanya masyarakat saja yang dihukum, sedangkan para pejabat dan aparaturnya belum tersentuh hukum Islam;
5. Rendahnya SDM aparaturnya Dinas Syariat Islam menyebabkan dalam pengawasan pelaksanaan Syariat Islam tidak terorganisir dengan baik.

Capaian

Capaian pelaksanaan Syariat Islam sejauh ini, antara lain:

1. Tempat ibadah baik berupa masjid, meunasah dan mushala dimana jumlah total tahun 2005 sebanyak 225 unit;
2. Telah dilaksanakannya pengawasan dan sosialisasi pelaksanaan Syariat Islam walaupun belum secara menyeluruh;
3. Meningkatnya jama'ah shalat di mesjid dan mushala pada waktu-waktu shalat;
4. Adanya dukungan nyata dari para pimpinan daerah, DPRD, lembaga masyarakat untuk menegakkan pelaksanaan Syariat Islam dengan penyediaan fasilitas shalat di lingkungan kantor pemerintah kota dan institusi pendidikan;
5. Meningkatnya pendidikan keagamaan sejak dini yang ditandai dengan berdirinya TPA dan TPQ di setiap mushala;
6. Adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk mengembangkan Syariat Islam;
7. Tersedianya dana dalam APBD guna menunjang kegiatan pelaksanaan Syariat Islam.

B. Analisis

Proyeksi peluang

1. Tercantumnya pelaksanaan Syariat Islam secara Kaffah dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh sebagai urusan **wajib** mengharuskan pemerintah Kota Banda Aceh bertanggung jawab untuk melaksanakannya secara utuh dan terkoordinasi;
2. Adanya dukungan provinsi lain untuk mencontoh Provinsi NAD dalam melaksanakan Syariat Islam secara Kaffah;
3. Adanya dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, pejabat pemerintahan dan penegak hukum, serta *stakeholder* untuk terus mengembangkan pelaksanaan Syariat Islam.

Proyeksi tantangan

Penerapan Syariat Islam tidak serta merta akan mudah karena ada beberapa faktor penghambat, antara lain:

1. Adanya pengaruh yang besar terhadap budaya dan Agama Islam akibat masuknya norma asing yang non islami dalam kehidupan masyarakat Kota Banda Aceh sehari-hari;
2. Adanya misi-misi tertentu oleh oknum-oknum tertentu untuk melemahkan pelaksanaan Syariat Islam dalam masyarakat Kota Banda Aceh;
3. Banyaknya acara televisi yang tidak mendidik sehingga anak-anak dan remaja banyak yang terpengaruh dan menirunya;
4. Adanya resistensi dari kelompok-kelompok kecil tentang pelaksanaan sanksi Syariat Islam.

Proyeksi kelemahan

Secara internal, pelaksanaan penerapan Syariat Islam akan menemui beberapa kendala antara lain disebabkan:

1. Belum optimalnya pengawasan pelaksanaan Syariat Islam oleh para petugas dan rendahnya biaya operasional yang dialokasikan;
2. Sikap apatis dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan pelaksanaan Syariat Islam yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh;
3. Rendahnya pola pembinaan, pengajaran ajaran agama Islam bagi anak-anak dan remaja.

Proyeksi kekuatan

Adapun yang menjadi faktor keberhasilan pelaksanaan Syariat Islam adalah:

1. Adanya keinginan masyarakat yang didukung oleh para pimpinan dan tokoh masyarakat Kota Banda Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam secara Kaffah dan menyentuh semua sendi kehidupan dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT;
2. Masih terdapatnya para imum dan tengku/ulama yang mempunyai ilmu tentang agama Islam yang dapat memberikan pengarahan dan pelajaran tentang Syariat Islam;
3. Adanya lembaga-lembaga pendidikan agama yang mendidik anak-anak sejak dari tingkat TK sampai tingkat Tsanawiyah dan berfungsinya Masjid dan Mushala sebagai tempat pengajaran agama Islam;
4. Adanya resistensi/penolakan masyarakat untuk menerima agama lain dalam kehidupan sehari-hari.

C. Output

Prediksi kondisi Syariat Islam untuk 20 tahun kedepan adalah:

1. Bahwa Kota Banda Aceh akan menjadi kota syariah yang aman, teratur dan bersih dengan masyarakatnya yang sejahtera serta berbudaya dengan dilandasi ketaqwaan kepada Allah SWT;

2. Berfungsinya Baitul Mal secara profesional dan perekonomian syariah di Kota Banda Aceh;
3. Terbentuknya Qanun Syariat Islam diikuti dengan publikasi dan sosialisasi secara terus menerus serta terkoordinir sampai ke tingkat bawah (gampong) disertai dengan penerapan sanksi dan hukuman yang tidak diskriminatif.

2.2 PREDIKSI KONDISI UMUM KOTA BANDA ACEH

Berdasarkan sintesa hasil analisis, prediksi kondisi umum Kota Banda Aceh dalam kurun waktu 20 tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, secara umum Kota Banda Aceh akan mengalami perubahan fisik wilayah dan lingkungan hidup. Penurunan kualitas lingkungan hidup karena faktor manusia jika tidak diantisipasi akan terus meningkat. Pencemaran air, udara dan tanah di Kota Banda Aceh akan bertambah seiring dengan kemajuan pembangunan dan perubahan pola hidup masyarakat. Selain pencemaran, Kota Banda Aceh menghadapi tantangan krisis energi dan krisis air bersih di masa yang akan datang.
2. Proyeksi jumlah penduduk Kota Banda Aceh tahun 2005 adalah sebesar 199.194 orang. Prediksi jumlah penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2010 adalah sebesar 234.194 orang. Prediksi jumlah penduduk tahun 2015 sebesar 269.194 orang, kemudian tahun 2020 sebesar 304.194 orang. Pada tahun 2026, jumlah penduduk Kota Banda Aceh diprediksi sebesar 346.194 orang. Pertumbuhan penduduk diperkirakan berada dalam kisaran 2.25 persen per tahun.
3. Angka kepadatan penduduk pada tahun 2027 diprediksi akan mencapai sebesar 50 orang per Ha. Prediksi angka kepadatan penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2010 adalah sebesar 30 orang per Ha, tahun 2015 sebesar 35 orang per Ha.
4. Seiring dengan bertambahnya kepadatan penduduk dan peningkatan kebutuhan tempat hunian, dalam waktu 20 tahun ke depan di Kota Banda Aceh akan terjadi perubahan pola hidup masyarakat terkait dengan pemilihan

dan bentuk tempat tinggal atau hunian. Munculnya pemukiman liar dan pemukiman kumuh di lahan yang seharusnya bukan untuk tempat tinggal akan menjadi kenyataan apabila tidak diantisipasi dengan baik.

5. Komposisi penduduk diprediksi akan mengalami bentuk **piramida terbalik** yang berarti penduduk usia tua lebih banyak dari usia muda dan anak-anak. Kota Banda Aceh memiliki keadaan populasi penduduk yang menua (*aging population*).
6. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2027 diprediksi sebesar 116.504 orang atau sebesar 41,7 persen dari jumlah total penduduk. Prediksi jumlah penduduk miskin pada tahun 2010 sebesar 80.064 orang, tahun 2015 sebesar 90.052 orang, dan tahun 2020 sebesar 101.308 orang.
7. Jumlah pengangguran pada tahun 2027 diperkirakan sebesar 10.803 orang atau 3,87 persen dari total jumlah penduduk. Prediksi jumlah pengangguran pada tahun 2010 sebesar 7.841 orang , tahun 2015 sebesar 8.769 orang, tahun 2020 sebesar 9.654 orang.
8. Komposisi penduduk di lihat dari aspek pendidikan akan membaik seiring dengan dilaksanakannya program wajib belajar 12 tahun sejak tahun 2006.
9. Pertumbuhan ekonomi untuk kurun waktu 20 tahun ke depan diprediksi akan berada pada kisaran angka 3 sampai 10 persen. Prediksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 sebesar 5,79 persen, tahun 2015 sebesar 4,49 persen, tahun 2020 sebesar 3,67 persen, dan tahun 2025 sebesar 6,13 persen.
10. Laju inflasi untuk kurun waktu 20 tahun ke depan diprediksi akan berada pada kisaran angka 8 sampai 15 persen.
11. PDRB per kapita pada tahun 2027 diperkirakan mencapai angka Rp 4.547.099.000 berdasarkan harga konstan 1997. Prediksi pertumbuhan PDRD berdasarkan harga berlaku untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp 2.130.815.000 tahun 2015 sebesar Rp 2.714.211 tahun 2020 sebesar Rp 3.297.607
12. Ekonomi kerakyatan berupa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih akan tetap mendominasi aktivitas ekonomi masyarakat Kota Banda Aceh dan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi daerah.

13. Sejalan dengan pelaksanaan kesepakatan *Asean Free Trade Area (AFTA)* dan kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET), maka pada tahun 2027 Kota Banda Aceh akan dihadapkan pada masuknya perusahaan dan produk asing. Persaingan usaha antara pengusaha lokal dengan pengusaha nasional dan asing akan semakin tinggi.
14. Kebutuhan terhadap konsumsi energi, air bersih, dan komunikasi akan sangat tinggi pada tahun 2027.
15. Secara umum, kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan politik masyarakat Kota Banda Aceh dalam kurun waktu 20 tahun ke depan masih sangat kondusif, meskipun pada beberapa sisi akan terjadi pergeseran sosial.
16. Penurunan nilai-nilai dan tradisi lokal yang berbasis pada budaya Aceh diperkirakan akan terus terjadi, namun akulturasi budaya Aceh dengan budaya lain termasuk budaya asing akan terus berlangsung. Budaya Aceh akan tetap eksis di masyarakat dan mengalami penyesuaian-penyesuaian.
17. Potensi wisata apabila dikemas dengan baik, Kota Banda Aceh akan menjadi pilihan utama pariwisata domestik maupun asing setelah Aceh dilanda tsunami. Namun diprediksi akan terjadi pergeseran orientasi kepariwisataan di Banda Aceh.
18. Pada tahun 2027, Kota Banda Aceh akan mengalami proses aglomerasi yang semakin membebani daya dukung infrastruktur, sosial, dan lingkungan hidup perkotaan, sehingga kepadatan aktivitas sosial ekonomi di wilayah Kota Banda Aceh semakin tinggi.
19. Ketersediaan taman pada kawasan pusat kota dan ruang publik sebagai tempat aktivitas bermain dan rekreasi warga Kota Banda Aceh semakin sempit namun dapat dikelola secara optimal, namun hal ini dengan dikembangkannya kawasan pesisir sebagai zona hijau akan dapat menjadi sebagai hutan kota.
20. Pelayanan publik yang didukung dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi semakin berkembang. Layanan informasi pelayanan publik semakin mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai media.

21. Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan akan terjadi perubahan pola pendidikan seiring dengan kemajuan teknologi. Pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, seperti penggunaan internet di sekolah dan sebagainya akan semakin luas terjadi di Kota Banda Aceh. Pendidikan berbasis agama juga akan semakin meningkat seperti tumbuhnya lembaga-lembaga dayah, pesantren, TPA, TPQ atau terjadi perubahan kurikulum pada sekolah-sekolah umum yang berbasis muatan lokal yang mengajarkan pelajaran agama.
22. Jumlah SMA dan SMP secara kuantitatif diprediksi akan bertambah untuk sepuluh hingga dua puluh tahun ke depan seiring dengan bertambahnya jumlah SD dalam kurun waktu belakangan ini. Demikian juga pada tahun 2027 jumlah perguruan tinggi di Banda Aceh secara kuantitas juga akan mengalami penambahan dibandingkan tahun 2005, tetapi secara kualitas akan terjadi peningkatan. Jumlah pesantren atau dayah dan sekolah-sekolah agama baik secara kuantitas maupun kualitas akan terjadi peningkatan.
23. Tingkat kelulusan riil pendidikan SD, SLTP dan SLTA semakin meningkat mendekati 100 persen dan kualitas kelulusan semakin meningkat. Lulusan dayah atau sekolah agama akan lebih banyak tertampung pada berbagai perguruan tinggi baik lokal maupun luar daerah melalui sistem penerimaan mahasiswa baru.
24. Peningkatan keahlian SDM pemerintah sehingga terjadi peningkatan birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2.3 ISU STRATEGIS KOTA BANDA ACEH

Berdasarkan penjangkaran aspirasi masyarakat yang dilakukan di 9 kecamatan, diperoleh gambaran bahwa yang menjadi isu-isu strategis Kota Banda Aceh adalah :

1. Pelayanan Umum = 54.7 %
2. Perumahan dan Fasilitas Umum = 13.4 %

- | | | |
|---|---|-------|
| 3. Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang | = | 9.7 % |
| 4. Pendidikan | = | 7.6 % |
| 5. Ekonomi | = | 5.2 % |
| 6. Kesehatan | = | 4.3 % |
| 7. Perlindungan Sosial dan Kependudukan | = | 2.1 % |
| 8. Pariwisata dan Budaya | = | 1.5 % |
| 9. Ketertiban dan Ketentraman | = | 1.5 % |
1. Fungsi pelayanan umum yang menjadi perhatian masyarakat untuk segera dibenahi, antara lain :
- Pelayanan pemerintahan, meliputi : perbaikan prosedur perizinan, pembuatan KTP dan dokumen lainnya: pemberian pelayanan yang prima kepada masyarakat; dan perbaikan sistem dan manajemen pemerintahan.
 - Syariat Islam, meliputi : penerapan dan penegakan nilai-nilai Islam; dan pendidikan Syariat Islam sejak dini sosialisasi kebijakan dan penegakan sanksi / hukum.
 - Kepegawaian, meliputi : rekrutment pegawai secara transparan dan sesuai standar; peningkatan kualitas SDM yang profesional; penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi dan ketentuan yang berlaku peningkatan kesejahteraan/ penghasilan.
 - Akses informasi, meliputi : akses akan produk qanun; Rencana Tata Ruang dan dokumen lainnya yang mengedepankan sosialisasi dan penyebaran informasi.
2. Fungsi perumahan dan fasilitas umum yang menjadi perhatian masyarakat untuk segera dibenahi, antara lain :
- Pekerjaan umum, meliputi : pembangunan jalan, jembatan, drainase, tanggul, pintu air, rumah pompa. Pelebaran jalan/peningkatan/pemeliharaan

dan penambahan akses jalan baru, pendataan serta penataan jalan yang sudah ada.

- Perumahan rakyat, meliputi : pembangunan prasarana penunjang perumahan, penataan lingkungan permukiman terutama di daerah yang terkena tsunami.

3. Fungsi lingkungan hidup dan penataan ruang yang menjadi perhatian masyarakat untuk segera dibenahi, antara lain :

- Tata ruang, meliputi : pemanfaatan dan penataan ruang serta pengembangan wilayah; tersusunnya RTRW Kota sampai pada tingkat desa (*village plan*). Sosialisasi dan penyebaran informasi qanun, penerapan sangsi, ketegasan bertindak.
- Lingkungan hidup, meliputi : limbah rumah tangga, polusi udara, persampahan, penghijauan, intrusi air laut, banjir, rawan gempa, penurunan permukaan tanah. Sosialisasi dan penyebaran informasi efek pencemaran lingkungan.

4. Fungsi pendidikan yang menjadi perhatian masyarakat untuk segera dibenahi, antara lain :

- Peningkatan pelayanan pendidikan sekolah maupun luar sekolah, meliputi :
 - penyediaan tenaga guru yang berkualitas;
 - dilandasi profesi pengelolaan pendidikan di sekolah dan meningkatkan peran serta masyarakat;
 - peningkatan mutu pendidikan dan tingkat kelulusan siswa.
 - menggunakan / penerapan sistim penjaringan pengujian bakat pada skala penerimaan siswa baru.
- Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pendidikan, meliputi : perbaikan gedung sekolah yang rusak; penyediaan buku bacaan yang optimal di tiap sekolah; pengembangan laboraturium; data base pendidikan.

- Perencanaan dan pengawasan pendidikan, meliputi : pengembangan kurikulum; penyusunan program-program pendidikan secara partisipatif dan berkelanjutan, adanya fit and proper test dalam pengangkatan kepala sekolah serta adanya laporan sekolah yang dipublikasikan.
 - Peningkatan peran serta partisipasi masyarakat melalui Komite Sekolah.
 - Peningkatan program luar sekolah yang dapat mengurangi angka penggangguran akibat putus sekolah dan sudah melewati masih wajib belajar.
5. Fungsi ekonomi yang menjadi perhatian masyarakat untuk segera dibenahi, antara lain :
- Pemberdayaan ekonomi lokal, meliputi : akses keuangan untuk pengembangan, industri rumah tangga, usaha kecil dan menengah
 - Pengembangan pusat perdagangan, meliputi : penertiban lokasi perdagangan yang sesuai tata ruang, perencanaan pembangunan pusat pusat perbelanjaan baru,
 - Ketenagakerjaan, meliputi : pelatihan tenaga kerja dan penyediaan *data base* ketenagakerjaan serta penyediaan lapangan kerja.
 - Perikanan dan kelautan, meliputi : perbaikan tambak dan bantuan peralatan tangkap, fishing ground management modal usaha.
 - Perindustrian, meliputi : pengembangan industri rumah tangga dan industri perikanan.
6. Fungsi kesehatan yang menjadi perhatian masyarakat untuk segera dibenahi, antara lain :
- Peningkatan pelayanan kesehatan, meliputi : pelayanan rumah sakit, puskesmas, pusku, polindes, pusling dengan prasarana dan sarana kesehatan yang canggih dan lengkap agar pelayanan kesehatan untuk masyarakat lebih baik, akurat dan cepat.

- Tenaga medis/kesehatan, meliputi : penyediaan tenaga medis, dokter spesialis, bidan dan perawat yang handal dan profesional.
 - Penyuluhan kesehatan, meliputi : sosialisasi tentang hidup bersih dan sehat, keluarga berencana.
 - Perilaku hidup sehat, meliputi : kesadaran hidup sehat dan lingkungan bersih.
7. Fungsi perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi perhatian masyarakat untuk segera dibenahi, antara lain :
- Pemberdayaan perempuan, meliputi : pemberian kesempatan yang sama dalam berbagai bidang kehidupan tanpa melanggar nilai-nilai Islam.
 - Perlindungan anak dan manula, meliputi : perlindungan anak dibawah umur; jaminan sosial bagi manula.
 - Bantuan sosial, meliputi : penanganan penyandang masalah sosial (pengemis, gelandangan, cacat, fakir miskin, dan lainnya).
8. Fungsi pariwisata dan kebudayaan yang menjadi perhatian masyarakat untuk segera dibenahi, antara lain :
- Kebudayaan, meliputi : penerapan dan pelestarian adat istiadat; kesenian rakyat.
 - Pariwisata, meliputi : pengembangan wisata yang bernuansa Islami; pemeliharaan benda-benda bersejarah; wisata tsunami serta sosialisasi dan pemberian informasi kepariwisataan.
9. Fungsi ketertiban dan ketentraman yang menjadi perhatian masyarakat untuk segera dibenahi, antara lain :
- Penerapan hukum, meliputi : penerapan peraturan yang mencerminkan budaya Aceh dan dilapangan harus benar-benar dilaksanakan dengan baik tanpa kecuali; penerapan sanksi yang jelas terhadap pelanggaran hukum, penertiban produk-produk hukum/qanun yang tidak mencerminkan kepentingan dan budaya Aceh.

BAB III

VISI, MISI, NILAI-NILAI DAN ARAH PEMBANGUNAN

KOTA BANDA ACEH TAHUN 2007 - 2027

3.1 VISI

Visi merupakan situasi atau keadaan ideal yang diinginkan untuk 20 tahun kedepan, sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta kondisi di masa yang akan datang. Visi merupakan dambaan atau harapan masa depan yang ingin diwujudkan secara nyata. Penetapan visi jangka panjang ini merupakan aspirasi masyarakat Kota Banda Aceh yang dipadukan dengan hasil musyawarah unsur pemerintah Kota Banda Aceh dengan tokoh masyarakat, stake holders, DPRK dan pemangku-pemangku kepentingan lainnya.

Visi Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2027 adalah :

“TERWUJUDNYA BANDA ACEH SEBAGAI KOTA TAMADDUN, MODERN DAN ISLAMI”

Tamaddun berasal dari bahasa Arab “*maddina*” yang artinya *Kota*. Kemudian berubah menjadi *tamaddana* dalam pengertian proses pengupayaan untuk sebuah kota yang mempunyai sifat dan karakter kemajuan. *Maddana* berarti pula bermaksud membina bandar-bandar atau kota-kota. Kata *tamaddun* lebih menekankan kepada aspek kehidupan kota dan hidup kekotaan masyarakat yang tersusun dengan aturan-aturan dan memiliki peradaban (*civilization*) yang tinggi dan dilandasi oleh nilai-nilai yang Islami.

Modern diartikan dengan kemampuan berkembang dalam pemikiran yang cerdas dan cara hidup yang teratur dengan tetap menghormati kearifan atas dasar nilai-nilai utama yang telah dimiliki.

Islami diartikan bahwa nilai-nilai Islam dijadikan sebagai pedoman tertinggi dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam jangka waktu 20 tahun ke depan Kota Banda Aceh diharapkan menjadi kota yang penduduknya mempunyai peradaban yang tinggi, menguasai dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat yang dilandasi oleh kearifan lokal dan nilai-nilai Islam.

3.2 MISI

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Banda Aceh tersebut ditempuh melalui 7 misi pembangunan, yaitu :

1. ***Mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah.***
2. ***Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah disertai dengan penegakan hukum.***
3. ***Mewujudkan pembangunan Kota Banda Aceh yang nyaman, aman, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.***
4. ***Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai kota pendidikan yang berkualitas.***
5. ***Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai pusat perdagangan, industri dan perikanan.***
6. ***Mewujudkan masyarakat Kota Banda Aceh yang sehat, cerdas dan berkualitas.***
7. ***Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai kota wisata berbasis masyarakat dan budaya Islami.***

Penjelasan masing-masing misi adalah sebagai berikut:

Misi Kesatu

Mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dan masyarakat untuk menerapkan Syariat Islam secara kaffah dalam segala aspek kehidupan di Kota Banda Aceh melalui pengamalan Syariat Islam dalam segala aspek kehidupan

masyarakat yang dijabarkan dalam Peraturan Perundang-undangan Daerah (Qanun), dengan mempedomani kepada Al-Qur'an dan Hadits sehingga akan terbangun kehidupan berdasarkan Syariah serta terwujudnya hubungan keagamaan yang baik dengan umat agama lainnya.

1. Menerapkan dan mengamalkan Syariat Islam Secara Kaffah dalam Segala Aspek Kehidupan Masyarakat Kota Banda Aceh
2. Mempedomani kepada Al Qur'an dan Hadits dalam setiap Tindakan atau dalam Pengambilan Kebijakan
3. Membangun Kehidupan Masyarakat Berdasarkan Syariah
4. Mewujudkan hubungan Keagamaan yang Baik dengan Umat Agama Lainnya

Misi Kedua

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah disertai dengan penegakan hukum

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dan masyarakat dalam melakukan penataan struktur kelembagaan dan pranata sosial, meningkatkan pelayanan umum melalui penerapan teknologi informasi dengan *Network System*, budaya tertib hukum, menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban serta pemberdayaan politik lokal dan penentuan arah pembangunan komunikasi dan informasi, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan terlaksananya program perencanaan dan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat dan berwawasan lingkungan.

1. Penataan Struktur Kelembagaan yang efisien dan efektif sesuai dengan tuntutan prinsip-prinsip Profesional
2. Melahirkan Standar Pelayanan Publik Sesuai dengan Kebutuhan dan Perkembangan Masyarakat
3. Penerapan Teknologi Informasi dalam;
 - Sistim Pengelolaan Keuangan dan Sumber Daya Manusia
 - Sistim Perencanaan dan Pendataan Sumber Daya Ekonomi
4. Budaya Tertib Hukum dan bebas KKN
5. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban

6. Perencanaan Pembangunan yang berpihak pada Masyarakat dan Berwawasan Lingkungan

Misi Ketiga

Mewujudkan pembangunan Kota Banda Aceh yang nyaman, aman, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dan masyarakat dalam melaksanakan perencanaan, penataan serta pengembangan pembangunan secara terpadu dan terkendali dengan mengedepankan kepentingan masyarakat banyak untuk mencapai lingkungan yang nyaman, aman, tenteram, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Menata pola pembangunan yang meliputi pengembangan kawasan fungsional, kawasan pemekaran, perdagangan dan jasa, pemerintahan, pariwisata, perikanan (tambak) dalam blok-blok peruntukan, arahan kepadatan bangunan, ketinggian bangunan, garis sempadan, rencana penggunaan lahan, serta pengendalian pemanfaatan kawasan, pengelolaan lingkungan yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup sehat dan bebas dari pencemaran.

Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dengan membangun drainase, bebas genangan air, pengembangan rumah pompa, penataan jaringan dan peningkatan konstruksi jalan raya, serta terbangunnya infrastruktur pendukung lainnya secara terpadu dengan mengacu pada pola penataan dan pemanfaatan ruang.

1. Perencanaan Terpadu dan Terkendali Sesuai Aturan yang berlandaskan Hukum yang berlaku
2. Menciptakan Lingkungan yang Nyaman, Aman Tenteram berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta sesuai dengan Tata Ruang
3. Membangun Infrastruktur Secara Terpadu yang Mengacu pada Pola Penataan dan Pemanfaatan Ruang
4. Membuat Sistem Jaringan Listrik, Air, Telekomunikasi secara Terpadu dan Modern
5. Terciptanya Penataan Bangunan sesuai dengan Qanun RTRW Kota dan Memperhatikan Segi Arsitektur serta Nilai-Nilai Budaya Aceh
6. Tersedianya Ruang Parkir yang Memadai disetiap Bangunan

Publik/Pasar/Perbankan dan Tempat Umum lainnya.

7. Terpeliharanya Lingkungan Hijau, Perlindungan Terhadap Satwa dan Bangunan Bersejarah
8. Terbebasnya Kota Banda Aceh dari Segala Bentuk Polusi yang ditimbulkan oleh Kendaraan Bermotor dan Mesin-mesin Industri

Misi Keempat

Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai kota pendidikan yang berkualitas

Misi ini merupakan upaya pemerintah Kota Banda Aceh untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui partisipasi seluruh komponen masyarakat, swasta dan pemerintah Kota Banda Aceh yang mempunyai standar kualitas yang tinggi, mempunyai keunggulan kompetitif yang berdaya saing tinggi, menekan berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak citra pendidikan Kota Banda Aceh, menciptakan sistem dan kebijakan pendidikan yang unggul serta menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik.

1. Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Pendidik dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha
2. Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik, Teknologi Pendidikan dan Penerapan Kurikulum Bertaraf/Standar Internasional
3. Menyediakan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Bertaraf Internasional
4. Melindungi Lingkungan Sekolah dari Pengaruh Rokok, Narkoba, Pornografi dan Pengaruh Negatif Lainnya yang dapat Merusak Moral Generasi Muda
5. Tersedianya Waktu yang memadai dalam Penguasaan Bahasa dan Keterampilan khusus bagi Tenaga Pendidik / Anak Didik dalam setiap jenjang Pendidikan
6. Meningkatkan Kualitas Gizi Bagi Anak didik Usia Sekolah

Misi Kelima

Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai pusat perdagangan, industri dan perikanan

Melalui misi ini Pemerintah Kota Banda Aceh berupaya untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat perekonomian kota berbasis keunggulan masing-masing sektor terutama sektor perdagangan, industri dan perikanan menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan, khususnya dalam pelayanan jasa dan perdagangan, keberpihakan kepada ekonomi rakyat, meningkatkan iklim investasi melalui regulasi dan penciptaan stabilitas keamanan.

1. Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat perekonomian berbasis keunggulan masing-masing sektor
2. Membangun Keterkaitan Sistem produksi, distribusi, Pelayanan, khususnya dalam pelayanan jasa dan perdagangan
3. Keberpihakan pada ekonomi Rakyat
4. Meningkatkan iklim Investasi melalui sistem regulasi dan penciptaan stabilitas keamanan

Misi Keenam

Mewujudkan masyarakat Kota Banda Aceh yang sehat, cerdas dan berkualitas

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kota Banda Aceh untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, bebas dari berbagai penyakit menular yang epidemi, memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik melalui pelayanan kesehatan yang prima, menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang memenuhi standar pelayanan maksimal, tersedianya tenaga medis dan paramedis yang cukup, dan kesadaran hidup sehat dari seluruh masyarakat Kota Banda Aceh.

1. Tersedianya pusat-pusat pelayanan kesehatan yang modern dan Islami
2. Terpenuhinya pelayanan kesehatan bagi Seluruh warga kota yang membutuhkan.
3. Tersedianya Metode untuk mendeteksi dan mencegah berbagai macam penyakit, terutama wabah penyakit menular yang epidemi.
4. Tersedianya pusat penelitian dan produksi Obat/makanan untuk memenuhi konsumsi obat warga Kota Banda Aceh
5. Tersedianya Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Memenuhi Standar Internasional

6. Tersedianya Dokter Spesialis / Paramedis dalam jumlah yang signifikan dan profesional dalam memenuhi pelayanan kesehatan.
7. Tersosialisasinya budaya dan Kesadaran Hidup Sehat dalam lingkungan perdesaan, sekolah, perkantoran, dan tempat-tempat umum lainnya.

Misi Ketujuh

Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai kota wisata berbasis masyarakat dan budaya Islami

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai kota wisata yang meliputi wisata spiritual, wisata budaya, wisata air, wisata sejarah, melalui peningkatan daya tarik objek wisata yang dimiliki dengan menampilkan situs-situs sejarah, agama, keindahan alam, benda budaya, seni dan tari, adat istiadat, dengan Mesjid Raya dan Krueng Aceh sebagai *landmark* kota (ciri monumental), *tsunami park* dan budaya khas kota sehingga Kota Banda Aceh sebagai *waterfront city* dapat terwujud dan tetap berada dalam bingkai nilai-nilai islami.

1. Terlaksananya Program penyebaran informasi zakat terhadap seluruh lapisan masyarakat, lembaga pendidikan, perusahaan-perusahaan, Industri-Industri dan perdagangan.
2. Berdirinya lembaga baitul Maal dan Amil yang profesional dan memiliki integritas yang tinggi
3. Tersedianya Qanun-qanun yang berhubungan dengan Zakat
4. Terlaksananya sanksi hukum terhadap muzakki yang tidak menunaikan zakat.

3.3 PRINSIP-PRINSIP DAN NILAI-NILAI

Prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang perlu dikembangkan untuk mencapai visi dan misi Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

3.3.1 Prinsip-prinsip

- Demokrasi* : Menjunjung tinggi kebebasan mengeluarkan pendapat dalam kehidupan masyarakat
- Partisipasi* : Setiap warga memiliki suara yang sama dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.
- Transparansi* : Menciptakan arus informasi yang terbuka kepada publik sehingga publik dapat memahami program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
- Akuntabilitas* : Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada lembaga-lembaga dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta masyarakat.
- Desentralisasi* : Penyerahan sebahagian wewenang pemerintah kota kepada pemerintah dibawahnya.

3.3.2 Nilai-nilai

Nilai-nilai yang berkembang di masyarakat Kota Banda Aceh merupakan modal yang sangat berharga dalam menghadapi tantangan ke depan. Nilai-nilai utama ini merupakan landasan operasional yang dapat menstimulus stakeholder dalam mencapai misi dan visi. Nilai-nilai utama dimaksud yaitu :

1. ***Ketaqwaan*** : nilai-nilai keimanan umat manusia/hamba Allah kepada khalik/penciptanya. Secara lebih lengkapnya ketaqwaan adalah, menjalankan segala kewajiban, menjauhi semua larangan dan syubhat (perkara yang samar), selanjutnya melaksanakan perkara-perkara sunnah (mandub), serta menjauhi perkara-perkara yang makruh (dibenci);

2. **Keadilan** : sikap dan tindakan seseorang yang memperlakukan orang lain sesuai dengan fungsi, peran, dan tanggung jawabnya serta dengan memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat;
3. **Profesionalisme** : terampil, handal dan bertanggung jawab serta penuh dedikasi dalam menjalankan profesinya;
4. **Kejujuran** : suatu nilai dimana sikap dan ucapan sesuai dengan keadaan dan tindakan yang sebenarnya, memberitakan kebenaran tanpa diganti, diubah, dikurangi atau ditambah. Hal ini berimplikasi pada pengambilan kebijakan agar pelaksanaan sesuai dengan cita-cita awal pada saat kebijakan itu ditetapkan, disosialisasikan dan dijelaskan sebagaimana adanya;
5. **Integritas** : kepribadian yang dilandasi unsur kejujuran, keberanian, kebijaksanaan, dan pertanggung jawaban sehingga menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat;
6. **Tanggung jawab** : kesediaan menanggung sesuatu, yaitu bila salah wajib memperbaikinya atau berani dituntut atau diperkarakan;
7. **Kerjasama** : komitmen diantara anggota organisasi untuk saling mendukung satu sama lain, menghindari ego sektoral yang mementingkan bagian organisasinya sendiri; dan
8. **Berkelanjutan** : pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya memenuhi kebutuhan sekarang tetapi juga tidak mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

3.4 ARAH PEMBANGUNAN

Visi dan misi yang telah ditetapkan dijabarkan dalam arah pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2027. Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh 2007 – 2027 diarahkan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan harus dilaksanakan secara terpadu dan serasi serta diarahkan untuk mengembangkan daerah sesuai dengan prioritas dan potensi wilayah/kawasan disertai dengan indikator makro sebagai kerangka monitoring, yaitu :

3.4.1 Pelaksanaan Kehidupan Agama melalui Peningkatan Pengamalan Syariat Islam secara kaffah

Kehidupan keagamaan khususnya dalam mewujudkan syariat Islam secara kaffah diarahkan untuk :

- a. Peningkatan iman dan taqwa kepada Allah SWT yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Banda Aceh;
- b. Peningkatan kerukunan beragama, rasa saling percaya dan harmonisasi antar muslim dengan non muslim sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat kota yang penuh religius, toleransi, tenggang rasa, dan harmonis secara islami;
- c. Pendidikan keagamaan yang dimulai dari sejak lahir sampai uzur yang di fasilitasi sarana dan prasarana yang mencukupi sehingga terwujudnya masyarakat yang mempunyai SDM yang tinggi dan bertaqwa terhadap Allah SWT;
- d. Penerapan sistem keislaman pada hubungan muamalah sehingga terbentuknya sistem perekonomian secara syariah yang menunjang kesejahteraan masyarakat Kota Banda Aceh.;
- e. Berfungsinya Baitul Mal yang dapat membantu masyarakat miskin dan yatim piatu dan kelompok masyarakat yang mempunyai hak dalam Zakat; dan
- f. Mengaktifkan kegiatan agama disegala sektor, dengan menghidupkan kegiatan pengajian dan kegiatan lainnya sampai ke pelosok desa serta lapisan masyarakat.

3.4.2 Pelayanan Umum Pemerintahan

Diarahkan untuk membangun hubungan partisipasi yang kuat dengan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemerintahan

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- a. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan kepatuhan aparatur pemerintah pada kebijakan dan peraturan yang ditetapkan agar penyelenggaraan pemerintahan lebih efisien dan efektif;
- c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana kerja dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat;
- d. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah melalui pengawasan internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat;
- e. Meningkatkan kesejahteraan PNS melalui pelaksanaan sistem yang berbasis kinerja baik individual maupun instansi;
- f. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penentuan kebijakan publik, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah melalui mekanisme yang sah;
- g. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang semakin kuat, demokratis, dinamis dan bertanggung jawab;
- h. Mempertahankan netralitas birokrasi dalam kehidupan politik;
- i. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi termasuk pengembangan *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, pelayanan masyarakat, dan pengembangan potensi daerah; dan
- j. Penataan sistem administrasi kependudukan yang mengarah pada peningkatan pelayanan, kualitas data dan informasi kependudukan

2. Hukum

Penegakan hukum diarahkan pada :

- a. Mendorong terlaksananya penegakan supremasi hukum di Kota Banda Aceh agar lebih menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- b. Penertiban produk-produk hukum daerah atau Qanun Daerah yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat;

- c. Penerapan secara tegas Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- d. Mengembangkan budaya hukum di masyarakat agar tercipta kesadaran dan ketaatan hukum;
- e. Meningkatkan integritas dan profesionalitas aparatur penegak hukum untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat; dan
- f. Mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang mandiri dan independen guna mewujudkan pengayoman pada masyarakat.

3. Politik

- a. Mempertahankan keberadaan dan kelangsungan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada UUD 1945;
- b. Meningkatkan etika dan moral budaya politik sesuai dengan prinsip demokrasi pancasila serta menjunjung tinggi nilai-nilai dan hak-hak asasi manusia di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. Meningkatkan kemandirian dan fungsi partai politik dalam menyerap, menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat dengan mengembangkan sikap bijaksana dan menjunjung tinggi etika dan berdemokrasi;
- d. Mewujudkan media massa yang independen, kebebasan berkumpul, berserikat, menyatakan pendapat setiap masyarakat secara bertanggung jawab;
- e. Meningkatkan kesadaran bela negara di dalam masyarakat dalam upaya mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Ketertiban dan Keamanan

- a. Meningkatkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat untuk menciptakan stabilitas daerah yang bebas dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan;

- b. Meningkatkan kesadaran swakarsa masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketentraman;
- c. Meningkatkan perlindungan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan aparat pemerintah dan swadaya masyarakat;
- d. Meningkatkan pelayanan umum dan bukti perlindungan kepada masyarakat dalam penanganan bencana dengan dukungan dan peran serta aktif masyarakat;
- e. Mewujudkan situasi kondusif di daerah melalui peningkatan peran pendidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan peraturan daerah; dan
- f. Meningkatkan upaya deteksi dini, pencegahan dan penanggulangan peredaran dan penyebaran narkoba, obat-obatan terlarang dan zat adiktif.

5. Kapasitas Keuangan Daerah

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan sumber-sumber asli daerah melalui penggalan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru;
- b. Membuka seluas-luasnya bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Kota Banda Aceh;
- c. Mengupayakan penambahan pendapatan daerah melalui berbagai sektor terutama melalui pinjaman daerah dan pendapatan-pendapatan daerah lainnya;
- d. Pengkajian secara kontinue terhadap produk hukum daerah yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah dan menyesuaikannya dengan kondisi yang berkembang di daerah; dan
- e. Peningkatan dan pembinaan SDM aparatur pengelolaan Keuangan Daerah.

6. Komunikasi

- a. Mewujudkan pemerataan informasi kepada masyarakat secara lebih luas dengan mendorong tumbuh dan berkembangnya media yang independen;

- b. Menciptakan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan pemerintah daerah untuk menjalankan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat.
- c. Menciptakan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat

3.4.3 Mewujudkan Pembangunan Kota Banda Aceh yang nyaman, aman, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Pembangunan ini diarahkan pada pembangunan Kota Banda Aceh yang indah, nyaman, dan aman melalui :

- a. Pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan aman dari bencana alam;
- b. Peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan;
- c. Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang humanis dan berwawasan lingkungan;
- d. Pembangunan fasilitas publik pada zona-zona rawan bencana dengan penerapan teknologi dan bersinergi dengan multisektor dan disosialisasikan kepada masyarakat secara berkelanjutan;
- e. Penertiban bangunan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;
- f. Pembangunan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, jaringan air, jaringan listrik, telekomunikasi kota dan jaringan bahan bakar gas yang sudah terintegrasi; dan
- g. Perluasan wilayah Kota Banda Aceh ke arah Selatan kota pada wilayah Kabupaten Aceh Besar untuk dapat menjadi wilayah administrasi Kota Banda Aceh.

3.4.4 Ekonomi

Dalam bidang ekonomi Kota Banda Aceh diarahkan sebagai pusat perkembangan ekonomi dengan fungsi utama mengolah dan memasarkan hasil-hasil pertanian, industri, perikanan dan kegiatan-kegiatan perdagangan lainnya.

1. Pertanian dan perikanan

- a. Meningkatkan pembangunan peternakan yang diarahkan pada pemberdayaan dan pengembangan peternakan rakyat, guna mendorong diversifikasi produk dalam rangka mencukupi kebutuhan protein hewani;
- b. Meningkatkan produksi hasil perikanan melalui peningkatan sumber daya perikanan laut dan darat;
- c. Penerapan teknologi rekayasa dan teknologi tepat guna;
- d. Memperluas jaringan pemasaran hasil usaha pertanian, peternakan, perikanan; dan
- e. Meningkatkan Sumber Daya Manusia pertanian dan perikanan

2. Industri dan Perdagangan

- a. Meningkatkan pembangunan industri terutama melalui pemulihan, pengembangan sentra-sentra industri, peningkatan kemampuan ekonomi rakyat melalui pembinaan dan peningkatan kerajinan rumah tangga, industri kecil dan menengah;
- b. Menerapkan teknologi tepat guna dalam rangka menghasilkan produk unggulan baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun kebutuhan ekspor;
- c. Mengembangkan jaringan usaha yang dapat menjamin lancarnya distribusi barang dan jasa serta pemasaran hasil produksi, industri dan perdagangan; dan
- d. Meningkatkan pembangunan industri yang diarahkan dengan mengutamakan pemanfaatan bahan baku/sumber daya alam lokal yang tersedia.

3. Transportasi

Pembangunan Kota Banda Aceh bidang transportasi diarahkan melalui :

- a. Peningkatan sistem dan manajemen transportasi sebagai faktor pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan, ketertiban dan keamanan, sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Pemeliharaan dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi agar tetap dalam kondisi mantap untuk mendukung kelancaran arus barang dan jasa dengan melibatkan peran serta swasta dan masyarakat; dan
- c. Pengembangan sarana transportasi pedesaan dan perkotaan secara terpadu untuk menunjang pengembangan wilayah terutama desa-desa yang masih tertinggal.

4. Koperasi dan Tenaga Kerja

Dibidang Koperasi dan Tenaga Kerja diarahkan pada kehidupan koperasi yang dapat menjadi sokoguru kehidupan ekonomi rakyat guna meningkatkan ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini dilaksanakan melalui :

- a. Mengembangkan koperasi dan UMKM dengan menitikberatkan kepada aspek permodalan, sumberdaya manusia, kelembagaan, dan pemasaran berbasis pada sentra dan KSP/USP agar menjadi unit usaha yang tangguh dan lebih mampu berperan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing;
- b. Mengembangkan koperasi dan UMKM agar lebih mampu berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak;
- c. Mendorong peningkatan nilai ekspor produk UMKM dengan laju pertumbuhan yang lebih tinggi. Dengan berlakunya unsur-unsur syariat Islam di Banda Aceh diharapkan lembaga koperasi dan UMKM akan tumbuh dan

berkembang menjadi lembaga ekonomi yang islami;

- d. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja untuk membentuk tenaga kerja yang memiliki etos kerja dan jiwa wirausaha yang tangguh, terampil, dan menguasai teknologi;
- e. Meningkatkan pendayagunaan dan penyaluran kerja yang didukung informasi ketenagakerjaan dalam dan luar negeri serta perencanaan tenaga kerja yang komprehensif dengan memperhatikan kemampuan dan kualitas tenaga kerja;
- f. Memantapkan perlindungan tenaga kerja yang meliputi hak berserikat, keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial tenaga kerja; dan
- g. Mengupayakan perlindungan khusus bagi tenaga kerja wanita sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya.

3.4.5 Sosial Budaya

1. Pendidikan

Pembangunan Jangka Panjang Daerah di bidang pendidikan diarahkan pada :

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki jati diri dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) melalui kualitas pendidikan yang tinggi;
- b. Pemerataan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat, laki-laki dan perempuan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat yang berbudi luhur dan beretika dan peningkatan kualitas iman dan taqwa yang kuat;
- c. Meningkatkan kualitas tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan inovasi dalam pengembangan pembelajaran yang berstandar nasional maupun internasional;
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan dasar dan menengah melalui wajib belajar 12 tahun;
- e. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan; penurunan tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; dan
- f. Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik.

2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan diarahkan guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani, melalui :

- a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, aparatur kesehatan, obat dan

- perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan;
- b. Peningkatan perilaku sehat dan kemandirian masyarakat, pada upaya promotif dan preventif terhadap berbagai jenis penyakit.
 - c. Pendidikan masyarakat untuk menjalankan hidup sehat perlu dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan seluruh komponen terkait dengan masalah kesehatan;
 - d. Pencegahan terhadap penyalahgunaan napza perlu disosialisasikan terutama kepada generasi muda melalui berbagai media maupun penyuluhan-penyuluhan. Dengan upaya yang sama, pencegahan penyebaran virus HIV/AIDS juga perlu dilakukan; dan
 - e. Meningkatkan angka harapan hidup, menurunkan angka kematian bayi, dan menurunkan angka kematian ibu hamil dan melahirkan.

3. Pariwisata dan Budaya

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dibidang pariwisata dan budaya diarahkan pada kehidupan pariwisata yang menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual Islami dan tradisi yang ada dalam masyarakat serta terpeliharanya adat dan istiadat lokal. Terpeliharanya nilai-nilai tersebut dan kelestarian lingkungan harus menjadi daya tarik bagi para wisatawan, dengan cara :

- a. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya islami yang berkembang dalam masyarakat Aceh;
- b. Memelihara dan melestarikan alam lingkungan;
- c. Merevitalisasi Krueng Aceh dan peninggalan sejarah lainnya sebagai obyek wisata;
- d. Menjadikan situs sejarah dan situs budaya sebagai obyek wisata penelitian yang utama; dan
- e. Meningkatkan ragam dan kualitas produk wisata serta promosi dan pemasaran, baik di dalam maupun di luar negeri.

3.5 SASARAN PEMBANGUNAN KOTA BANDA ACEH

Sasaran pembangunan ini berfungsi sebagai target pembangunan dalam mewujudkan visi Kota Banda Aceh 20 tahun kedepan. Adapun sasaran pembangunan Kota Banda Aceh adalah :

3.5.1 Terwujudnya pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah, dengan indikator sebagai berikut :

1. Menurunnya jumlah pelanggaran Syariat Islam;
2. Tidak terjadinya konflik yang didasari agama;
3. Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan dengan basis Syariat Islam;
4. Diterapkannya perekonomian secara syariah; dan
5. Berfungsinya Badan Baitul Mal secara baik.

3.5.2 Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah disertai dengan pelayanan prima dan penegakan hukum, dengan indikator sebagai berikut

1. Terlaksananya proses pengurusan perizinan dan surat menyurat lainnya yang semakin singkat melalui pelayanan izin satu atap ditingkat pemerintah kota dan kecamatan;
2. Kepatuhan dan kedisiplinan aparatur yang semakin tinggi;
3. Diterapkannya teknologi dengan *Network System*;
4. Terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik;
5. Terciptanya etika dan moral budaya masyarakat sesuai dengan prinsip Demokrasi Pancasila;
6. Terciptanya situasi yang kondusif dan menurunnya angka kriminalitas;
7. Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang kuat, demokratis dinamis, dan bertanggung jawab; dan

8. Terciptanya lembaga keuangan yang kuat dan mampu mengelola dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah.

3.5.3 Terwujudnya Pembangunan Kota Banda Aceh yang nyaman, aman, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dengan indikator antara lain :

1. Terbangunnya infrastruktur yang aman dari bencana alam;
2. Meningkatnya partisipasi stakeholders dan masyarakat dalam proses perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan;
3. Tersedianya kawasan lindung (RTH, sempadan sungai, dan lainnya) yang proporsional dengan kawasan budidaya;
4. Terbangunnya fasilitas publik pada zona-zona rawan bencana dengan penerapan teknologi;
5. Tertibnya pembangunan sesuai dengan ketentuan yang diatur Izin Mendirikan Bangunan ;
6. Terintegrasinya pembangunan fasilitas umum; dan
7. Terwujudnya perluasan wilayah Kota Banda Aceh .

3.5.4 Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai pusat perdagangan, industri dan perikanan, dengan indikator antara lain :

1. Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil-hasil industri, perikanan, dan pertanian;
2. Tumbuh dan berkembangnya sentra-sentra industri serta industri rumah tangga masyarakat;
3. Terbangunnya pusat pemasaran hasil-hasil produksi dalam daerah yang representatif;

4. Terbentuknya jaringan distribusi pemasaran hasil-hasil produksi lokal serta berfungsinya kembali pelabuhan sebagai simpul distribusi;
5. Adanya deregulasi dan debirokratisasi yang dapat meningkatkan keinginan investor untuk menanamkan modal di Kota Banda Aceh;
6. Meningkatnya produksi hasil perikanan dengan orientasi ekspor; dan
7. Diterapkannya teknologi tepat guna dan teknologi rekayasa

3.5.5 Terwujudnya kehidupan sosial budaya yang bernuansa Islami dan masyarakat yang beretika

A. Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai pusat pendidikan yang berkualitas, dengan indikator antara lain :

1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG);
2. Meningkatnya rasio perempuan dan laki-laki dalam pendidikan;
3. Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan yang diterima di berbagai perguruan tinggi di luar daerah dan di pasar kerja;
4. Meningkatnya nilai investasi di bidang pendidikan;
5. Bebasnya biaya pendidikan;
6. Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan; dan
7. Dihasilkan dan dimanfaatkannya teknologi hasil penelitian, pengembangan, dan rekayasa bagi kesejahteraan masyarakat.

B. Terwujudnya masyarakat Kota Banda Aceh yang sehat, cerdas dan berkualitas, dengan indikator antara lain :

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
2. Terjalinnya kerjasama lintas sektor dalam upaya meningkatkan kesehatan

masyarakat;

3. Meningkatnya perilaku dan kemandirian masyarakat dalam upaya promotif dan preventif terhadap berbagai jenis penyakit; dan
4. Berkurangnya epidemi penyakit menular di Kota Banda Aceh.

C. Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai kota wisata yang bernuansa Islami,
dengan indikator antara lain :

1. Meningkatnya jumlah wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri
2. Meningkatnya jumlah pelaku usaha pariwisata
3. Meningkatnya citra Kota Banda Aceh sebagai Kota Budaya dan Wisata
4. Pelestarian situs-situs budaya peninggalan masa lalu.
5. Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai pusat kajian/penelitian wisata dan budaya

BAB IV PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2027 yang memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Kota Banda Aceh, merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat Kota Banda Aceh dalam penyelenggaraan pembangunan jangka panjang daerah 20 tahun ke depan. RPJPD ini juga menjadi pedoman di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya selama periode tersebut.

Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Banda Aceh dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan yaitu "**Terwujudnya Banda Aceh sebagai Kota Tamaddun, Modern dan Islami**", perlu didukung oleh seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan, antara lain:

1. Komitmen dari kepemimpinan daerah yang cakap (*capable*), berkualitas dan demokratis;
2. Penerapan Hukum Islam secara kaffah;
3. Ketata-pemerintahan yang baik (*good governance*);
4. Konsistensi kebijakan pemerintah kota;
5. Keberpihakan pemerintah kepada ekonomi rakyat;
6. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha secara aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
7. Mekanisme kontrol dan pengawasan (*check and balance*) melalui pelaksanaan transparansi serta akuntabilitas publik yang baik.

Dukungan dan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan akan membawa dampak yang

sangat baik dalam berjalannya sistem pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang akuntabel dan berpihak kepada masyarakat.

Koordinasi internal antar instansi maupun eksternal antara pemerintah kota Banda Aceh dengan pemerintah daerah lainnya, pemerintah provinsi serta para donatur yang ingin membangun kota Banda Aceh merupakan aspek penting yang harus terus menerus diciptakan dalam rangka terwujudnya arah pembangunan, misi dan visi Kota Banda Aceh 20 tahun ke depan.

WALIKOTA BANDA ACEH

Ir. MAWARDY NURDIN, M.Eng.Sc



**RANCANGAN QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR TAHUN 2007
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA (RPJPK)
KOTA BANDA ACEH 2007 - 2027**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATAALA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa sebagai acuan resmi dan pedoman yang berwawasan jangka panjang bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh, DPR Kota Banda Aceh, dunia usaha dan seluruh elemen masyarakat untuk mengetahui potensi dan kondisi riil serta proyeksi arah pembangunan di Kota Banda Aceh pada masa akan datang dipandang perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh Tahun 2007 - 2027;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu menetapkan dalam suatu Qanun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara No 3689);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara No 4287);

5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara No 4301);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4335);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah, Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang, Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
13. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
14. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias-Sumatera Utara;

Dengan Persetujuan Bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
dan
WALIKOTA BANDA ACEH**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA (RPJPK) BANDA
ACEH 2007 - 2027**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
4. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banda Aceh tahun 2007 - 2027 yang selanjutnya disebut RPJP Kota Banda Aceh adalah perwujudan kehendak rakyat yang ditetapkan sebagai dokumen rencana pembangunan jangka panjang Kota Banda Aceh untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2007 – 2027.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut RPJP Kota Banda Aceh 2007 – 2027 dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang lebih lanjut akan diatur dengan Qanun Daerah.

Pasal 3

RPJP Kota Banda Aceh 2007 -2027 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA

Pasal 4

RPJP merupakan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang memuat penjabaran dari visi, dan misi dan arah pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung mulai tahun 2007 sampai 2027, adalah sebagai mana tersebut dalam lampiran Qanun ini.

Pasal 5

Penjabaran dari RPJP ini akan ditindaklanjuti dalam RPJM.

Pasal 6

Dalam menyusun materi kampanye yang berisi visi, misi, dan program pembangunan Kota Banda Aceh, calon Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada RPJP serta memperhatikan RPJP Nanggroe Aceh Darussalam dan RPJM Nanggroe Aceh Darussalam

Pasal 7

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banda Aceh tahun 2007 – 2027 terdiri :

- BAB I Pendahuluan
- BAB II Kondisi, Analisa, Prediksi Kondisi Umum, Isu Strategis Kota Banda Aceh
- BAB III Visi, Misi dan Arah Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2007 - 2027
- BAB IV Penutup

BAB III
HUBUNGAN ANTARA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG (RPJP) DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN
KOTA LAINNYA

Pasal 8

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banda Aceh tahun 2007–2027 dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh.
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh (RKPK), merupakan Perencanaan Pembangunan dalam kurun waktu 1 tahun, sebagai hasil musyawarah perencanaan pembangunan kota setiap tahunnya.
- 3) Perencanaan strategis satuan kerja perangkat kota (SKPK) adalah perencanaan strategis dalam periode 5 (lima) tahunan, sebagai pencabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJM) Kota Banda Aceh.
- 4) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banda Aceh tahun 2007 – 2027 dimaksud pada ayat 1 menjadi :
 - a. Pedoman untuk menuntun arah dan kebijakan pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2007 – 2027;
 - b. Pedoman pada Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam 5 (lima) tahun dalam merumuskan dan menyusun visi, misi, dan program pembangunan yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
 - c. Kerangka dasar bagi pemerintah Kota dalam menyusun arah kebijakan umum / kebijakan umum APBD Kota Banda Aceh dalam setiap tahunnya;
 - d. Kerangka dasar bagi satuan kerja perangkat kota (SKPK) dalam menyusun kebijakan arah pembangunan sebagaimana tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- 1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari pemerintah pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.

ALUR PROSES PENYUSUNAN RPJP KOTA Banda Aceh

